

**LAPORAN INDIVIDU
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
PERIODE 15 JULI - 15 SEPTEMBER 2016**

**LOKASI: SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Alamat: Jalan Gadean 5 Ngupasan Yogyakarta
Dosen Pembimbing Lapangan PPL: Eny Kusdarini, M.hum**

**Disusun Sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Tahun Akademik 2016/2017**



**Disusun oleh:
RIRIN WULANDARI
13401241051
FIS/ PKnH/ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Periode 15 Juli – 15 September 2016

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pembimbing PPL di SMA Negeri 10 Yogyakarta, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ririn Wulandari
NIM : 13401241051
Fakultas : Ilmu Sosial
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 10 Yogyakarta dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.

Yogyakarta, 15 September 2016

Dosen Pembimbing Lapangan
Universitas Negeri Yogyakarta



Eny Kusdarini, M.Hum.
NIP. 19600304 198601 2 001

Guru Pembimbing Lapangan
SMA Negeri 10 Yogyakarta



Aspiyah, S.Pd.
NIP. 19710813 200502 2 003

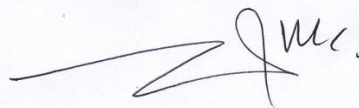
Mengetahui,

Kepala
SMA Negeri 10 Yogyakarta



Basuki
NIP. 19591012 198903 1 006

Koordinator PPL
SMA Negeri 10 Yogyakarta



Agus Mardiyono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19690530 199802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan limpahan karunia-Nya, sehingga laporan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program PPL yang berlokasi di SMA Negeri 10 Yogyakarta.

Dalam proses pelaksanaan program kegiatan PPL dan penyusunan laporan PPL ini, penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL tahun 2016.
2. Tim Pembina PPL dari LPPMP UNY atas segala bentuk pengarahannya.
3. Ibu Eny Kusdarini, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Pamong PPL UNY serta Dosen Pembimbing Lapangan PPL UNY yang telah memberi arahan dan bimbingan selama dilaksanakannya program PPL UNY tahun 2016 di SMA Negeri 10 Yogyakarta sampai dengan terselesainya laporan ini.
4. Bapak Drs. Basuki selaku Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta yang telah memberikan izin pelaksanaan PPL di SMA Negeri 10 Yogyakarta.
5. Bapak Agus Mardiyono, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta bidang Kurikulum sekaligus Koordinator PPL yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
6. Ibu Aspiyah, S.Pd. selaku Guru Pembimbing Lapangan PPL yang telah membimbing dan memberikan arahnya.
7. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan karyawan SMA atas perhatian dan kerjasama selama pelaksanaan kegiatan PPL.
8. Seluruh siswa-siswi SMA Negeri 10 Yogyakarta yang telah aktif mengikuti proses pembelajaran bersama mahasiswa PPL UNY.
9. Kedua orangtua penulis yang selalu memberi dukungan selama kegiatan PPL berlangsung.
10. Tim mahasiswa PPL UNY dan Universitas Sanata Dharma atas kerjasama dan kekompakannya.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang telah memberikan dorongan, arahan, dan bantuan sehingga pelaksanaan PPL tahun 2016 di SMA Negeri 10 Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga tercipta perbaikan ke arah kesempurnaan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 15 September 2016

Penulis

Ririn wulandari

13401241051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Analisis Situasi.....	1
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL	7
BAB II. PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL PPL	
A. Persiapan	10
B. Pelaksanaan PPL.....	12
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi	18
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	21
B. Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN.....	24

DAFTAR LAMPIR

A. LEMBAR F.01-F.04

1. F.01: Matriks Program Kerja PPL UNY
2. F.02: Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
3. F.03: Laporan Hasil Kerja PPL
4. F.04: Kartu Bimbingan PPL di Lokasi

B. LEMBAR OBSERVASI

1. Format Observasi Pembelajaran di Kelas
2. Format Observasi Kondisi Sekolah

C. JADWAL PELAJARAN DAN KALENDER AKADEMIK

1. Kalender Akademik
2. Jadwal Pelajaran

D. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Silabus
2. Jam Pembelajaran Efektif
3. Program Semester
4. Program Tahunan
5. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
6. Media Pembelajaran
7. Kisi-kisi Soal Ulangan
8. Soal Ulangan
9. Kunci Jawaban Soal Ulangan
10. Program Remedial
11. Tugas Terstruktur
12. Analisis Butir Soal Ulangan Harian
13. Daftar Presensi Peserta Didik
14. Daftar Nilai Kognitif Peserta Didik

E. DOKUMENTASI

**LAPORAN INDIVIDU
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

**LOKASI: SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Jl. Gadean No. 5, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta 55122**

Oleh:
RIRIN WULANDARI
NIM. 13401241051 / Pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbunyi “Pendidikan dan Pengajaran”. Selain sebagai aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelaksanaan PPL dapat menumbuhkan jiwa pendidik bagi mahasiswa program kependidikan yang dipersiapkan menjadi seorang guru. PPL diselenggarakan untuk memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa tentang berbagai aspek pendidikan yang ada di sekolah. Selama mengikuti kegiatan PPL, mahasiswa tidak hanya bertugas mengajar di dalam kelas, tetapi mahasiswa juga harus menyusun program pengajaran dan beberapa hal lain yang dibutuhkan selama jalannya PPL. Menjadi bagian dari sebuah Intitusi pendidikan tidak hanya menjadi seorang yang memberikan pembelajaran dalam kelas tetapi juga melakukan berkitan dengan administarai non pembelajaran yang anantinya akan menjadi bekal dari mahasiswa apabila menjadi pendidik di masa depannya.

Hal-hal yang perlu disusun merupakan dokumen-dokumen penting yang dapat menunjang proses pembelajaran serta kegiatan di luar pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Beberapa hal tersebut meliputi RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Materi Pembelajaran, Media dan alat pembelajaran, serta Alat dan Bahan Evaluasi, soal-soal tugas maupun ulangan harian siswa serta berbagai dokumen administrasi guru.

Pada pelaksanaan PPL ini, praktikan mengampu kelas X MIPA 3, X MIPA 4, X IPS 2, XII IPA 2, XII IPA 4, XII IPS . Namun di beberapa kesempatan, praktikan juga mengampu mata pelajaran PKn di kelas X MIPA 1, X MIPA 2, XII IPA 2, XI IPS. Masing-masing kelas mendapat 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Selain mengajar, praktikan juga menangani kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, PPL dapat menjadikan praktikan untuk terjun langsung dan berperan aktif dalam kegiatan sekolah, menambah sudut pandang dan memperluas wawasan dalam lingkungan sekolah. Menjadikan mahasiswa paham akan kegiatan pelaksanaan persekolahan dalam sudut pandang pembelajaran maupun dalam sudut pandang administrasi.

Kata Kunci: PKn, PPL, SMA Negeri 10 Yogyakarta

.BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bunyi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang pertama adalah Pendidikan dan Pengajaran. Salah satu wujud penerapan dan aplikasinya adalah dengan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Hal ini sangat sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dan diselenggarakan oleh LPPM UNY. Selain sebagai aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelaksanaan PPL dapat menumbuhkan jiwa pendidik bagi mahasiswa program kependidikan yang dipersiapkan menjadi seorang guru. PPL diselenggarakan untuk memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa tentang berbagai aspek pendidikan yang ada di sekolah.

Menjadi seorang pendidik bukanlah sebuah hal yang mudah. Untuk itulah PPL diselenggarakan sebagai wadah persiapan bagi mahasiswa untuk menjadi pendidik bagi generasi penerus bangsa. Secara umum, PPL memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengalami secara langsung bagaimana pengelolaan sekolah dalam berbagai aspek. Secara khusus, PPL juga membuat mahasiswa belajar mengelola pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan, mendidik dan bermakna melalui pendampingan intensif dari guru pamong dan dosen pembimbing. Berbagai pengalaman yang didapat selama PPL diharapkan dapat membawa perubahan dan pemahaman terhadap tugas guru yang profesional dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran yang mendidik.

B. Analisis Situasi

Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Tim PPL 2016 SMA Negeri 10 Yogyakarta harus memahami terlebih dahulu situasi dan kondisi lingkungan dan lokasi kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh mahasiswa baik kelompok maupun individu telah melaksanakan observasi ke lokasi PPL, yakni SMA Negeri 10 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Gadean nomor 5, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Observasi ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan gambaran berbagai aspek yang berkaitan dengan SMA Negeri 10 Yogyakarta.

SMA Negeri 10 Yogyakarta merupakan salah satu SMA yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Lokasi SMA ini cukup strategis, karena berada di jantung kota Yogyakarta, di antara keramaian

Malioboro dan Polresta Yogyakarta yang sangat mudah dijangkau oleh berbagai moda transportasi.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan selama pra-PPL didapatkan data sebagai berikut.

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 10 Yogyakarta

SMA Negeri 10 Yogyakarta berdiri pada tanggal 1 September 1952 melalui SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI No. 38115/Kab tanggal 21 Oktober 1952. Pada saat didirikan, SMA ini bernama SMA ABC Fakultas Pedagogik, karena didirikan atas prakara Jurusan Pedagogik Fakultas Sastra UGM. Untuk pertama kalinya, kegiatan pembelajaran di sekolah ini menempati gedung di Wijilan milik Yayasan Pancasila. Pada awal berdirinya, SMA ABC dipimpin oleh Prof. Drs. Sutedjo Brodjonegoro (Alm.) dibantu tokoh-tokoh lain seperti Prof. Drs. Abdullah Sigit.

Tahun 1958, jurusan B dipindah ke Sekip (saat ini ditempati oleh Gedung BNI 46 cabang UGM). Sehubungan dengan perkembangan sekolah, SMA AC tetap berada di Jalan Condokiraman No. 1 Sagan Yogyakarta. pimpinan sekolah saat itu adalah Bapak Brotohamidjojo yang juga merangkap sebagai pimpinan SMA B yang teletak di Sekip. Beliau menjabat sampai dengan tahun 1966.

Pada tahun 1965, SMA AC berganti nama menjadi SMA FIP II IKIP Yogyakarta. Mulai tahun 1966, SMA ini dipimpin oleh Bapak Drs. Soetomo sampai dengan tahun 1967. Mulai tahun 1967, SMA FIP II IKIP Yogyakarta dipimpin oleh Bapak Hardjono.

Tahun 1969 SMA FIP II IKIP Yogyakarta berganti nama menjadi SMA Percobaan II IKIP Yogyakarta, bersamaan dengan 8 (delapan) SMA IKIP lainnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 1971 dengan SK Menteri No. 173/1971 tanggal 21 September 1971 berganti nama menjadi SMA Pembangunan yang melaksanakan tugas Proyek Perintis Sekolah Menengah Pembangunan (PPSP). Proyek Perintis Sekolah Menengah Pembangunan dimulai tahun 1972 terdiri dari Stream Akademik, Stream Vokasional, Stream Kesekretariatan, Stream Tata Niaga, dan Stream Keteknikan.

Pada tanggal 28 Agustus 1973 SMA Pembangunan pindah dari Sagan ke jalan Gadean No. 5 Ngupasan Yogyakarta. Pada tahun 1974 SMA Pembangunan berganti nama menjadi SMA II IKIP Jurusan Eksakta masih dalam program PPSP dengan jurusan Pengetahuan Alam, Matematika, IPA (PALMA) hingga tahun 1983. Dengan SK Mendikbud nomor

07/10/10/0/1986 tanggal 10 Oktober 1986, SMA II IKIP Yogyakarta menjadi SMA 10 Yogyakarta.

Nama-nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat sejak berdirinya SMA Negeri 10 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tahun 1953 – 1954	: Prof. Drs. Sutedjo Brodjonegoro
Tahun 1954 – 1966	: Broto Hamidjojo
Tahun 1966 – 1967	: Drs. Soetomo
Tahun 1967 – 1989	: Hardjono
Tahun 1989 – 1991	: Harsono (Wks)
Tahun 1991 – 1997	: Drs. H. Prasetyo
Tahun 1997 – 1999	: Drs. Atun Saidjo
Tahun 1999 – 2001	: Dra. Hj. Sri Puspita Murni
Tahun 2001 – 2007	: Drs. Mawardi
Tahun 2007 – 2013	: Drs. Timbul Mulyono, M.Pd
Tahun 2013 – sekarang	: Drs. Basuki

2. Visi, Misi, dan Tujuan SMA Negeri 10 Yogyakarta

a. Visi SMA Negeri 10 Yogyakarta

Terwujudnya generasi yang beriman, berilmu, terampil, dan berakhlak mulia (GEMA MULIA).

b. Misi SMA Negeri 10 Yogyakarta

1. Mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa melalui penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianutnya.
2. Mewujudkan lulusan yang berilmu melalui pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, menyenangkan dan bermakna.
3. Mewujudkan lulusan yang memiliki keterampilan atau skill yang mantap melalui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bidang akademik non-akademik yang berkualitas.
4. Mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia melalui penanaman nilai-nilai karakter bangsa (religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menggapai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab) dalam setiap proses pembelajaran dan bimbingan.

c. Tujuan SMA Negeri 10 Yogyakarta

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa melalui penghayatan dan pengamalan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
2. Meningkatkan daya serap siswa dalam proses pembelajaran, sehingga hasil UN meningkat dan dapat memperbaiki peringkat sekolah pada tingkat DIY.
3. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
4. Meningkatkan perolehan kejuaraan dalam bidang olahraga dan seni, KIR, bahasa asing, dan olimpiade sains pada tingkat provinsi dan nasional.
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai karakter bangsa pada lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar.

3. Sasaran dan Strategi SMA Negeri 10 Yogyakarta

a. Sasaran SMA Negeri 10 Yogyakarta

1. Menghasilkan siswa yang berwawasan imtaq, mengamalkan ajaran agama sesuai dengan yang dianutnya.
2. Menghasilkan lulusan yang mencapai nilai UAS minimal 6,01 untuk semua mata pelajaran.
3. Menghasilkan >60% lulusan yang diterima Perguruan Tinggi dengan program studi terakreditasi baik.
4. Memiliki kelompok KIR, Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Akuntansi dan Kelompok pengguna bahasa asing yang mampu menjadi finalis di tingkat propinsi.
5. Memiliki tim basket dan sepak bola yang tangguh dan mampu menjadi finalis di tingkat propinsi.

b. Strategi SMA Negeri 10 Yogyakarta

1. Mengadakan siraman rohani rutin (dua minggu sekali), menggiatkan sholat berjamaah bagi siswa, guru, dan karyawan muslim.
2. Bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan dan menambah wawasan tentang Imtaq, Iptek, Bahasa Asing, dan Olahraga.
3. Meningkatkan mutu dan kinerja profesionalitas guru mata pelajaran, guru BK, dan karyawan.

4. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Memberikan pendalaman materi bagi siswa kelas XII.
6. Memberikan pelayanan kepada siswa kelas X dan XI yang membutuhkan pelajaran tambahan.
7. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa.
8. Mengikuti berbagai kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau Instansi terkait.
9. Membentuk kelompok KIR, Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Akuntansi dan Kelompok pengguna bahasa asing yang mampu bersaing di tingkat propinsi.
10. Membentuk tim basket dan sepak bola yang tangguh dan mampu menjadi finalis di tingkat propinsi.
11. Mengadakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional dengan penekanan paada lomba atau kegiatan yang terprogram.
12. Melaksanakan upacara bendera setiap hari senin pada minggu pertama dan minggu ketiga, untuk menumbuhkan disiplin dan rasa cinta tanah air.
13. Mengadakan kegiatan-kegiatan terprogram yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, budaya dan lingkungan.

4. Kurikulum

SMA Negeri 10 Yogyakarta telah menerapkan kurikulum 2013 (kurikulum nasional) untuk kelas X, sedangkan untuk kelas XI dan XII menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada masing-masing tingkatan terdapat dua program penjurusan, untuk kelas X disebut MIA dan IIS, sedangkan untuk kelas XI dan XII disebut IPA dan IPS.

5. Kondisi Fisik Sekolah

SMA Negeri 10 Yogyakarta merupakan SMA Negeri dengan luas bangunan paling sempit dibanding dengan SMA Negeri lain di wilayah kota Yogyakarta. Terbatasnya lahan membuat SMA Negeri 10 Yogyakarta melakukan pengembangan dan perluasan bangunan secara vertikal.

Berikut adalah rincian sarana dan prasarana di SMA Negeri 10 Yogyakarta:

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
-----	------------------	--------

1.	Ruang Kantor kepala sekolah	1
2.	Ruang wakil kepala sekolah	1
3.	Ruang guru	1
4.	Ruang tata usaha	1
5.	Ruang TI	1
6.	Ruang BK	1
7.	Ruang kelas	
	a. Kelas X MIA 1	1
	b. Kelas X MIA 2	1
	c. Kelas X MIA 3	1
	d. Kelas X MIA 4	1
	e. Kelas X IIS 1	1
	f. Kelas X IIS 2	1
	g. Kelas XI IPA 1	1
	h. Kelas XI IPA 2	1
	i. Kelas XI IPA 3	1
	j. Kelas XI IPA 4	1
	k. Kelas XI IPS	1
	l. Kelas XII IPA 1	1
	m. Kelas XII IPA 2	1
	n. Kelas XII IPA 3	1
	o. Kelas XII IPA 4	1
	p. Kelas XII IPS	1
8.	Ruang perpustakaan	1
9.	Laboratorium	
	a. Laboratorium Fisika	1
	b. Laboratorium Kimia	1
	c. Laboratorium Biologi	1
	d. Laboratorium Bahasa	1
	e. Laboratorium TIK	1
10.	Ruang penunjang	
	a. Lobby	1
	b. Ruang OSIS	1
	c. Ruang Audio-Visual (AVA)	1
	d. Ruang Arsip	1
	e. Mushola	1

	f. Lapangan basket	1
	g. UKS	1
	h. Kamar mandi/WC	17 (putra & putri)
	i. Kantin	1
	j. Pos satpam	1
	k. Tempat parkir	2
	l. Gudang	1
	m. Dapur	1

6. Program Pendidikan dan Pelaksanaannya

a. Kegiatan akademik

Kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMA Negeri 10 Yogyakarta dimulai pada pukul 07.15 dan berakhir pada pukul 14.00 untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan untuk hari Jumat, KBM dilaksanakan pada pukul 07.15 – 11.15 WIB. Mulai tanggal 26 Juli 2016, sekolah mengadakan jam literasi (kegiatan membaca buku non-pelajaran) yang diadakan setiap hari Selasa-Sabtu selama 15 menit, mulai pukul 07.00 – 07.15 WIB. Namun, kegiatan ini hanya berlangsung selama \pm 1 bulan, karena mulai tanggal 22 Agustus 2016, diadakan kegiatan pendalaman materi (PM) mulai pukul 06.30 – 07.15 WIB. Kegiatan ini diisi dengan latihan dan pembahasan soal-soal. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari khusus lainnya. Khusus untuk hari Senin, upacara bendera dihitung sebagai jam pertama.

b. Kegiatan kesiswaan

Kegiatan kesiswaan dilaksanakan dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Organisasi siswa yang terdapat di SMA Negeri 10 Yogyakarta adalah OSIS dan MPK (Majelis Perwakilan Kelas). Terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler bagi seluruh siswa, seperti Pramuka (wajib), Pecinta Alam, Desain Grafis, Musik, Bahasa Jepang, KIR, Futsal, Basket, Fotografi, Tonti, Rohis, Batik, dan Jurnalistik.

C. Rumusan Program dan Rencana PPL

Rangkaian program PPL dimulai sejak penyerahan mahasiswa ke sekolah sampai dengan penarikan kembali mahasiswa ke kampus. Penyerahan mahasiswa ke SMA Negeri 10 Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016 oleh DPL Pamong Ibu Eny Kusdarini, M.Hum. Meskipun penyerahan dilaksanakan pada bulan Februari, namun kegiatan PPL baru resmi dilaksanakan mulai tanggal

15 Juli - 15 September 2016 bersamaan dengan kegiatan KKN. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa masih mengikuti kegiatan perkuliahan Pembelajaran Mikro.

Mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL setiap hari Senin-Jumat siang, sedangkan pada Jumat sore sampai dengan Minggu, mahasiswa berada di lokasi KKN. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan mahasiswa berada beberapa jam di sekolah pada hari Sabtu karena menyesuaikan dengan jadwal mengajar dan administrasi lainnya.

Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, tentunya setiap mahasiswa harus mempersiapkan rancangan kegiatan PPL terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar kegiatan PPL dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Rancangan kegiatan PPL digunakan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan PPL di sekolah.

Berikut ini adalah rancangan kegiatan PPL secara global sebelum melakukan praktik mengajar di kelas.

1. Konsultasi dengan guru pembimbing mengenai jadwal mengajar, pembagian materi, dan persiapan mengajar.
2. Membantu guru dalam mengajar serta mengisi kekosongan kelas apabila guru tidak masuk atau ada kepentingan.
3. Menyusun persiapan untuk praktik terbimbing, artinya tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa ditentukan oleh guru dan harus di konsultasikan kepada guru pembimbing mata pelajaran.
4. Melaksanakan praktik mengajar terbimbing, artinya bahwa bimbingan dilaksanakan pada kelas dengan materi berbeda. Praktik mengajar di kelas dilakukan minimal 8 kali tatap muka dan dalam pelaksanaannya diamati oleh guru pembimbing.
5. Menyusun persiapan untuk praktik mengajar secara mandiri, artinya materi yang diajarkan dipilih sendiri oleh mahasiswa dan diberi kesempatan untuk mengelola proses pembelajaran secara penuh, namun tetap ada bimbingan dan pemantauan dari guru.
6. Melakukan diskusi dan refleksi terhadap tugas yang telah dilakukan, baik yang terkait dengan kompetensi profesional, sosial, pedagogik, maupun kepribadian, yang dilakukan dengan teman sejawat, guru koordinator sekolah, dan dosen pembimbing.
7. Menyusun laporan PPL pada akhir kegiatan PPL.

Berdasarkan rancangan kegiatan PPL yang diuraikan secara global di atas, berikut adalah rumusan program dan rancangan kegiatan PPL:

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
2. Pelaksanaan Pembelajaran.
3. Evaluasi Hasil Pembelajaran.
4. Pembuatan Soal Ulangan Harian.
5. Pelaksanaan Ulangan Harian.
6. Pelaksanaan Perbaikan (Remedial).

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL

A. Persiapan

Keberhasilan suatu kegiatan sangat bergantung dari persiapannya, karena persiapan yang baik akan berimplikasi pada pelaksanaan dan hasil yang baik pula. Demikian juga pada pelaksanaan program PPL, mahasiswa juga hendaknya melakukan persiapan yang matang sebelum melaksanakan praktik. Persiapan tersebut meliputi:

1. Pengajaran Mikro

Persiapan paling awal yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mengikuti perkuliahan pengajaran mikro. Di sini, mahasiswa praktikan melaksanakan praktik mengajar pada sebuah kelas kecil. Yang berperan sebagai guru adalah mahasiswa praktikan itu sendiri dan yang berperan sebagai siswa adalah teman satu kelompok berjumlah 6 orang dengan dosen pembimbing. Adapun dosen pembimbing mikro praktikan adalah Ibu Eny Kusdarini, M.Hum.

Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik maupun saran setiap kali praktikan selesai praktik mengajar. Berbagai macam metode dan media pembelajaran dicoba dalam kegiatan ini, sehingga praktikan memahami media yang sesuai untuk setiap materi. Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik segi materi maupun penyampaian atau metode mengajarnya. Pengajaran mikro juga merupakan syarat bagi mahasiswa program kependidikan untuk dapat mengikuti PPL, karena untuk mengikuti PPL mahasiswa harus lulus dalam mata kuliah Pengajaran Mikro dengan nilai minimal B.

Adapun Praktik Pembelajaran Mikro meliputi:

- a. Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran.
- b. Praktik membuka pelajaran.
- c. Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan materi yang disampaikan.
- d. Praktik menyampaikan materi yang berbeda-beda (materi fisik dan non fisik).
- e. Teknik bertanya kepada siswa.
- f. Praktik penguasaan dan penguasaan kelas.
- g. Praktik menggunakan media pembelajaran (laptop dan proyektor).

h. Praktik menutup pelajaran.

Setiap kali mengajar mahasiswa diberi kesempatan selama 15 menit. Setiap kali selesai mengajar, mahasiswa diberi pengarahannya atau koreksi mengenai kesalahan atau kekurangan dan kelebihan yang mendukung mahasiswa dalam mengajar.

2. Pembekalan PPL

Pembekalan dilaksanakan di tingkat fakultas untuk seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPL. DPL PPL diambil dari salah satu dosen pengajar pembelajaran mikro yaitu Ibu Eny Kusdarini, M, Hum. yang merupakan dosen jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial. Untuk pembekalan dengan DPL PPL dilaksanakan sebelum dan selama PPL berjalan, artinya pembekalan tidak hanya dilaksanakan sebelum PPL berjalan tapi juga selama PPL, mahasiswa berhak untuk tetap berkonsultasi dengan DPL PPL masing-masing.

3. Observasi

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas guru khususnya tugas mengajar. Observasi sebagai gambaran bagi mahasiswa khususnya praktikan untuk mengetahui tentang bagaimana proses belajar mengajar.

Adapun obyek dari observasi ini adalah:

- a. Perangkat Pembelajaran
 - 1) Kurikulum 2013
 - 2) Silabus
 - 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- b. Proses Pembelajaran
 - 1) Membuka pelajaran
 - 2) Penyajian materi
 - 3) Metode pembelajaran
 - 4) Penggunaan Bahasa
 - 5) Penggunaan waktu
 - 6) Gerak
 - 7) Cara memotivasi siswa
 - 8) Teknik bertanya
 - 9) Teknik penguasaan kelas
 - 10) Penggunaan media
 - 11) Bentuk dan cara evaluasi
 - 12) Menutup pelajaran

- c. Perilaku Siswa
 - 1) Perilaku siswa di dalam kelas
 - 2) Perilaku siswa di luar kelas

4. Persiapan Sebelum Praktik Mengajar

Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa PPL harus mempersiapkan administrasi dan persiapan materi, serta media yang akan digunakan untuk mengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan tersebut antara lain:

- a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi rencana pembelajaran untuk setiap pertemuan.
- b. Pembuatan media, yang dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran. Media yang dibuat hendaknya dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam menemukan konsep.
- c. Diskusi dengan sesama rekan sejawat, yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah mengajar untuk saling bertukar pengalaman, saran dan solusi.
- d. Diskusi dan konsultasi dengan guru pembimbing, yang dilakukan sebelum dan sesudah mengajar.

B. Pelaksanaan PPL

Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan, pada umumnya seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Berikut adalah hasil kegiatan pelaksanaan PPL.

1. Penyusunan RPP

Bentuk Kegiatan	:	Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran
Tujuan Kegiatan	:	Mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran
Sasaran	:	kelas X MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X MIPA 4, X IPS 1, X IPS 2, XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPA 3, XII IPA 4, XII IPS
Waktu Pelaksanaan	:	Sebelum praktik mengajar
Tempat Pelaksanaan	:	SMA Negeri 10 Yogyakarta
Peran Mahasiswa	:	Pelaksana

2. Praktik Mengajar di Kelas

Bentuk Kegiatan	:	Mengajar di kelas
Tujuan Kegiatan	:	Menerapkan sistem pembelajaran di sekolah menggunakan ilmu yang sudah dipelajari
Sasaran	:	kelas X MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X

	MIPA 4, X IPS 1, X IPS 2, XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPA 3, XII IPA 4, XII IPS
Waktu dan Tempat Pelaksanaan :	

No	Hari, tanggal	Kelas	Waktu 2x45'	Materi	Metode	Media
1.	Senin, 1 Agustus 2016	Mengajar X MIPA 4	Jam ke 6-7	Pertemuan 1 Pembagian Kekuasaan di Indonesia	Ceramah bervariasi, diskusi kelompok dan presentasi	Power Point dan White Board
2.	Rabu, 3 Agustus 2016	Mengajar X MIPA 3	Jam ke 6-7	Pertemuan 1 Pembagian Kekuasaan di Indonesia	Ceramah bervariasi, diskusi kelompok dan presentasi	Power Point dan White Board
3.	Kamis, 4 Agustus 2016	Mengajar XII IPA 2	Jam ke 5-6	Pertemuan 1 Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
4.	Jumat, 5 Agustus 2016	Mengajar X IPS 1	Jam ke 4-5	Pertemuan 1 Pembagian Kekuasaan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
5.	Rabu, 10 Agustus 2016	Mengajar X MIPA 2	Jam ke 1-2	Pertemuan 2 Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board

				Non-Kementerian		
6.	Kamis, 11 Agustus 2016	Mengajar XII IPA 3	Jam ke 7-8	Pertemuan 2 Bentuk Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
7.	Jumat, 12 Agustus 2016	Mengajar X IPS 1	Jam ke 4-5	Pertemuan 2 Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
8.	Sabtu, 13 Agustus 2016	Menggantikan Guru mengajar XII IPA 1	Jam ke 7 (1 JP)	Pertemuan 1 Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
9.	Senin, 15 Agustus 2016	Mengajar X MIPA 1	Jam ke 4-5	Pertemuan 3 Nilai – nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
10.	Kamis, 18 Agustus 2016	Mengajar XII IPA 2	Jam ke 5-6	Pertemuan 2 Bentuk Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
11.	Jumat, 19	Mengajar	Jam ke	Pertemuan 2	Ceramah	Power

	Agustus 2016	XII IPA 4	2-3	Bentuk Pemerintahan	bervariasi dan tanya jawab	Point dan White Board
12.	Sabtu, 20 Agustus 2016	Mengajar X IPS 2	Jam ke 3-4	Pertemuan 2 Nilai – nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
13.	Senin, 22 Agustus 2016	Ulangan X MIPA 1	Jam ke 4-5	BAB 1		
14.	Rabu, 24 Agustus 2016	Ulangan MIPA 2	Jam ke 1-2	BAB 1		
15.	Kamis, 25 Agustus 2016	Mengajar XII IPA 3	Jam ke 7-8	Pertemuan 3 Sistem Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
16.	Jumat, 26 Agustus 2016	Mengajar XII IPA 2	Jam ke 2-3	Pertemuan 3 Sistem Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
17.	Jumat, 26 Agustus 2016	Ulangan X IPS 1	Jam ke 4-5	BAB 1		
18.	Sabtu, 27 Agustus 2016	Mengajar XII IPA 1	Jam ke 1-2	Pertemuan 3 Sistem Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
19.	Senin, 29 Agustus 2016	Mengajar X MIPA 4	Jam ke 6-7	Pertemuan 4 Menjelajah Wilayah Negara Kesatuan	Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi	Power Point, Video dan White Board

				Republik Indonesia		
20.	Selasa, 30 Agustus 2016	Mengajar XII IPS	Jam ke 7-8	Pertemuan 3 Sistem Pemerintahan	Ceramah bervariasi dan tanya jawab	Power Point dan White Board
21.	Rabu, 31 Agustus 2016	Mengajar X MIPA 3	Jam ke 6-7	Pertemuan 4 Menjelajah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi	Power Point, Video dan White Board
22.	Jumat, 2 September 2016	Mengajar X IPS 1	Jam ke 4-5	Pertemuan 4 Menjelajah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia	Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi	Power Point, Video dan White Board
23.	Senin, 5 September 2016	Mengajar X MIPA 1	Jam ke 4-5	Pertemuan 5 Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia	Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi	Power Point dan White Board

24.	Rabu, 7 September 2016	Mengajar X MIPA 2	Jam ke 1-2	Pertemuan 5 Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia	Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi	Power Point dan White Board
-----	------------------------------	----------------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------

3. Penilaian

Penilaian yang dilakukan oleh praktikan adalah dalam bentuk tugas individu dan ulangan. Tugas Individu, yaitu memberikan soal latihan untuk dikerjakan. Ulangan harian berfungsi untuk mengevaluasi seberapa pemahaman siswa tentang materi yang sudah diberikan guru. Kriteria Ketuntasan Minimal sebesar 75.

4. Penulisan Laporan

Tindak lanjut dari kegiatan PPL adalah penyusunan laporan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan PPL berisi laporan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan PPL. Laporan ini disusun secara individu dengan persetujuan Guru Pembimbing, Koordinator PPL Sekolah, Kepala Sekolah, dan Dosen Pembimbing PPL.

Selain praktik mengajar, mahasiswa juga berperan dalam beberapa kegiatan sekolah seperti:

1. Piket

Ada dua jenis piket yang dilaksanakan mahasiswa PPL di SMA Negeri 10 Yogyakarta, yakni piket lobby dan piket perpustakaan. Setiap mahasiswa mendapat jadwal piket minimal selama satu kali seminggu.

Di piket lobby, mahasiswa bertugas sebagai guru piket yang menyiapkan presensi siswa, mencatat siswa yang terlambat, memberikan surat izin pada siswa yang akan meninggalkan sekolah, menggantikan guru yang tidak hadir dengan meninggalkan tugas dengan menunggu kelas tertentu mengerjakan tugas dan memastikan agar siswa tidak berkeliaran di luar kelas, menerima surat masuk, dan mengantarkan tamu kepada pihak yang dituju oleh tamu.

Sedangkan di piket perpustakaan, mahasiswa terlibat dalam menginventarisasi buku-buku pelajaran kelas X sampai kelas XII. Selain

itu, mahasiswa juga ikut terlibat dalam mengadministrasi peminjaman dan pengembalian buku.

2. Upacara bendera

Setiap mahasiswa PPL diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Upacara tersebut diikuti oleh kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha dan para siswa. Yang bertindak sebagai petugas upacara adalah siswa secara bergantian.

Selain upacara bendera setiap hari Senin, mahasiswa PPL juga mengikuti upacara bendera dalam rangka HUT ke-64 SMA Negeri 10 Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016. Upacara ini diikuti oleh komite sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan perwakilan orang tua siswa.

3. HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta

Selain upacara bendera, mahasiswa PPL juga berpartisipasi dalam kegiatan HUT ke-64 SMA Negeri 10 Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016. Rangkaian kegiatan yang diikuti antara lain jalan sehat, pentas seni (akustik band), *flashmob*, dan seminar pendidikan. Mahasiswa terlibat dalam sie konsumsi dan dokumentasi.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan

Praktikan mendapat kesempatan mengajar di kelas XI IPS, XI IPA 3, XII IPS dan XII IPA 2. Setelah beberapa kali melaksanakan PPL, mahasiswa praktikan sedikit banyak dapat melakukan evaluasi terhadap hasil kinerjanya. Berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan siswa selama proses pembelajaran, hasil pekerjaan siswa dan hasil ulangan harian yang dilaksanakan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa sudah paham dengan materi yang diberikan oleh praktikan. Pada tanggal 18 Agustus 2016, praktikan melaksanakan ulangan harian bagi kelas yang praktikan ampu, yakni kelas XI IPS. Namun, dari hasil ulangan yang telah dilakukan, ternyata masih ada siswa yang belum mampu mencapai nilai KKM. Untuk siswa tersebut, praktikan memberikan remedial.

Berdasarkan observasi yang praktikan lakukan selama proses PPL, kelas semua kelas yang praktikan ampu mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Kelas XI IPS dikenal sebagai salah satu kelas yang aktif dengan keadaan siswa yang cukup ramai, namun dengan metode dan beberapa media pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat suasana kelas menjadi aktif dan tetap kondusif. Untuk kelas XI IPA 3, XII IPS, dan XII IPA 2, praktikan hanya masuk

beberapa kali saja. Berdasarkan observasi yang praktikan lakukan, siswa di kelas ini sangat antusias belajar bahasa Prancis. Para siswa terlihat aktif dalam menjawab maupun mengutarakan pendapatnya.

D. Refleksi Hasil Pelaksanaan

Setelah melaksanakan kegiatan PPL, praktikan dapat merefleksikan hal-hal apa saja yang diperoleh selama proses pelaksanaan PPL. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan PPL ini adalah praktikan dapat belajar untuk mengajar dengan baik. Praktikan harus menguasai materi dan memilih metode yang tepat sehingga materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa. Praktikan juga belajar mengelola kelas dan menyelaraskan materi apabila mengajar kelas paralel.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan juga dapat menganalisis beberapa faktor pendukung serta faktor penghambat dalam melaksanakan program PPL, diantaranya sebagai berikut.

1. Faktor pendukung pelaksanaan PPL
 - a. Guru pembimbing sangat perhatian, sehingga kekurangan-kekurangan praktikan pada waktu proses pembelajaran dapat diketahui. Selain itu, guru juga memberikan saran dan kritik sebagai bahan perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya.
 - b. Dosen pembimbing PPL rutin memonitor pelaksanaan PPL, sehingga dapat diperoleh bimbingan dan motivasi sebagai bekal mengikuti PPL.
 - c. Siswa-siswi yang kooperatif dan interaktif selama proses KBM.
 - d. Teman-teman satu kelompok baik dari UNY dan Sanata Dharma yang kompak sehingga kami dapat saling bertukar pikiran mengenai metode atau media pembelajaran.
2. Faktor penghambat pelaksanaan PPL
 - a. Para siswa yang senang mengobrol dan bercanda saat KBM berlangsung, sehingga suasana menjadi kurang kondusif.
 - b. Adanya siswa yang kurang perhatian di kelas, sehingga kadang waktu terpotong untuk memberikan pengarahan ke siswa tersebut.
 - c. Banyak siswa yang menggunakan *gadget* saat pelajaran berlangsung sehingga menjadi perhatian khusus bagi praktikan untuk mengingatkan dan memberi pengarahan ke siswa tersebut.

Selain manfaat, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang praktikan peroleh selama proses pelaksanaan PPL, praktikan juga dapat merefleksikan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan

tersebut. Hambatan yang praktikan hadapi selama kegiatan PPL adalah sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa siswa yang masih awam dan belum siap menerima materi.
2. Sikap siswa yang kurang mendukung proses pembelajaran.

Upaya yang praktikan lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Berkonsultasi dengan guru pembimbing mengenai teknik pengelolaan kelas yang sesuai.
2. Menciptakan suasana kelas yang santai tetapi tetap serius. Diantaranya dengan selingan sedikit humor dan penggunaan metode dan media yang menyenangkan. Praktikan menggunakan humor dengan batas yang sewajarnya agar dalam proses KBM tercipta suasana yang santai namun kondusif. Selain itu, penggunaan metode dan media yang bervariasi bertujuan agar para siswa tidak jenuh atau bosan dengan materi pelajaran.
3. Bersikap akrab dengan siswa. Praktikan berusaha dekat dekat siswa tetapi masih dalam batas yang wajar. Misalnya dengan menanyakan tugas-tugas siswa, membantu kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Prancis, saling bertegur sapa.
4. Memberikan motivasi kepada siswa. Di sela-sela proses KBM, praktikan sering memberikan motivasi kepada siswa agar mereka belajar dengan giat sehingga dapat meraih prestasi dan cita-cita. Selain itu, praktikan juga sering memberikan motivasi mengenai manfaat apa yang dapat diperoleh ketika siswa dapat berbahasa Prancis, misalnya dengan gambaran pekerjaan yang dapat dilakukan seseorang apabila mampu berbahasa Prancis.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan laporan ini merupakan akhir dari program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di SMA Negeri 10 Yogyakarta. Selama melaksanakan PPL, praktikan mempunyai banyak pengalaman yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. PPL merupakan pengembangan dari empat kompetensi bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
2. PPL merupakan wahana yang tepat bagi mahasiswa calon guru untuk dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh.
3. PPL menjadikan mahasiswa dapat terjun langsung dan berperan aktif dalam kegiatan sekolah, menambah sudut pandang dan memperluas wawasan mahasiswa dalam lingkungan sekolah.
4. Dengan program PPL, mahasiswa sebagai calon pendidik tentunya akan lebih menyadari tugas dan kewajibannya sebagai individu yang berkompeten sehingga akan memiliki semangat dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan sebagai salah satu peran serta dalam membangun bangsa.

B. Saran

Keberhasilan pelaksanaan PPL merupakan tanggung jawab bersama antara mahasiswa praktikan, SMA Negeri 10 Yogyakarta, maupun pihak Universitas Negeri Yogyakarta. Oleh karena itu, ada beberapa poin saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan program PPL ini, yaitu:

1. Bagi pihak UNY
 - a. Pelaksanaan PPL tahun ini bersamaan dengan program KKN periode semester khusus 2015/2016, hal ini menyebabkan banyak mahasiswa merasa kelelahan dengan adanya tuntutan program yang harus diselesaikan. Untuk itu, diharapkan adanya kebijakan yang matang dan baik agar kedua program tersebut dapat berjalan tanpa memberatkan salah satu pihak.

- b. Diharapkan pihak kampus dapat memberikan bekal yang cukup bagi mahasiswa calon guru sebelum melaksanakan PPL, baik secara moril maupun materil agar PPL dapat berjalan dengan baik dan lebih optimal.
2. Bagi pihak LPPMP
- a. Pihak LPPMP hendaknya dapat lebih menyeluruh dalam memonitor dan mengarahkan kelompok-kelompok PPL.
 - b. Perlunya kebijakan dalam hal penyebaran informasi PPL yang jelas dan transparan seperti dalam proses persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan PPL.
3. Bagi pihak sekolah
- a. Mahasiswa PPL mengharapkan agar pihak sekolah memberikan kesempatan PPL UNY tahun yang akan datang dan membimbing mereka sebaik-baiknya.
 - b. Perlu adanya upaya terus menerus untuk meningkatkan profesionalisme kerja seluruh elemen sekolah dalam upaya menjadikan SMA Negeri 10 Yogyakarta sebagai sekolah yang menghasilkan *output* yang handal dan mampu bersaing di dunia kerja.
4. Bagi mahasiswa
- a. Mahasiswa harus memiliki persiapan yang matang untuk melaksanakan PPL baik dari segi manajemen waktu maupun manajemen kelas. Hal lain yang juga harus dipersiapkan adalah fisik dan mental yang baik.
 - b. Mahasiswa harus mampu mengelola kelas dan siswa, agar kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Dalam pengelolaan kelas, sebisa mungkin melibatkan siswa sebagai kelompok aktif bukan terpusat pada guru saja.
 - c. Perlu adanya koordinasi yang secara sadar, partisipatif, pengertian dan matang antar mahasiswa dalam satu kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim PP PPL dan PKL LPPMP. 2016. Panduan Pengajaran Mikro. Yogyakarta: LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tim PP PPL dan PKL LPPMP. 2016. Materi Pembekalan PPL. Yogyakarta: LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tim PP PPL dan PKL LPPMP. 2016. Panduan PPL/MAGANG III. Yogyakarta: LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN



Universitas Negeri
Yogyakarta

MATRIK PROGRAM KERJA PPL/ MAGANG III UNY
TAHUN 2016

F01
Untuk Mahasiswa

NOMOR LOKASI : -

Nama Mahasiswa : Ririn Wulandari

NAMA SEKOLAH : SMAN 10 YOGYAKARTA

NIM : 13401241051

ALAMAT SEKOLAH : Jln. Ngupasan

Jurusan/Fakultas : PKnH/FIS

No	Nama Kegiatan/ Program PPL/ Magang III	Jumlah Jam per Minggu										Jumlah Jam
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
A. Program Mengajar												
1.	Bimbingan PPL			1								1
2.	Observasi Kelas			3								3
3.	Pendampingan KBM			1.5								1.5
4.	Ulangan Harian							9				15
5.	Penyusunan RPP		6.25	1.5				2				9.75
6.	Penyusunan Media dan materi Pembelajaran			2	2.75	1.75						12
7.	Pelaksanaan Praktik Mengajar				6	11.25	6	1.5	6	10.5		41.5
	Observasi teman mengajar				6	5.25		3	7.5	4.5		32.25
	Penyusunan Soal Ulangan Harian									2.5		2.5
	Koreksi Hasil Lembar Kerja Siswa					2		3	3.5	3		11.5
	Evaluasi mengajar				2				0.75			2.75
	Penyusunan soal UTS kelas X									1.5		1.5
B. Program Non Mengajar												



**LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Gadean No. 5 Ngupasan, Yogyakarta
GURU PEMBIMBING : Aspiyah S, Pd

NAMA MAHASISWA : RIRIN WULANDARI
NIM : 13401241051
FAK/JUR/PRODI : FIS/ Pend. Kewarganegaraan
DPL : Eny Kusdarini, M, Hum

No	Hari/ Tanggal	Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
MINGGU KE-1						
1.	Jumat, 15 Juli 2016	07.00 – 09.30	Pelepasan KKN-PPL	Dilaksanakan di GOR UNY. Dihadiri oleh 4489 mahasiswa peserta KKN-PPL. Mahasiswa dilepas oleh Rektor UNY, Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.	-	-
MINGGU KE-2						
3.	Senin, 18 Juli 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 08.00	Upacara bendera	Upacara bendera dipimpin oleh Bapak Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta. Dikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI, dan XII, guru dan karyawan, serta 17 mahasiswa PPL UNY dan 6 mahasiswa PPL Univ. Sanata Dharma. Bapak Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta juga sekaligus membuka kegiatan MPLS yang diikuti 191 siswa baru.	-	-
		08.00 – 08.30	Halal bihalal	Dilaksanakan setelah upacara bendera di lapangan basket. Seluruh siswa, guru karyawan, dan mahasiswa PPL saling	-	-

		08.30 – 09.00	Rapat Koordinasi anggota PPL & pembagian tugas	berjabat tangan. - Perkenalan dengan mahasiswa PPL dari Universitas Sanata Dharma - Pembagian jadwal piket sementara	-	-
		09.00 – 10.00	Buat RPP	- Mempersiapkan RPP	-	-
		10.00 – 12.30	Piket perpustakaan	Inventarisasi buku-buku baru (memberi label identitas buku, menata buku-buku baru) jumlah 144 buku.	-	-
		12.30 – 14.00	Diskusi materi RPP	Berdiskusi dengan teman sejawat tentang materi dan RPP	-	-
4.	Selasa, 19 Juli 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 07.45	Apel MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)	Dikuti 191 siswa baru dan didampingi seluruh mahasiswa PPL.	-	-
		07.45 – 10.00	Piket lobby	Presensi siang dan merekap data siswa yang izin dan tidak masuk	-	-
		10.00- 12.00	Piket perpustakaan	Pendataan buku-buku baru	-	-
		12.30- 14.00	Membuat RPP	Menyiapkan materi membuat RPP	-	-
5.	Rabu, 20 Juli 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 07.45	Apel MPLS	Dikuti 191 siswa baru dan didampingi seluruh mahasiswa PPL.	-	-
		08.25 – 09.15	Piket perpustakaan	Infentarisasi buku perpustakaan yaitu melakukan pencatatan dan pendataan buku-buku baru yang masuk perpustakaan.	-	-
		09.20 - 12.00	Membantu pembuatan laporan guru	Membantu membuat laporan pembekalan kurikulum 2013 SMAN 10 Yogyakarta	-	-

		12.15 – 14.00	Pembuatan RPP	Membuat RPP bersama teman sejawat	-	-
6.	Kamis, 21 Juli 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		08.00 – 10.00	Piket perpustakaan	Inventarisasi buku-buku baru dan mengadministrasi peminjaman dan pengembalian buku.	-	-
		10.00 – 12.00	Penyusunan RPP dan Prosem	Menyusun materi RPP untuk kelas X pembagian kekuasaan dan membuat [rosem kelas 10 (menghitung minggu aktif)]	-	-
		12.30 – 14.00	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Membagikan presensi siang ke kelas-kelas	-	-
7.	Jumat, 22 Juli 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 09.30	Piket lobby	Presensi siang dan merekap data siswa yang izin dan tidak masuk, presensi pagi	-	-
		09.30 – 11.30	Piket Perpustakaan	Intentarisasi buku perpustakaan yaitu melakukan pencatatan dan pendataan buku-buku baru yang masuk perpustakaan.	-	-

MINGGU KE-3

8.	Senin, 25 Juli 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 08.00	Upacara bendera	Upacara bendera dipimpin oleh Bapak Waka Kurikulum SMA Negeri 10 Yogyakarta, Bapak Agus Mardiyono, S.Pd., M.Pd. Diikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI, dan XII, guru dan karyawan,	-	-

				serta 17 mahasiswa PPL UNY dan 6 mahasiswa PPL Univ. Sanata Dharma.		
		08.00 – 09.30	Obsevasi kelas 10 MIPA 4	Mengamati guru mengajar, serta mempelajari materi kelas 10	-	-
		09.30 – 11.00	Piket Lobby	Presensi siang dan merekap data siswa yang izin dan tidak masuk, presensi pagi	-	-
		11.00 – 12.00	Bimbingan dengan DPL	Membahas RPP dan diskusi kegiatan PPL	-	-
9.	Selasa, 26 Juli 2016	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X MIPA 3	Masih banyak siswa yang belum membawa buku non-pelajaran	Memberi kebijakan bagi yang muslim membaca Al-Qur'an dan yang nasrani membaca Alkitab.
		07.15 – 10.00	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Mendata siswa yang terlambat. Melaksanakan presensi ke kelas-kelas	-	-
		10.15 - 12.00	Piket Perbustakan	Pendataan buku-buku baru	-	-
		12.30 – 14.00	Menggantikan guru mengajar di kelas XIII IPS	memberikan tugas dan pendampingan pengerjaan tugas	-	-
10.	Rabu, 27 Juli 2016	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X MIPA 3	Masih terdapat beberapa siswa yang belum membawa buku	Kebijakan bagi yang siswa muslim yang tidak membawa

2016			warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.00 – 07.15	Kegiatan literasi	Mengawasi jam literasi di X MIPA 3 muslim membaca Al-Quran	-	-
	07.15 – 08.15	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Mendata siswa yang izin dan terlambat dan melaksanakan presensi ke kelas-kelas	-	-
	08.15 – 11.15	Pembuatan RPP	Revisi RPP dan perancangan media pembelajaran	-	-
MINGGU KE-4					
14. Senin, 1 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
	07.15 – 08.00	Upacara bendera	Upacara bendera dipimpin oleh Ibu Waka Bidang Kesiswaan SMA Negeri 10 Yogyakarta Dra. Purwantini. Ditikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI, dan XII, guru dan karyawan, serta 17 mahasiswa PPL UNY dan 6 mahasiswa PPL Univ. Sanata Dharma.	-	-
	08.00 – 09.30	Piket Perpustakaan	Mendata buku – buku masuk	-	-
	09.45 – 11.15	Observasi teman mengajar	Menemani Khusmiati nabila mengajar di X MIPA 1 sekaligus melakukan observasi		
	11.15 – 12.00 12.30 – 13.15	Praktik mengajar 1 (Terbimbing)	Kelas X MIPA 4 materi pembagian kekuasaan di Indonesia. Di hadir 34 siswa. Ditemani guru pembimbing dan teman satujurusan satu orang.		
	13.15-14.00	Diskusi hasil mengajar bersama teman sejawat	Berdiskusi mengenai hasil pengamatan bersama, untuk evaluasi mengajar	-	-
15. Selasa, 2	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan	-	-

Agustus 2016				warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X MIPA 3	-	-	
	07.15 – 10.15	Piket perpustakaan	Melayani dan mengadministrasi peninjaman dan pengembalian buku paket siswa	-	-	
	10.30 – 12.00	Membuat administrasi guru (prota dan prosem)	Meenghujung minggu aktif dan hari aktif pada kalender akademik	-	-	
	12.00 – 14.00	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Melaksanakan presensi siang ke kelas X-XII	-	-	
	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-	
16. Rabu, 3 Agustus 2016	07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X MIPA 4	-	-	
	07.15 – 08.45	Observasi teman mengajar	Menemani Khusmiati nabila mengajar di X MIPA 1 sekaligus melakukan observasi	-	-	
	08.45 – 11.00	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Melaksanakan presensi pagi ke kelas X-XII			
	11.15 – 12.00 12.00 - 13.15	Praktik mengajar 2 (Terbimbing)	Kelas X MIPA 3 materi pembagian kekuasaan di Indonesia. Di hadir 36 siswa. Ditemani guru pembimbing dan teman satujurusan satu orang.	-	-	
17. Kamis 4 Agustus 2016	13.15-14.00	Diskusi hasil mengajar bersama teman sejawat	Berdiskusi mengenai hasil pengamatan bersama, untuk evaluasi mengajar	-	-	
	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-	

		07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X MIPA 4	Ada beberapa siswa yang tidak membawa buku non-pelajaran	Memberi kebijakan bagi yang muslim membaca Al-Qur'an dan yang lain menyesuaikan
		07.15 – 10.00	Menyiapkan media pembelajaran	Media kertas pertanyaan untuk mengajar beserta menyiapkan isi pertanyaan dan menyelesaikan PPT.	-	-
		10.30 – 12.00	Praktik mengajar 3 (Terbimbing)	Kelas XII IPA 2 materi sikap positive terhadap panca sila sebagai ideologi terbuka. Di hadir 30 siswa. Ditemani guru pembimbing dan teman satujurusan satu orang.	-	-
			Observasi teman mengajar	Kelas XII IPA 3		
18.	Jumat, 5 Agustus 2016	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.00 – 07.15	Kegiatan literasi	Mendampingi literasi siswa X MIPA 4 membaca Al-Quran bagi yang muslim	-	-
		08.00 – 09.30	Praktik mengajar 4 (Terbimbing)	Kelas XII IPA 4 materi sikap positive terhadap panca sila sebagai ideologi terbuka. Di hadir 30 siswa. Ditemani guru pembimbing dan teman satujurusan satu orang.	-	-
		09.45 – 11.15	Observasi teman mengajar	Mememani Khusmiati nabila mengajar di X IPS 1 sekaligus melakukan observasi	-	-
	Sabtu, 6 Agustus 2016	11.15 – 13.15	Observasi teman mengajar	Kelas X IPS 2		
		13.15 – 13.45	Review mengajar oleh guru	Mereview RPP, cara mengajar maulai		

		pembimbing	dari penyampian materi sampai metode yang di gunakan.		
--	--	------------	-------------------------------------------------------	--	--

MINGGU KE-5

19.	Senin, 8 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 08.00	Upacara bendera	Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa kelas X dan XII. Kelas XI melaksanakan tadarus Al-Qur'an. Upacara dipimpin oleh Waka Bagian Sarana Prasarana, Bapak Drs. ACR. Susbandaru.	-	-
		08.00 – 09.30	Piket lobby	Bertugas menjaga ruang piket, mendata siswa yang terlambat dan melaksanakan presensi di kelas X-XII.	-	-
		09.45 – 11.15	Praktik mengajar 5	Mengantarkan mengajar di kelas X MIPA 1 dengan materi kedudukan kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK)	-	-
		11.15 – 12.00 12.30 – 13.15	Praktik mengajar 6	Kelas X MIPA 4 dengan materi kedudukan kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) Di hadir 35 siswa.	-	-
20.	Selasa, 9 Agustus 2016	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X MIPA 4	Ada beberapa siswa yang tidak membawa buku non-pelajaran dan	Memberi kebijakan bagi yang muslim membaca Al-Qur'an dan

		07.15 – 09.15	Koreksi hasil tugas harian	Mengkoreksi tugas harian siswa kelas X.	-	menulis di buku kendali literasi	-	yang lain menyesuaikan	
		09.15 – 12.15	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Mendata siswa yang terlambat. Melaksanakan presensi ke kelas-kelas	-		-		
		12.30 – 14.00	Praktik mengajar 7	Praktik mengajar kelas XII IPS materi sikap positive terhadap panca sila sebagai ideologi terbuka. Di hadiri 37 siswa.	-		-		
		06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-		-		
21.	Rabu, 10 Agustus 2016	07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X IPA 4	-	Ada beberapa siswa yang tidak membawa buku non-pelajaran	-	Memberi kebijakan bagi yang muslim membaca Al-Qur'an dan yang lain menyesuaikan	
		07.15 – 08.45	Observasi teman mengajar	Mememani Khusmiati nabila mengajar di X MIPA 2 sekaligus melakukan observasi	-		-		
		09.00 – 11.15	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Melaksanakan presensi pagi ke kelas X-XII	-		-		
		11.15 – 12.00 12.00 - 13.15	Praktik mengajar 7 (Terbimbing)	Kelas X MIPA 3 materi pembagian kekuasaan di Indonesia. Ditemani guru pembimbing dan teman satujurusan satu orang. Materi pembagian kekuasaan vertikal kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian.	-		-		
22.	Kamis, 11	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan	-		-		

Agustus 2016			warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X MIPA 4	-	-
	07.15 – 10.15	Piket perpustakaan	Melayani peminjaman dan pengembalian buku paket siswa kelas X, XI dan XII		
	10.30 – 12.00	Praktik Mengajar 8	Kelas XII IPA 2 materi BAB 2 sistem pemerintahan dengan sub bab nya bentuk pemerintahan klasik dan modern. Di hadir 30 siswa. diteman teman sejawat satu jurusan satu orang.		
	12.30 -14.00	Mememani Khusmiati nabila mengajar di XII IPA 3 sekaligus melakukan observasi	Mememani Khusmiati nabila mengajar di XII IPA 3 sekaligus melakukan observasi	-	-
23. Jumat, 12 Agustus 2016	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
	07.00 – 07.15	Kegiatan literasi	Mengawasi jam literasi di X MIPA 4	-	-
	07.15 – 08.00	Persiapan mengajar	Menyiapkan media, alat-alat untuk mengajar		
	08.00 – 09.30	Praktik mengajar 9	Kelas XII MIPA 4 materi BAB 2 sistem pemerintahan dengan sub bab bentuk pemerintahan klasik dan modern.		
			Mememani Khusmiati nabila mengajar di X IPS 1 sekaligus melakukan observasi		
Sabtu, 13 Agustus 2016	07.15 – 08.45	Praktik mengajar 10 (1 JP) di kelas XII IPA 1	Mengajar tim dengan nabila di kelas XII IPA 1 setiap mahasiswa mendoatkan 1 JP (45 menit) dengan matei sikap positif		

		08.45 – 09.30 09.45- 10.30	Praktik mengajar 11 di kelas X IPS 2	terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka Praktik mengajar di kelas X IPS 2 dengan materi kedudukan kementerian dan lembaga non kementerian (LPNK)		
MINGGU KE-6						
24.	Senin, 15 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 09.00	Piket lobby	Upacara bendera ditiadakan. Bertugas menjaga ruang piket, mendata siswa yang terlambat dan melaksanakan presensi di kelas X-XII.	-	-
		09.45 – 11.15	Observasi teman mengajar	Menemani Khusmiati nabila mengajar di X MIPA 1 sekaligus melakukan observasi	-	-
		11.15 – 12.00 12.30 – 13.15	Praktik mengajar 11	Kelas X MIPA 4 materi penerapan nilai-nilai pancasila di penyelenggaraan pemerintahan	-	-
25.	Selasa, 16 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 10.15	Piket perpustakaan	Bertugas menjaga ruang perpustakaan, mendata peminjaman buku kelas X-XII.	-	-
		10.30 – 12.30	Membuat RPP kelas X	Membuat RPP kelas X untuk materi BAB 2	-	-
		12.30 – 14.00	Praktik mengajar 12	Praktik mengajar kelas XII IPS materi BAB 2 sistem pemerintahan dengan materi sub bab bentuk pemerintahan klasik dan modern	-	-

		Libur HUT ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia				
26.	Rabu, 17 Agustus 2016					
27.	Kamis, 18 Agustus 2016	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.00 – 07.15	Kegiatan literasi (membaca buku non-pelajaran)	Mengawasi jam literasi di X MIPA 4	-	-
		07.15 – 10.15	Piket perpustakaan	Inventarisasi buku-buku paket serta melayani peminjaman dan pengembalian buku	-	-
		10.30 – 12.00	Menemani Khusmiati nabila mengajar di X MIPA 1 sekaligus melakukan observasi	Menemani Khusmiati nabila mengajar di XII IPA 2 sekaligus melakukan observasi	-	-
28.	Jumat, 19 Agustus 2016	12.30 -14.00	Praktik mengajar 13	Kelas XII IPA 3 mengajar materi berbagai sistem Pemerintahan	-	-
		06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.00 – 07.15	Kegiatan literasi	Mendampingi jam literasi untuk siswa-siswi non muslim bersama mahasiswa PPL dari Univ. Sanata Dharma. Bertempat di Aula sekolah dan diikuti sekitar 50 siswa dari kelas X-XII. Kegiatan yang dilaksanakan adalah doa dan pembacaan Kitab Suci.	-	-
		08.00- 9.30	Menemani teman mengajar	Menemani Khusmiati nabila mengajar di XII IPA 4 sekaligus melakukan observasi		
		09.45 – 11.15	Praktik mengajar 14	Mengajar kelas X IPS 1 materi BAB 2 sub bab wilayah Indonesia		

Sabtu, 20 Agustus 2016	08.45 – 10.30	Menemani teman mengajar	Kelas X IPS 2		
---------------------------	---------------	-------------------------	---------------	--	--

MINGGU KE-7

29. Senin, 22 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-		
			07.15 – 08.00	Upacara bendera	Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa kelas X dan XI. Kelas XII melaksanakan tadarus Al-Qur'an. Upacara dipimpin oleh Waka Bagian Humas, Ibu Sri Moerni, S.Pd.	-	-
			08.00 – 09.30	Piket perpustakaan	Inventarisasi buku-buku paket siswa dan melayani peminjaman buku paket dan kamus siswa kelas X-XII.	-	-
			09.45 – 11.15	Ulangan BAB 1 kelas X	Kelas X MIPA 1.	-	-
30. Selasa, 23 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-		
			07.15 – 09.15	Pemotretan foto seragam	Kegiatan pemotretan siswa-siswi untuk dijadikan model foto seragam SMA Negeri 10 Yogyakarta. Mereka adalah Tito (XII IPA 2), Myrna (XII IPA 2), dan Titian (XII IPA 3). Bertempat di ruang aula SMA Negeri 10 Yogyakarta.	Secara bersamaan, aula juga dipakai untuk praktik olahraga kelas XI IPA 2.	Aula dibagi menjadi 2, sisi sebelah barat untuk pemotretan, dan sisi sebelah timur untuk olahraga.
			09.15 – 12.15	Koreksi ulangan kelas X	Kelas X MIPA 4	-	-
	12.30 – 14.00	Praktik mengajar 14	Mengajar kelas XII IPS materi macam-macam sistem pemerintahan	-	-		
			06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru	-	-
31. Rabu, 24 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi					

				karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
		07.15 – 08.00 & 10.30 – 12.00	Piket lobby	Mendata siswa yang terlambat dan izin, melaksanakan presensi di kelas X-XII, dan mengantarkan tamu sekolah.	-	-
		07.15 – 08.45	Ulangan BAB 1 kelas X	Kelas X MIPA 2	-	-
		08.50 – 11.15	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Melaksanakan presensi pagi ke kelas X-XII	-	-
		11.15 – 13.00	Ulangan BAB 1 kelas X	Kelas X MIPA 2	-	-
		13.15 – 14.00	Diskusi teman sejawat	Diskusi materi kelas XII		
32.	Kamis, 25 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 10.15	Memperiapkan media pembelajaran	Menyiapkan materi dan PPT serta diskusi bersama teman sejawat	-	-
		10.30 – 12.00	Pendampingan Tes Potensi Akademik	Mengawasi Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan berkat kerjasama antara SMA Negeri 10 Yogyakarta dan Lembaga Neutron. Mengawasi jalannya tes di kelas XII IPS. Suasana kelas cukup kondusif.	-	-
		12.30 -14.00	observasi teman mengajar	Menemani Khusmiati nabila mengajar di XII IPA 3 sekaligus melakukan observasi	-	-
	Jum'at, 26 Agustus 2016	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
		07.00 – 07.15	Kegiatan literasi	Mengawasi jam literasi di X MIPA 4		
		07.15 – 08.00	Persiapan mengajar	Menyiapkan media, alat-alat untuk mengajar		

	08.00 – 09.30	Obsevasi teman mengajar	Kelas XII IPA 4		
	09.45 – 11.15	Ulangan kelas X BAB 1	Kelas X IPS 1		
Sabtu, 27 Agustus 2016	12.30 -14.00	Ulangan kelas X BAB 1	Kelas X IPS 2		

MINGGU KE-8

34. Senin, 29 Agustus 2016	07.15 – 08.00	Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 10 Yogyakarta	Upacara dilaksanakan pada hari Kamis, 1 September 2016 bertepatan dengan HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta. Jam upacara dipakai untuk orasi 4 Calon Ketua OSIS SMA Negeri 10 Yogyakarta periode 2016/2017.	-	-
	08.00 – 09.30	Persiapan HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta	Mahasiswa PPL UNY dan Sanata Dharma membuat dan mengelompokkan kupon yang dipakai untuk acara jalan sehat sebanyak 610 buah.	-	-
	09.45 – 11.15	Praktik mengajar 15	Mengajar kelas X MIPA 1 mataeri BAB 2 sub- BAB materi Wilayah NKRI	-	-
	11.15 – 12.00 12.30 – 13.15	Obsevasi teman mengajar	Kelas X MIPA 4	-	-
	13.15- 14.00	Diskusi teman sejawat	Mereview cara mengajar dan diskusi materi mengajar	-	-
35. Selasa, 30 Agustus 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
	07.15 – 09.00	Persiapan HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta	Membungkus beras yang akan digunakan untuk kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT ke-64 SMA Negeri 10 Yogyakarta. Masing-masing bungkus berisi 2kg beras.	-	-
	09.00 – 12.30	Koreksi lembar ulangan kelas X	Kelas X MIPA 3, IPS 1, IPS 2	-	-
	12.45 – 14.00	Obsevasi teman mengajar	Kelas X II IPS	-	-

36.	Rabu, 31 Agustus 2016	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
		07.15 – 08.45	Praktik mengajar 16	Kelas X MIPA 2 materi BAB 2 sub-BAB wilayah NKRI	-	-
37.	Kamis, 1 September 2016	08.45– 12.00	Persiapan HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta	Membungkus sembako yang akan digunakan dalam kegiatan bakti sosial HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta. Sembako yang dibungkus berupa 2 kg beras, 2 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Total paket sembako sebanyak 69 paket	Target paket sembako yang akan disumbangkan sebanyak 100 paket, sehingga masih terdapat kekurangan 31 paket	Pihak sekolah menutup kekurangan dengan membeli 62 kg beras, 12 kg gula pasir, dan 45 liter minyak goreng di toko sembako utara sekolah
		12.30 – 14.00	Observasi teman mengajar	Menemani Khusmiati nabila mengajar di X MIPA 4 sekaligus melakukan observasi	-	-
		07.15 – 08.45	HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta	Upacara dipimpin langsung oleh Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta, Bapak Drs. Basuki dan dihadiri oleh Ketua Komite SMA Negeri 10 Yogyakarta Bapak Drs. Timbul Mulyono, M.Pd. Di sela-sela kegiatan upacara, dilaksanakan Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Pengurus OSIS dan MPK SMA Negeri 10 Yogyakarta. Ketua OSIS SMA Negeri 10 Yogyakarta periode 2016/2017 adalah Cherry (XI IPA 4) dan Ketua MPK SMA Negeri 10 Yogyakarta periode 2016/2017 adalah Santia (XI IPA 4). Selain pelantikan	-	-

			OSIS, dilaksanakan penyerahan Hymne SMA Negeri 10 Yogyakarta dari Qantaza (XI IPS) ke pihak sekolah dan penyerahan hadiah juara kelas.		
	08.45 – 10.30	HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta	Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat. Rute mulai dari SMA Negeri 10 Yogyakarta menuju Jl. Pajeksan Kidul, Jl. Bhayangkara, Jl. Kemetiran, Jl. Letjen Soeprapto (Ngampilan), menuju Jl. KS. Tubun (Polsek Patuk) dan finish kembali ke SMA Negeri 10 Yogyakarta.	-	-
	10.30 – 11.00	HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta	Membantu Sie. Konsumsi menjaga stand makanan. Setiap peserta HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta harus menyerahkan kupon yang akan ditukarkan dengan makanan dan minuman.	-	-
	11.00 – 13.00	HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta	Membantu dokumentasi acara lomba vocal group dalam rangka HUT Ke-64 SMA Negeri 10 Yogyakarta. Peserta merupakan perwakilan masing-masing kelas, membawakan lagu wajib Dir-ilir dan Y ok Prakanca (Padhang Bulan) serta satu lagu pilihan bebas.	-	-
	13.00 – 14.15	HUT SMA Negeri 10 Yogyakarta	Dokumentasi acara <i>Flashmob</i> siswa SMA Negeri 10 Yogyakarta	-	-
38.	06.30 – 07.00	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	-	-
	07.00 – 08.00	Diskusi teman sejawat	Mendiskusikan materi ajar dan pembuatan laporan PPL	-	-
	08.00 – 09.30	Observasi teman mengajar	Kelas XII IPA 4	-	-
	09.45- 11.15	Praktik mengajar 17	Kelas X IPS 1 materi BAB 2 sub-BAB	-	-

				wilayah NKRI		
39.	Sabtu, 3 September 2016	07.15 – 08.45	Praktik Mengajar 18	Praktik mengajar di kelas XII IPA Materi perbandingan sistem pemerintahan beberapa negara dan sistem pemerintahan Indonesia	-	-
		08.45-09.30 09.45- 10.30	Observasi teman mengajar	Di kelas X IPS 2	-	-

MINGGU KE-9

40.	Senin, 5 September 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
		07.15 – 08.00	Upacara bendera	Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa kelas X dan XII. Kelas XI melaksanakan tadarus Al-Qur'an. Upacara dipimpin oleh Waka Bagian Sarana Prasarana, Bapak Drs. ACR. Susbandaru.	Kisi-kisi penilaian (<i>wirasa</i> , <i>wicara</i> , <i>wirama</i> , <i>wiraga</i> dengan skor masing- masing 25 poin) baru diberikan di akhir paruh jam pelajaran	Membuat kisi-kisi penilaian mandiri (artikulasi, intonasi, kelancaran) dengan skor total maksimal 10
		08.00 – 09.30	Piket lobby	Bertugas menjaga ruang piket, mendata siswa yang terlambat dan melaksanakan presensi di kelas X-XII.		
		09.45 – 11.15	Observasi teman mengajar	Kelas X MIPA 1		
		11.15 – 12.00 12.30 – 13.15	Praktik mengajar 19	Kelas X MIPA 4 dengan BAB 2 sub-BAB materi kedudukan penduduk dan warganegara		
		13.15 – 14.00	Diskusi teman sejawat	Diskusi pembuatan soal UTS kelas X		
41.	Selasa, 6 September	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru		

2016			karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.15 – 09.15	Koreksi hasil tugas harian	Mengoreksi tugas harian siswa kelas XII	-	-
	09.15 – 12.15	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Mendata siswa yang terlambat. Melaksanakan presensi ke kelas-kelas	Mesin fotokopi di sekolah masih dalam perbaikan	Fotokopi di luar sekolah (di Jl. Nyi Ahmad Dahlan)
	12.30 - 14.00	Praktik mengajar 20	Di XII IPS materi perbandingan sistem pemerintahan Indonesia		
42.	Rabu, 7 September 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	
		07.15 – 08.45	Observasi teman mengajar	Menemani Khusmiati nabila mengajar di X MIPA 2 sekaligus melakukan observasi	-
		08.50 – 11.10	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Melaksanakan presensi pagi ke kelas X-XII	-
		11.15 – 12.00	Praktik mengajar 21	Kelas X MIPA 3 materi kedudukan penduduk dan warga negara	
		12.00 - 13.15			
		13.15 – 14.00	diskusi teman sejawat	Diskusi soal UTS kelas X	
43.	Kamis, 8 September 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah	
		07.15 – 08.45	Praktik mengajar 22	Mengantarkan guru mengajar dikelas XI IPS	
		08.45 – 10.30	Memperiapkan mengajar di kelas XII	Menyiapkan materi ajar	
		10.30 – 12.00	Praktik mengajar 23	Dikelas XII IPA 2 dengan materi sistem pemerintahan Indonesia	
		12.30 – 14.00	Praktik mengajar 24	Dikelas XII IPA 3 dengan materi sistem pemerintahan Indonesia	
	Jum'at, 9 september	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru	

2016			karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.15 – 09.45	pembuatan soal ulangan kelas XII baba 2	Membuat soal essay		
	09.45 – 11.15	Praktik mengajar 25	Dikelas XII IPA 4 dengan materi sistem pemerintahan Indonesia		
Sabtu , 10 September 2016	07.15 – 08.45	Ulangan kelas XII BAB2	Kelas XII IPA 1		
	08.45 – 09.30 09.45- 10.30	Observasi teman mengajar	Kelas X IPS 2		

MINGGU KE - 10

Senin , 12 September 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.15 – 10.30	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Melaksanakan presensi pagi ke kelas X-XII		
	11.00 – 12.30	Membuat laporan PPL	Menyusun Lempira dan catatan mingguan untuk laporan PPL		
	12.30 -14.00	Membantu bagian humas	Menyiapkan materi seminar sekolah		
Selasa, 13 September	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.15 – 10.30	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Melaksanakan presensi pagi ke kelas X-XII		
	11.00 – 12.00	Membuat laporan PPL	Menyusun Lempira dan catatan mingguan untuk laporan PPL		
	12.30 – 14.00	Ulangan harian kelas XII BAB 2	Kelas XII IPS		
Rabu , 14 september	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.15 – 10.30	Piket lobby	Menjaga ruang piket. Melaksanakan presensi pagi ke kelas X-XII		
	11.00 – 12.30	Membuat laporan PPL	Menyusun Lempira dan catatan mingguan untuk laporan PPL		

	12.30 – 13.00	Mengambil kenang-kenangan di jalan senopati	10 frame batik		
Kamis, 15 september 2016	06.30 – 07.15	Kegiatan Salam Pagi	Bersalaman dan menyambut kedatangan warga sekolah, baik siswa maupun guru karyawan. Bertempat di lobby depan sekolah		
	07.15 – 10.00	Persiapan penarikan	Menyiapkan ruangan, dan menyusun acara		
	10.00 – 10.30	Penarikan PPL UNY	Dihadiri DPL Univ dan perwakilan dari pihak SMA N 10 Yogyakarta waka kurikulum. Dengan 17 mahasiswa PPL UNY		
	10.30 – 12.00	Ulangan harian kelas XII BAB 2	Kelas XII IPA 2		
	12.30 – 14.00	Ulangan harian kelas XII BAB 2	Kelas XII IPA 3		

Koordinator PPL
SMA Negeri 10 Yogyakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan,

Guru Pembimbing Lapangan,

Mahasiswa Praktikan,

Agus Mardiyono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19690530 199802 1 001

Eny Kusdarini, M.Hum
NIP. 19580314 198503 2 001

Aspiyah, S.Pd
NIP. 19710110 199702 2 004

Ririn Wulandari
NIM. 13204241041



LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN: 2016
Universitas Negeri Yogyakarta

F 03
Untuk Mahasiswa

NAMA SEKOLAH : SMA N 10 Yogyakarta

ALAMAT SEOLAH : Jl. Gadean No. 5, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta 55122

No.	Nama Kegiatan	Hasil Kuantitatif/ Kualitatif	Serapan Dana (Dalam Rupiah)				Jumlah
			Swadaya/ Sekolah/ Lembaga	Mahasiswa	Penda Kota	Sponsor/ Lembaga lainnya	
1.	Mengajar Kelas X	Fotokopi materi		Rp.53.000,-			Rp53.000,-
2.	Mengajar Kelas XII	Fotokopi teks materi		Rp.24.300,-			Rp.24.300,-
3.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Mencetak RPP		Rp.32.000,-			Rp32.000,-
4.	Soal ulangan harian dan kisi-kisi	1. Mencetak soal ulangan harian I kelas X 2. Mencetak soal ulangan harian I kelas XII 3. Mecetak kisi-kisi soal ulangan harian 1 kelas X & kelas XII		1. Rp.30.600 2. Rp.25.000 3. Rp.1.500			Rp.57.100,-
5.	Pembuatan Laporan	Laporan pelaksanaan PPL selesai dibuat		Rp.150.000			Rp.150.000,-
JUMLAH TOTAL							Rp.316.400,-

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pembimbing Lapangan

Mahasiswa PPL

Yogyakarta, September 2016

Drs. Basuki
NIP. 19591012 198903 1 006

Eny Kusdarini, M.Hum
NIP. 19600304 198601 2 001

Aspiyah, S.Pd.
NIP. 19710813 200502 2 003

Ririn Wulandari
NIM 13401241051



KARTU BIMBINGAN PPL/MAGANG III DI SEKOLAH/ LEMBAGA
PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY
TAHUN 2016.

F04
UNTUK MAHASISWA

Nama Sekolah/ Lembaga : SMA Negeri 10 Yogyakarta
 Alamat Sekolah/ Lembaga : Jalan Gadeq No. 05
 Nama DPL PPL/ Magang III : Eny Kusdarini M. Hum
 Prodi / Fakultas DPL PPL/ Magang III : Pendidikan / FIS
 Jumlah Mahasiswa PPL/ Magang III : 2 Mahasiswa

No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PPL/ Magang III
1	25 Juli 2016	2	penyusunan kpp		
2	19 Agustus 2016	2	pelaksanaan Pembelajaran		
3	2 September 2016	2	Evaluasi Pembelajaran		
4	15 September 2016	2	lap. PPL		

PERHATIAN :
 • Kartu bimbingan PPL ini dibawa oleh mhs PPL Magang III (1 kartu untuk 1 prodi)
 • Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini harap diisi materi bimbingan dan dimintakan tanda tangan dari DPL PPL/ Magang III setiap kali bimbingan di lokasi.
 • Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PPL/ Magang III untuk keperluan administrasi.

... 15. September 2016
 Mhs PPL/ Magang III Prodi :

 Rinin Wulandari
 13901291051





KALENDER PENDIDIKAN SMA N 10 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

JULI 2016

AHAD	3	10	17	24	31
SENIN	4	11	18	25	
SELASA	5	12	19	26	
RABU	6	13	20	27	
KAMIS	7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	2	9	16	23	30

AGUSTUS 2016

	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

SEPTEMBER 2016

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		

NOVEMBER 2016

AHAD	6	13	20	27	
SENIN	7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	
JUM'AT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

DESEMBER 2016

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	

JANUARI 2017

1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

MARET 2017

AHAD	5	12	19	26	
SENIN	6	13	20	27	
SELASA	7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

APRIL 2017

	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
1	7	14	21	28	
	8	15	22	29	

MEI 2017

	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

JULI 2017

AHAD	2	9	16	23	30
SENIN	3	10	17	24	31
SELASA	4	11	18	25	
RABU	5	12	19	26	
KAMIS	6	13	20	27	
JUM'AT	7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29

- PAS/PAT
- Porsenitas/Social Worker
- Penerimaan LHPP
- Hardiknas
- Libur Umum

- Hari-hari Pertama Masuk Sekolah
- Libur Ramadhan (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)
- Libur Idul Fitri (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)
- Libur Khusus (Hari Guru Nasional)
- Libur Semester



OKTOBER 2016

2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
8	15	22	29	

FEBRUARI 2017

5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	

JUNI 2017

4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	

Ujian Sekolah SMA (Utama)

Ujian Sekolah SMA (Susulan)

Ujian Sekolah SMA (Mapel Lainnye)



Pakaian Dinas Tradisional

HUT Pemerintah Daerah



SILABUS KURIKULUM 2013

Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester : X
Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	IPK	Proses Pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber Belajar
<p>KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</p> <p>KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam</p>	<p>3.1 Nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia Mampu mendeskripsikan macam-macam pembagian kekuasaan 	<p>Mengamati</p> <p>Siswa mengamati gambar tokoh pencetus pembagian kekuasaan yang ditampilkan oleh guru terkait dengan materi</p> <p>Menanya</p> <p>Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. atau</p>	<p>Teknik Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tes tertulis Tes Lisan Performa nce test Penugasan <p>Sikap</p> <p>Instrument penilaian:</p>	<p>2 X 45 Menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa n Kelas X, Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2016 Buku -buku yang relevan Video Youtube tentang materi. Internet dengan artikel-artiel yang sesuai dengan amteri UUU 1945

<p>menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p> <p>KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 	<p>departemen...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu menjelaskan nilai pancasila yang ada dalam penyelenggaraan neagra. - Mampu menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 	<p>bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.</p> <p><u>Mengeksplorasi</u></p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi melalui diskusi berpasangan dengan menggunakan berbagai sumber belajar</p> <p>- Menalar/mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membuat 		<p>2 X 45 Menit</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	--

<p>m memecahkan masalah.</p> <p>KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan</p>				<p>analisis konsep pembagian kekuasaan dari John Locke dan Montesquieu</p> <p><u>Mengomunikasikan</u></p> <p>ii</p> <p>Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan.</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>3.2 Menganalisis Ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. • kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - mampu mendiskripsikan Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. - mampu menganalisis Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. - mampu menjelaskan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. - mampu menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 	<p>Mengamati</p> <p>Siswa mengamati gambar tokoh pencetus pembagian kekuasaan yang ditampilkan oleh guru terkait dengan materi</p> <p>Menanya</p> <p>Guru memberikan kesempatan dan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga</p>	<p>Teknik Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis - Tes Lisan - Performance test - Penugasan - Sikap <p>Instrument penilaian:</p>	<p>2 X 45 Menit</p> <p>2 X 45 Menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X, Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2016 • Buku -buku yang relevan • Video Youtube tentang materi. • Internet dengan artikel-artiel yang sesuai dengan amteri • UUD 1945
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> • kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - mampu menjelaskan kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. 	<p>terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.</p> <p><u>Mengeksplorasi</u></p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi melalui diskusi berpasangan dengan menggunakan berbagai sumber belajar</p> <p>- Menalar/mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membuat analisis konsep pembagian kekuasaan dari John Locke 		2 X 45 Menit	
		<ul style="list-style-type: none"> • sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - mampu menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. 			2 X 45 Menit	

				dan Montesquieu			
				Mengomunikasikan Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan.			
				Mengamati Siswa mengamati gambar tokoh pencetus pembagian kekuasaan yang ditampilkan oleh guru terkait dengan materi	Teknik Penilaian: - Tes tertulis - Tes Lisan - Performa - Penugasan	2 X 45 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X, Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016 Buku-buku yang relevan
	3.3 Menganalisis kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Suprastruktur Sistem Politik Indonesia. Lembaga-Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mendiskripsikan Suprastruktur Sistem Politik Indonesia Mampu menganalisis Suprastruktur Sistem Politik Indonesia Mampu menganalisis 				

		<ul style="list-style-type: none"> • Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga- Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945. 	<p><u>Menanya</u></p> <p>Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.</p> <p><u>Mengeksplorasi</u></p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi melalui diskusi berpasangan dengan</p>	Instrument penilaian:	2 X 45 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Video Youtube tentang materi. • Internet dengan artikel-artiel yang sesuai dengan amteri UUD 1945
		<ul style="list-style-type: none"> • Impeachment dalam Ketatanegaraan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menjelaskan Impeachment dalam Ketatanegaraan RI. 			2 X 45 Menit	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menjelaskan 			2 X 45 Menit	

		<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik RI. 	<p>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.</p> <p>- Mampu menganalisis ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.</p> <p>- Mampu mendiskripsikan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik RI</p> <p>Mampu menganalisis Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik RI</p>	<p>menggunakan berbagai sumber belajar</p> <p>- Menalar/mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Peserta didik membuat analisis konsep pembagian kekuasaan dari John Locke dan Montesquieu <p><u>Mengomunikasikan</u></p> <p>1</p> <p>Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok lain boleh</p>			<p>2 X 45 Menit</p>	

	<p>3.4 Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mendiskripsikan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. - menganalisis Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 	<p>mengajukan pertanyaan.</p> <p>Mengamati</p> <p>Siswa mengamati gambar tokoh pencetus pembagian kekuasaan yang ditampilkan oleh guru terkait dengan materi</p> <p>Menanya</p> <p>Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga</p>	<p>Teknik Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis - Tes Lisan - Performa nce test - Penugasan - Sikap <p>Instrument penilaian:</p>	<p>2 X 45 Menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X, Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016 • Buku -buku yang relevan • Video Youtube tentang materi. • Internet dengan artikel-artiel yang sesuai dengan amteri • UUD 1945
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - mampu menjelaskan Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah. 	<p>terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.</p> <p><u>Mengeksplorasi</u></p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi melalui diskusi berpasangan dengan menggunakan berbagai sumber belajar</p> <p>- Menalar/mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membuat analisis konsep pembagian kekuasaan dari John Locke 		<p>2 X 45 Menit</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. 	<p>Mampu menganalisis Menunjukkan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat</p>		<p>2 X 45 Menit</p>			

			dan Daerah.	dan Montesquieu			
				<p>Mengomunikasikan</p> <p>Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan.</p>			
	3.5 Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> • Kebhinnekaan Bangsa Indonesia. • Konsep 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menjelaskan Kebhinnekaan Bangsa Indonesia. - Mampu menganalisis Kebhinnekaan Bangsa Indonesia. - Mampu menjelaskan 	<p>Mengamati</p> <p>Siswa mengamati gambar tokoh pencetus pembagian kekuasaan yang ditampilkan oleh guru terkait dengan materi</p>	<p>Teknik Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis - Tes Lisan - Performa - Penugasan - Sikap 	2 X 45 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X, Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016 • Buku -buku yang relevan

		<p>Integrasi Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional. 	<p>Konsep Integrasi Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu menganalisis Konsep Integrasi Nasional. - Mampu menjelaskan berbagai Faktor Pembentuk Integrasi Nasional. - Mampu menganalisis Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional. 	<p><u>Menanya</u> Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik. <u>Mengeksplorasi</u> Peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi melalui diskusi berpasangan dengan</p>	<p>Instrument penilaian:</p>	<p>2 X 45 Menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Video Youtube tentang materi. • Internet dengan artikel-artikel yang sesuai dengan amteri • UUD 1945
	<p>Integrasi Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. 	<p>Konsep Integrasi Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mendeskripsikan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. - Mampu menganalisis tantangan 	<p>2 X 45 Menit</p>				

		<ul style="list-style-type: none"> • peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 	<p>dalam menjaga keutuhan NKRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mendiskripsikan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa - Mampu menganalisis peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 	<p>menggunakan berbagai sumber belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menalar/mengasosiasi <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membuat analisis konsep pembagian kekuasaan dari John Locke dan Montesquieu <p><u>Mengomunikasika</u></p> <p>11</p> <p>Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok lain boleh</p>		<p>2 X 45 Menit</p>	

	<p>3.6 Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, social, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ancaman terhadap integrasi nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menjelaskan berbagai ancaman terhadap integrasi nasional - Mampu menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional - Mampu menjelaskan bahaya ancaman di Bidang poleksosbudhhan kam - Mampu menganalisis ancaman di Bidang poleksosbudhhan kam • peran Serta Masyarakat dalam mengatasi berbagaiancaman dalam membangun 	<p>mengajukan pertanyaan.</p> <p>Mengamati</p> <p>Siswa mengamati gambar tokoh pencetus pembagian kekuasaan yang ditampilkan oleh guru terkait dengan materi</p> <p>Menanya</p> <p>Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga</p>	<p>Teknik Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis - Tes Lisan - Performa nce test - Penugasan - Sikap <p>Instrument penilaian:</p>	<p>2 X 45 Menit</p> <p>2 X 45 Menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegararaan Kelas X, Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2016 • Buku -buku yang relevan • Video Youtube tentang materi. • Internet dengan artikel-artiel yang sesuai dengan amteri • UUD 1945
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			integritas nasional	Masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional - Mampu menganalisis peran Serta Masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional	terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik. <u>Mengeksplorasi</u> Peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi melalui diskusi berpasangan dengan menggunakan berbagai sumber belajar		
					<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membuat analisis konsep pembagian kekuasaan dari John Locke 		

				dan Montesquieu			
				Mengomunikasikan Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan.			
	3.7 Arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Wawasan Nusantara. Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara. 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menguraikan mengenai Wawasan Nusantara. Mampu menganalisis mengenai Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara. Mampu menjelaskan Fungsi dan Tujuan 	Mengamati Siswa mengamati gambar tokoh pencetus pembagian kekuasaan yang ditampilkan oleh guru terkait dengan materi	Teknik Penilaian: <ul style="list-style-type: none"> Tes tertulis Tes Lisan Performan Penugasan Sikap 	2 X 45 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X, Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016 Buku -buku yang relevan

		<ul style="list-style-type: none"> Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. 	<p>Wawasan Nusantara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mampu menganalisis Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. Mampu menjelaskan Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. 	<p><u>Menanya</u></p> <p>Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.</p> <p><u>Mengeksplorasi</u></p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi melalui diskusi berpasangan dengan</p>	<p>Instrument penilaian:</p>	<p>2 X 45 Menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Video Youtube tentang materi. Internet dengan artikel-artiel yang sesuai dengan amteri UUD 1945
		<ul style="list-style-type: none"> Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan. 	<p>Wawasan Nusantara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mampu menganalisis Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan. Mampu mejelaskan berbagai Peran Serta Warga Negara Mendukung 	<p><u>Menanya</u></p> <p>Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.</p> <p><u>Mengeksplorasi</u></p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi melalui diskusi berpasangan dengan</p>	<p>Instrument penilaian:</p>	<p>2 X 45 Menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Video Youtube tentang materi. Internet dengan artikel-artiel yang sesuai dengan amteri UUD 1945

			Implementasi Wawasan Kebangsaan.	<p>menggunakan berbagai sumber belajar</p> <p>- Menalar/mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membuat analisis konsep pembagian kekuasaan dari John Locke dan Montesquieu <p><u>Mengomunikasikan</u></p> <p>2</p> <p>Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok lain boleh</p>			

				mengajukan pertanyaan.			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

Mengetahui
Kepala SMAN 10 Yk

Yogyakarta,
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki

NIP. 19591012 198903 1 006

NIP.

.....

SILABUS PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : XII
Semester : Ganjil
Program Studi : IPA/IPS
Standar Kompetensi : 1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Alokasi waktu : 6 x 45 menit

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka	Pancasila sebagai ideologi terbuka <ul style="list-style-type: none"> ○ Makna ideologi negara ○ Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ○ Fungsi pokok Pancasila ○ Pancasila sebagai ideologi terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, • Demokratis, rasa ingin tahu, senang bekerjasama, cinta tanah air, menghargai prestasi, • Bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri (keteguhan hati, optimis), • Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik), • Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin) • Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji dari berbagai sumber (buku, nara sumber dsb.) tentang proses perumusan Pancasila sejak sidang BPUPKI sampai dengan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 • Menguraikan fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara • Membandingkan ideologi terbuka dan ideologi tertutup 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan makna ideologi negara • Mengemukakan an proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara • Menguraikan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Non tes: Performan ce tes (tugas kelompok/ individu) • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) • Presentasi 	4 X 45	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Reno Lisiyarti • Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, amandemen I, II, III dan IV, Bandung: Citra Umbara

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.2. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan</p>	<p>Nilai-nilai Pancasila <ul style="list-style-type: none"> ○ Pancasila sebagai sumber nilai ○ Pancasila sebagai paradigma pembangunan </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri (kepercayaan hati, optimis). • Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, berkead, enerjik). • Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin) • Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiskusi hasil penggalan informasi makna Pancasila sebagai ideologi terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan Pancasila sebagai sumber nilai. • Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. • Berdiskusi hasil kajian tentang Pancasila sebagai sumber nilai dan sebagai paradigma pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Non tes: Performan ce tes (tugas kelompok/ individu) • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) • Presentasi 	<p>2 X 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Remo Lisiyarti • UUD 1945 • Buku-buku sumber yang relevan • Buku pelajaran

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka</p>	<p>o Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila</p> <p>o Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri (kegugahan hati, optimis). • Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik). • Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin) • Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi berita di media elektronik (TV, internet dsb.) dan artikel dari media cetak (buku, koran, majalah dsb) sehingga dapat menunjukkan perilaku positif terhadap Pancasila • Mengamati perilaku masyarakat lingkungannya yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka (contoh: berani mengemukakan pendapat/demonstrasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan contoh sikap dan perilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila • Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. 	<p>o Non tes: Performa nce tes (tugas kelompok / individu)</p> <p>o Tes tertulis (Uratan, pilihan ganda, bentuk lainnya)</p> <p>o Presentasi</p>	<p>2 X 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Kewargan egaran Esis Kelas XII, karangan Dra. Remo Lisyarti • Mustata Kamal Pasha, B. Ed. (2002) Pendidikan Kewargan egaran (Civic Education), Yogyakarta: Citra Karasa Mandiri. • Media cetak dan media elatronik • Buku-

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
								buku sumber yang relevan <ul style="list-style-type: none"> • Buku pelajaran/ paket lainnya.

SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : XII
Semester : 1
Program Studi : IPA/PPS
Standar Kompetensi : 2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Alokasi waktu : 10 X 45 menit

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara	Sistem pemerintahan • Pengertian Sistem pemerintahan • Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer • Ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer dan Presidensial	• Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab	• Percaya diri (keteguhan hati, optimis). • Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik). • Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin) • Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan)	• Mengkaji berbagai literatur tentang sistem pemerintahan • Mengidentifikasi negara-negara yang menganut sistem Presidensial dan Parlementer • Mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer • Menguraikan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer • Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer	• Mendeskripsikan pengertian system pemerintahan • Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di berbagai Negara	○ Non tes: Performa nce tes (tugas kelompok k/ individu) ○ Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) ○ Presentasi	4 X 45	• Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Lisiyarti • Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim (1993) Pengantar Hukum Tata Negara RI. FHUI. • Undang-undang-Dasar Republik Indonesia tahun 1945, perubahan I, II, III dan IV

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>2.2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia</p>	<p>sistem pemerintahan Negara Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> o System pemerintahan menurut UUD 1945 awal kemerdekaan o Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 setelah adanya perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, berakhlak, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri (kegubahan hati, optimis). • Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik). • Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin) • Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan) 	<p>menganut sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji UUD 1945, dapat menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 pada awal kemerdekaan • Mengidentifikasi sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia menurut UUD 1945. • Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dengan sesudah perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Non tes: Perform ance tes (tugas kelompok k/ individu) • Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) • Presentasi 	<p>2 X 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Kewargamegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Lisiyarti • Jimly Ashieddiegy Sistem pemerintahan di Indonesia, makalah pembuktian temu wicara guru Pkn Provinsi DKI dengan Mahkamah Konstitusi, 2005 • Buku- buku yang relevan

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain</p>	<p>Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia ○ Kelenahan sistem pemerintahan Indonesia ○ Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri (kegubahan hati, optimis). • Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, berkead, enerjik). • Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin) • Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji berbagai buku, media cetak dan elektronik mengenai kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI • Menanyakan kepada pejabat pemerintah di lingkunganya tentang kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan negara RI • Berdiskusi hasil kajian dan temuan di lapangan tentang Identifikasi sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan negara lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia • membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Non tes: Performa nce tes (tugas kelompok k/ individu) ○ Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) ○ Presentasi 	<p>2 X 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku pelajaran • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Listiyarti • Jimmy Ashieddiegy Sistem pemerintahan di Indonesia, makalah pembuatan temu wicara guru Pkn Provinsi DKI dengan Mahkamah Konstitusi, 2005 • Buku- buku yang relevan • Buku pelajaran

**Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran**

**Aspiyah, S.Pd
NIP. 19640718 198803 1 007**

**Yogyakarta, Juli 2016
Mahasiswa**

**Kusmiyati Nabilah Lestari
NIM.13401241041**

PERHITUNGAN MINGGU/ JUMLAH JAM EFEKTIF

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Satuan Pendidikan : SMA
 Kelas/Program : X/IPA-IPS
 Semester : Ganjil
 Tahun Ajaran : 2016/2017

Jumlah jam pembelajaran setiap kelas: 2 jam pembelajaran/minggu

HARI	SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUM'AT		SABTU	
KELAS	X MIPA 1	X MIPA 4			X MIPA 2,3				X IPS 1		X IPS 2	
JML JP	2	2			4				2		2	

No	Bulan	Jumlah Minggu Dalam Semester	Jumlah Minggu Tidak Efektif	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Hari Efektif
1.	Juli	4	2	2	10
2.	Agustus	5	0	5	25
3.	September	4	0	3	12
4.	Oktober	4	1	4	20
5.	Nopember	5	0	5	25
6.	Desember	4	4	0	0
Jumlah		26	7	19	92

Jumlah minggu efektif : 19 minggu
 Jumlah jam pelajaran efektif : 38 jam pembelajaran

Perhitungan Alokasi Waktu:

Kls/ Sm	Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar	Jam Pembelajaran
X/I	<p>KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</p> <p>KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p> <p>KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p> <p>KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.</p> <p>KD 3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>Kegiatan : <u>Tatap Muka :</u> Mengamati: Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik) nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>Menanya: Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p>	<p>2X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p>

	<p>Mengumpulkan data: Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi) dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>Mengasosiasikan: Menghubungkan Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>Mengkomunikasikan: Menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p><u>Tugas Terstruktur :</u> Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p><u>Kegiatan Mandiri :</u> Menilai kegiatan pengamatan dan Tanya jawab dengan narasumber berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>KD 4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>Kegiatan kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan ○ Membuat laporan hasil pengamatan ○ Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas. <p>Penilaian-1</p> <p>KD 3.2 Mengkategorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>	<p>2X45'</p> <p>4X45'</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

<p>Tatap muka: Mengamati: Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau melakukan kajian konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>Menayanya : Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>Mengumpulkan data: Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>Mengasosiasikan Mencari hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga dapat diketahui benang merahnya (substansinya).</p> <p>Mengkomunikasikan Menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>KD : 4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p> <p><u>Kegiatan kelompok :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan • Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan • Membuat laporan hasil pengamatan • Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas 	2X45’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

<p><u>Kegiatan Mandiri :</u> Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan narasumber berkaitan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>Penilaian-2</p> <p>KD 3.3 Mensintesis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Kegiatan : <u>Tatap Muka :</u> Mengamati Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara.</p> <p>Menanya Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara.</p> <p>Mengumpulkan data Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan penuh disiplin dan tanggung jawab tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Mengasosiasikan Mencari hubungan antar lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945.</p> <p>Mengkomunikasikan Menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>KD 4.3 Menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p><u>Kegiatan Mandiri :</u> Menggali informasi tentang hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945.</p>	<p>2X45'</p> <p>4X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

	<p>Penilaian-3</p> <p>KD 3.4 Mengkreasikan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Kegiatan : <u>TatapMuka :</u></p> <p>Mengamati Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah.</p> <p>Menanya Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara pro-aktif dan responsif dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah.</p> <p>Mengumpulkan data Mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan elektronik secara pro aktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah.</p> <p>Mengasosiasikan Mencari hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945.</p> <p>Mengkomunikasikan Menganalisis, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis data dan hasil proyek Kewarganegaraan secara pro aktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah.</p> <p>KD 4.4 Menyaji hasil penalaran tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p><u>TugasTerstruktur :</u> Mendiskusikan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah dalam mengembangkan otonomi daerah.</p> <p>Penilaian-4</p>	<p>2X45'</p> <p>4X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

	Penilaian Susulan ULANGAN SEMESTER	2X45'
	JUMLAH	38 Jam

Mengetahui
Kepala SMAN 10 Yk

Yogyakarta,
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP. 19591012 198903 1 006

Aspiyah, S.Pd
NIP. 19710813 200502 2 003

PERHITUNGAN MINGGU/ JUMLAH JAM EFEKTIF

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Satuan Pendidikan : SMA
 Kelas/Program : X/IPA-IPS
 Semester : Genap
 Tahun Ajaran : 2016/2017

Jumlah jam pembelajaran setiap kelas: 2 jam pembelajaran/minggu

HA RI	SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUM'AT		SABTU	
KE LAS	X MIPA 1	X MIPA 4			X MIPA 2,3				X IPS 1		X IPS 2	
JML JP	2	2			4				2		2	

No	Bulan	Jumlah Minggu Dalam semester	Jumlah minggu tidak efektif	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Hari efektif
1.	Januari	4	0	4	20
2.	Februari	4	0	4	20
3.	Maret	5	2	3	12
4.	April	4	1	3	13
5.	Mei	5	0	5	21
6.	Juni	4	4	0	0
Jumlah		26	6	19	86

Jumlah minggu efektif : 19 minggu
 Jumlah jam pelajaran efektif : 38 jam pembelajaran

Perhitungan Alokasi Waktu:

No	SK/KD/Kegiatan	Jam Pembelajaran
	<p> KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. </p> <p> KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. </p> <p> KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. </p> <p> KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. </p> <p> KD 3.5 Mendukung nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. </p> <p> Kegiatan: <u>TatapMuka :</u> Mengamati Mengamati gambar tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik) tentang Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. </p> <p> Menanya Mengidentifikasi dan bertanya mendalam/ dialektis secara damai dan toleran dengan menggunakan high- order-thinking skills (HOTS) tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. </p> <p> Mengumpulkan data Mengumpulkan informasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, menga-nalisis dan menyimpul-kan hasil analisis/diskusi kelompok tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. </p> <p> Mengasosiasikan Mencari bentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. </p>	<p>2X45'</p> <p>4X45'</p> <p>2X45'</p>

<p>Mengkomunikasikan Mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok melalui debat pro kontra tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional.</p>	
<p>KD 4.5 Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p>	2X45'
<p><u>Tugas Terstruktur :</u> Menggali informasi dari berbagai sumber tentang integrasi nasional.</p>	
<p>Penilaian-1</p>	2X45'
<p>KD 3.6 Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p>	4X45'
<p><u>Kegiatan :</u> <u>Tatap Muka :</u> Mengamati Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p>	
<p>Menanya Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p>	2X45'
<p>Mengumpulkan data Mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan menganalisis secara bekerjasama dan bergotong tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p>	
<p>Mengasosiasikan Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p>	2X45'
<p>Mengkomunikasikan Mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok dan proyek kewarganegaraan secara bekerjasama dan bergotong royong tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p>	
<p>KD 4.6 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,</p>	2X45'

<p>dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p><u>KegiatanMandiri :</u> Mencari informasi dari berbagai sumber tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>Penilaian-2</p> <p>KD 3.7 Mengkarakteristikkan arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><u>Kegiatan :</u> <u>Tatap Muka :</u> Mengamati Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, dan media cetak maupun elektronik tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara.</p> <p>Menanya Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara.</p> <p>Mengumpulkan data Mengumpulkan informasi, dan menganalisis tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara.</p> <p>Mengasosiasikan Menghubungkan pentingnya wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>Mengkomunikasikan Menyimpulkan dan mengambil keputusan bersama hasil analisis tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara.</p> <p>KD 4.7 Mewujudkan keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><u>KegiatanMandiri :</u> Menggali informasi dari berbagai sumber tentang wawasan nusantara</p> <p>Penilaian-3</p> <p>Penilaian Susulan</p> <p>ULANGAN SEMESTER</p>	<p>2X45'</p> <p>4X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p>	<p>2X45'</p> <p>4X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p> <p>2X45'</p>
JUMLAH	38 Jam	

Mengetahui
Kepala SMAN 10 Yk

Yogyakarta,
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP. 19591012 198903 1 006

Aspiyah, S.Pd
NIP. 19710813 200502 2 003

Nama Sekolah : SMA N 10 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

PROGRAM SEMESTER
: SMA N 10 YOGYAKARTA
: Pendidikan Kewarganegaraan

Tahun Ajaran : 2016/2017
Kelas/ Semester : X./2 Genap

No SKKD	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu (ip)	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
3/3.5	3.5. Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.5.1. Mengidentifikasi Kebhinekaan Bangsa Indonesia. 3.5.2. Menganalisis Konsep Integrasi Nasional. 3.5.3. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional. 3.5.4. Menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. 3.5.5. Menunjukkan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	2 X 45' 2 X 45' 2 X 45' 2 X 45' 2 X 45'		2															
3/3.6	3.6 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksobudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.6.1. Menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional. 3.6.2. Mengidentifikasi ancaman di Bidang Ipoleksobudhankam. 3.6.3. Menunjukkan peran Serta Masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional.	2 X 45' 2 X 45' 2 X 45' 2 X 45'																	
3/3.7	3.7. Menganalisis arti pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.7.1. Menganalisis Wawasan Nusantara. 3.7.2. Mengidentifikasi Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara. 3.7.3. Mengidentifikasi Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. 3.7.4. Menunjukkan Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan.	2 X 45' 2 X 45' 2 X 45' 2 X 45' 2 X 45'																	
CADANGAN																			
ULANGAN SEMESTER			2 X 45'																
Jumlah			38																

Menggetahui
Kepala SMA N 10 Yogyakarta

Yogyakarta, Juli 2015
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP. 19590102 198903 1 006

Aspiyah, S.Pd
NIP. 19710813 200502 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Materi pokok : Pembagian Kekuasaan Negara
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (2 jam pelajaran)

A. Kompetensi Isi (KI-4)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar (KD)

- 3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

C. Indikator Pencapaian

- 1.Mendeskrripsikan sistem Pembagian Kekuasaan Negara.
- 2.Menganalissi sietem pembagian kekuasaan Republik Indonesia.

B. Materi Pembelajaran

Materi pelajaran PPKn Bab I kelas X adalah Nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan sub-bab pertama yaitu:

1. Macam-macam kekuasaan Negara
2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia

Lebih jelas materi dilampirkan pada lampiran.

D. Alokasi Waktu

45 menit x 2 (2 kali jam pelajaran)

E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Strategi : Pembelajaran kooperatif

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Pembelajaran

NO	URAIAN KEGIATAN
1.	<p>PENDAHULUAN (15 Menit)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), media, alat dan buku yang diperlukan.2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.
2.	<p>KEGIATAN INTI (60 Menit)</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Mengamati</i> Peserta didik mengamati menyimak materi dan gambar dalam power point

yang telah disiapkan oleh guru. Pada kegiatan ini guru akan menyediakan materi dan memberikan penjelasan sebagai dasar pemikiran peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari.

2) Menanya

- a) Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya setelah guru memberikan materi.
- b) Guru membagi peserta didik menjadi 6-7 kelompok, yang kemudian dalam kelompok tersebut guru memberikan masing-masing sebuah tema dan siswa diharuskan membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya yang kemudian pertanyaan akan dikumpulkan dan setiap kelompok akan mengambil 3 pertanyaan dan di jawab yang kemudian akan di tanggapai oleh kelompok lain. Apabila ada kelompok yang tidak memberikan pertanyaan guru akan memberikan tugas kepada kelompok tersebut.
- c) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan serta memberikan tanggapan.

3) Mengumpulkan Informasi

- a) Peserta didik mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang telah disusun oleh setiap kelompok dengan membaca uraian materi di Buku PPKn kelas X Bab1 sub bab A. Peserta didik juga diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber lain yang relevan seperti internet; web, media sosial, artikel dan lainnya.

4) Mengasosiasi

Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh, seperti hubungan anatra pembagian kekuasaan dengan nilai-nilai pancasila.

5) Mengomunikasikan

- a) Setiap kelompok mempersentasikan jawaban atas pertanyaan yang mereka peroleh.
- b) Kelompok lain memberikana tanggapan pada jawaban dari kelompok pertama yang mempersentasikan jawaban.
- c) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.

3.	<p>PENUTUP(15 Menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. 2) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan pertama. 3) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dirumah. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Penilaian Pembelajaran

- Penilaian Sikap (Lembar Penilaian Terlampir)
- Penilaian Kognitif Dan Psikomotor (Lembar Penilaian Terlampir)

H. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi bab I tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan peserta didik diminta mengamati pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Materi remedial disampaikan pada waktu :

1. Proses pembelajaran, apabila ada siswa yang kurang paham tentang materi yang dibahas, maka guru melakukan remedial tentang materi yang kurang dipahami tersebut
2. Setelah dilakukan tes tulis / tes lisan, sehingga setelah dianalisa maka dapat diketahui mana materi yang kurang dipahami siswa sehingga perlu disampaikan kembali.

b. Remedial

Kegiatan Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari materi tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, kemudian Guru menyediakan soal-soal latihan terkait Bab tersebut. Peserta didik secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian menadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

Kegiatan Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan yang tingkat kompetensi yang diharapkan dalam Bab 2. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan dan mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

I. Media/Alat, Bahan Dan Sumber Belajar

1. Media / Alat

- a. LCD
- b. Media Informasi
- c. Alat tulis misal Spidol
- d. Lembar Kerja Siswa

2. Bahan Pembelajaran

Materi tentang Pembagian Kekuasaan Negara

3. Sumber Belajar

- a. Buku siswa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Kemdikbud, 2013.
- b. Sumber lain yang relevan.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa

Aspiyah, S.Pd

Ririn Wulandari

NIP. 19710813 200502 2 003

NIM 13401241051

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah	: SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Materi pokok	: Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian
Alokasi Waktu	: 2 X 45 menit (2 jam pelajaran)

G. Kompetensi Isi (KI-4)

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
7. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
8. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

H. Kompetensi Dasar (KD)

- 3.2 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

I. Indikator Pencapaian

1. Mampu menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia.
2. Mampu mendeskripsikan kedudukan dan lembaga pemerintahan non departemen.

C. Materi Pembelajaran

Materi pelajaran PPKn Bab I kelas X adalah Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan sub-bab pertama yaitu:

1. Tugas kementerian negara republik Indonesia
2. Klasifikasi kementerian negara republik Indonesia
3. Lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK)

Lebih jelas materi dilampirkan pada lampiran.

J. Alokasi Waktu

45 menit x 2 (2 kali jam pelajaran)

K. Metode Pembelajaran

3. Pendekatan : Saintifik
4. Strategi : Pembelajaran kooperatif, Game

L. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Pembelajaran

NO	URAIAN KEGIATAN
1.	<p>PENDAHULUAN (15 Menit)</p> <ol style="list-style-type: none">4) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), media, alat dan buku yang diperlukan.5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.6) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.
2.	<p>KEGIATAN INTI (60 Menit)</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Mengamati</i> Peserta didik mengamati menyimak materi dan gambar dalam power point yang telah disiapkan oleh guru. Pada kegiatan ini guru akan menyediakan materi dan memberikan penjelasan sebagai dasar pemikiran peserta didik

	<p>mngenai materi yang akan dipelajari.</p> <p>2) Menanya</p> <p>d) Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya setelah guru memberikan materi.</p> <p>e) Guru membuat Game/permainan yang disebut pak polisi numpang Tanya, dengan permainan ini guru terlebih dahulu menentukan tema permainan ronde pertama guru memberikan tema yang umum dimana setiap siswa harus menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan tema tersebut. dalam permainan ini apabila ada yang tidak bisa menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan tema maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman yang sudah disepakatai sebelumnya. Dengan permainan yang sudah berjalan kemudian guru mmberikan tema yang berkaitan dengan kementrian.</p> <p>f) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyerap informasi pelajaran saat bermaian tersebut.</p> <p>3) Mengasosiasi</p> <p>4) Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh, seperti hubungan anatra Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>d) Siswa menyebutkan jawabannya dalam permainan.</p> <p>e) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p>
3.	<p>PENUTUP(15 Menit)</p> <p>5) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>6) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan pertama.</p> <p>7) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dirumah.</p> <p>8) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>

J. Penilaian Pembelajaran

- Penilaian Sikap (Lembar Penilaian Terlampir)
- Penilaian Kognitif Dan Psikomotor (Lembar Penilaian Terlampir)

K. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

c. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi bab I tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan peserta didik diminta mengamati pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Materi remedial disampaikan pada waktu :

3. Proses pembelajaran, apabila ada siswa yang kurang paham tentang materi yang dibahas, maka guru melakukan remedial tentang materi yang kurang dipahami tersebut
4. Setelah dilakukan tes tulis / tes lisan, sehingga setelah dianalisa maka dapat diketahui mana materi yang kurang dipahami siswa sehingga perlu disampaikan kembali.

d. Remedial

Kegiatan Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari materi tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, kemudian Guru menyediakan soal-soal latihan terkait Bab tersebut. Peserta didik secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian menadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

Kegiatan Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari

informasi yang relevan yang tingkat kompetensi yang diharapkan dalam Bab 2. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan dan mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

L. Media/Alat, Bahan Dan Sumber Belajar

4. Media / Alat

- e. LCD
- f. Media Informasi
- g. Alat tulis misal Spidol
- h. Lembar Kerja Siswa

5. Bahan Pembelajaran

Materi tentang Pembagian Kekuasaan Negara

6. Sumber Belajar

- c. Buku siswa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Kemdikbud, 2013.
- d. Sumber lain yang relevan

Yogyakarta,.....2016

Aspiyah, S.Pd

Ririn Wulandari

NIP. 19710813 200502 2 003

NIM 13401241051

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Materi pokok : Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (2 jam pelajaran)

A. Kompetensi Isi (KI-4)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

C. Indikator Pencapaian

1. Mampu menjelaskan nilai pancasila yang ada dalam penyelenggaraan neagra.
2. Mampu menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan

D. Materi Pembelajaran

Materi pelajaran PPKn Bab I kelas X adalah Nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan sub-bab pertama yaitu:

1. Sistem Nilai dalam Pancasila
2. Implementasi Pancasila
3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Lebih jelas materi dilampirkan pada lampiran.

E. Alokasi Waktu

45 menit x 2 (2 kali jam pelajaran)

F. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Strategi : Pembelajaran kooperatif

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Pembelajaran

NO	URAIAN KEGIATAN
1.	PENDAHULUAN (15 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), media, alat dan buku yang diperlukan. 2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.
2.	KEGIATAN INTI (60 Menit)

1) Mengamati

Peserta didik mengamati menyimak materi dan gambar dalam power point yang telah disiapkan oleh guru. Pada kegiatan ini guru akan menyediakan materi dan memberikan penjelasan sebagai dasar pemikiran peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari.

2) Menanya

- a) Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya setelah guru memberikan materi.
- b) Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, yang kemudian dalam kelompok tersebut guru memberikan masing-masing satu sila untuk di diskusikan bentuk penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menjawab pertanyaan serta memberikan tanggapan.

3) Mengumpulkan Informasi

- a) Peserta didik mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan dengan membaca uraian materi di Buku PPKn kelas X Bab1. Peserta didik juga diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber lain yang relevan seperti internet; web, media sosial, artikel dan lainnya.

4) Mengasosiasi

Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh, seperti bagaimana bentuk penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan

5) Mengomunikasikan

- a) Setiap kelompok mempersentasikan jawaban
- b) Kelompok lain memberikana tanggapan pada jawaban dari kelompok pertama yang mempersentasikan jawaban.
- c) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.

3.	<p>PENUTUP(15 Menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. 2) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan pertama. 3) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dirumah. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Penilaian Pembelajaran

- Penilaian Sikap (Lembar Penilaian Terlampir)
- Penilaian Kognitif Dan Psikomotor (Lembar Penilaian Terlampir)

N. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi bab I tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan peserta didik diminta mengamati pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Materi remedial disampaikan pada waktu :

1. Proses pembelajaran, apabila ada siswa yang kurang paham tentang materi yang dibahas, maka guru melakukan remedial tentang materi yang kurang dipahami tersebut
2. Setelah dilakukan tes tulis / tes lisan, sehingga setelah dianalisa maka dapat diketahui mana materi yang kurang dipahami siswa sehingga perlu disampaikan kembali.

b. Remedial

Kegiatan Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari materi tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, kemudian Guru menyediakan soal-soal latihan terkait Bab tersebut. Peserta didik secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian menadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

Kegiatan Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan yang tingkat kompetensi yang diharapkan dalam Bab 2. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan dan mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

O. Media/Alat, Bahan Dan Sumber Belajar

1. Media / Alat

- a. LCD
- b. Media Informasi
- c. Alat tulis misal Spidol
- d. Lembar Kerja Siswa

2. Bahan Pembelajaran

Materi tentang Pembagian Kekuasaan Negara

3. Sumber Belajar

- a. Buku siswa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Kemdikbud, 2013.
- b. Sumber lain yang relevan.

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran

Aspiyah, S.Pd

NIP. 19710813 200502 2 003

Mahasiswa

Ririn Wulandari

NIM 13401241051

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Materi pokok : Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (2 jam pelajaran)

H. Kompetensi Isi (KI-4)

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
7. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
8. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

I. Kompetensi Dasar (KD)

3.2 Menganalisis Ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

J. Indikator Pencapaian

1. mampu mendiskripsikan Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
2. mampu menganalisis Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

K. Materi Pembelajaran

Materi pelajaran PPKn Bab 2 kelas X adalah ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. dengan sub-bab pertama yaitu:

A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lebih jelas materi dilampirkan pada lampiran.

L. Alokasi Waktu

45 menit x 2 (2 kali jam pelajaran)

M. Metode Pembelajaran

3. Pendekatan : Saintifik
4. Strategi : Pembelajaran kooperatif

N. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Pembelajaran

NO	URAIAN KEGIATAN
1.	PENDAHULUAN (15 Menit) 4) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), media, alat dan buku yang diperlukan.

	<p>5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>6) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.</p>
2.	<p>KEGIATAN INTI (60 Menit)</p> <p>1) <i>Mengamati</i></p> <p>Peserta didik mengamati menyimak materi dan gambar dalam power point yang telah disiapkan oleh guru. Pada kegiatan ini guru akan menyediakan materi dan memberikan penjelasan sebagai dasar pemikiran peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari.</p> <p>2) <i>Menanya</i></p> <p>d) Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya setelah guru memberikan materi.</p> <p>e) Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, yang kemudian dalam kelompok tersebut guru memberikan masing-masing tema untuk di diskusikan bentuk penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>f) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menjawab pertanyaan serta memberikan tanggapan.</p> <p>3) <i>Mengumpulkan Informasi</i></p> <p>b) Peserta didik mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan dengan membaca uraian materi di Buku PPKn kelas X Bab 2. Peserta didik juga diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber lain yang relevan seperti internet; web, media sosial, artikel dan lainnya.</p> <p>4) <i>Mengasosiasi</i></p> <p>Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh.</p> <p>5) <i>Mengomunikasikan</i></p> <p>d) Setiap kelompok mempersentasikan jawaban</p> <p>e) Kelompok lain memberikana tanggapan pada jawaban dari kelompok pertama yang mempersentasikan jawaban.</p> <p>f) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p>

3.	<p>PENUTUP(15 Menit)</p> <p>5) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>6) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan pertama.</p> <p>7) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dirumah.</p> <p>8) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P. Penilaian Pembelajaran

- Penilaian Sikap (Lembar Penilaian Terlampir)
- Penilaian Kognitif Dan Psikomotor (Lembar Penilaian Terlampir)

Q. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

c. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi bab 2 ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan peserta didik diminta mengamati pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi remedial disampaikan pada waktu :

3. Proses pembelajaran, apabila ada siswa yang kurang paham tentang materi yang dibahas, maka guru melakukan remedial tentang materi yang kurang dipahami tersebut
4. Setelah dilakukan tes tulis / tes lisan, sehingga setelah dianalisa maka dapat diketahui mana materi yang kurang dipahami siswa sehingga perlu disampaikan kembali.

d. Remedial

Kegiatan Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk

yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari materi tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. , kemudian Guru menyediakan soal-soal latihan terkait Bab tersebut. Peserta didik secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian menadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

Kegiatan Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan yang tingkat kompetensi yang diharapkan dalam Bab 2. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan dan mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

R. Media/Alat, Bahan Dan Sumber Belajar

4. Media / Alat

- e. LCD
- f. Media Informasi
- g. Alat tulis misal Spidol
- h. Lembar Kerja Siswa

5. Bahan Pembelajaran

Materi tentang Pembagian Kekuasaan Negara

6. Sumber Belajar

- c. Buku siswa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Kemdikbud, 2013.
- d. Sumber lain yang relevan.

Yogyakarta, 2016

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa

Aspiyah, S.Pd

NIP. 19710813 200502 2 003

Ririn Wulandari

NIM 13401241051

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Materi pokok : Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (2 jam pelajaran)

O. Kompetensi Isi (KI-4)

9. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
10. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
11. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
12. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

P. Kompetensi Dasar (KD)

3.3 Menganalisis Ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

Q. Indikator Pencapaian

1. mampu menjelaskan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.
2. mampu menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.

R. Materi Pembelajaran

Materi pelajaran PPKn Bab 2 kelas X adalah ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. dengan sub-bab pertama yaitu:

B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

1. Status Warga Negara
2. Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia
3. Syarat – syarat menjadi Warga negara Indonesia

Lebih jelas materi dilampirkan pada lampiran.

S. Alokasi Waktu

45 menit x 2 (2 kali jam pelajaran)

T. Metode Pembelajaran

5. Pendekatan : Saintifik
6. Strategi : Pembelajaran kooperatif

U. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Pembelajaran

NO	URAIAN KEGIATAN
1.	PENDAHULUAN (15 Menit) 7) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), media, alat dan buku yang diperlukan.

	<p>8) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>9) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.</p>
2.	<p>KEGIATAN INTI (60 Menit)</p> <p>1) Mengamati</p> <p>Peserta didik mengamati menyimak materi dan gambar dalam power point yang telah disiapkan oleh guru. Pada kegiatan ini guru akan menyediakan materi dan memberikan penjelasan sebagai dasar pemikiran peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari.</p> <p>2) Menanya</p> <p>g) Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya setelah guru memberikan materi.</p> <p>h) Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, yang kemudian dalam kelompok tersebut guru memberikan masing-masing tema untuk di diskusikan.</p> <p>i) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menjawab pertanyaan serta memberikan tanggapan.</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>c) Peserta didik mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan dengan membaca uraian materi di Buku PPKn kelas X Bab 2. Peserta didik juga diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber lain yang relevan seperti internet; web, media sosial, artikel dan lainnya.</p> <p>4) Mengasosiasi</p> <p>Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>g) Setiap kelompok mempersentasikan jawaban</p> <p>h) Kelompok lain memberikana tanggapan pada jawaban dari kelompok pertama yang mempersentasikan jawaban.</p> <p>i) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p>

3.	<p>PENUTUP(15 Menit)</p> <p>9) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>10) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan pertama.</p> <p>11) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dirumah.</p> <p>12) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Penilaian Pembelajaran

- Penilaian Sikap (Lembar Penilaian Terlampir)
- Penilaian Kognitif Dan Psikomotor (Lembar Penilaian Terlampir)

T. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

e. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi bab 2 ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Materi remedial disampaikan pada waktu :

5. Proses pembelajaran, apabila ada siswa yang kurang paham tentang materi yang dibahas, maka guru melakukan remedial tentang materi yang kurang dipahami tersebut
6. Setelah dilakukan tes tulis / tes lisan, sehingga setelah dianalisa maka dapat diketahui mana materi yang kurang dipahami siswa sehingga perlu disampaikan kembali.

f. Remedial

Kegiatan Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk

yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari materi tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara., kemudian Guru menyediakan soal-soal latihan terkait Bab tersebut. Peserta didik secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian menadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

Kegiatan Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan yang tingkat kompetensi yang diharapkan dalam Bab 2. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan dan mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

U. Media/Alat, Bahan Dan Sumber Belajar

7. Media / Alat

- i. LCD
- j. Media Informasi
- k. Alat tulis misal Spidol
- l. Lembar Kerja Siswa

8. Bahan Pembelajaran

Materi tentang Pembagian Kekuasaan Negara

9. Sumber Belajar

- e. Buku siswa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Kemdikbud, 2013.
- f. Sumber lain yang relevan.

Yogyakarta, 2016

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa

Aspiyah, S.Pd

NIP. 19710813 200502 2 003

Ririn Wulandari

NIM 13401241051

LAMPIRAN PENILIAN KELAS X
INSTRUMEN PENILAIAN

1. PENILAIAN SIKAP

a. Petunjuk Umum

- 1) Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa *Lembar Observasi*.
- 2) Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.

b. Petunjuk Pengisian

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap Spiritual/Sosial peserta didik. Berilah angka (1-4) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

c. Kategori Skor Sikap Spiritual dan Sosial

Sangat Baik (A) : apabila Skor Akhir: 17 sampai dengan 20

Baik (B) : apabila Skor Akhir: 13 sampai dengan 16

Cukup (C) : apabila Skor Akhir: 10 sampai dengan 12

Kurang (K) : apabila Skor Akhir: Skor Akhir \leq 10

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN

SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL

Nama :
Kelas/Semester : X /I
TahunPelajaran : 2016

No	Aspek Penilaian	Skor Penilaian				Jumlah
		1	2	3	4	
1	Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.					
2	Mengucapkan Salam sebelum memulai presentasi maupun sesudah presentasi					
3	Mampu dan mau bekerja sama dengan teman					
4	Menerima hasil kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya					

5	Berani Menyampaikan Pendapat					
Jumlah Skor						
Kategori						

2. PENILAIAN KOGNITIF DAN PSIKOMOTOR

A. Petunjuk Umum

1. Instrumen penilaian pengetahuan keterampilan ini berupa *Lembar Observas*.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar, peserta didik yang dinilai.

B. Petunjuk Pengisian

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap keterampilan peserta didik. Berilah angka (1-4) pada kolom skor sesuai sikap keterampilan yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

a. Menanya/Menjawab

- Skor 4 apabila peserta didik selalu menjawab/menanya
- Skor 3 apabila peserta didik sering menjawab/menanya
- Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang menjawab/menanya
- Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah menjawab/menanya

b. Argumentasi

- Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas
- Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas
- Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas
- Skor 1 apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas

c. Penggunaan Bahasa

- Skor 4 apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami
- Skor 3 apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami
- Skor 2 apabila menggunakan bahasa namun penulisan tidak sesuai EYD, dan tidak mudah dipahami
- Skor 1 apabila menggunakan bahasa dan penulisan tidak sesuai EYD, dan tidak mudah dipahami

C. Kategori Skor Pengetahuan dan Keterampilan

Sangat Baik (A) : apabila Skor Akhir: 13 sampai dengan 16

Baik (B) : apabila Skor Akhir: 10 sampai dengan 12

Cukup (C) : apabila Skor Akhir: 6 sampai dengan 9

Kurang (D) : apabila Skor Akhir: Skor Akhir \leq 6

INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN DAN PSIKOMOTOR

No	Nama Siswa	Aspek Penilaian				Skor Akhir	Nilai
		Menanya	Menjawab	Argumentasi	Penggunaan Bahasa		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							

27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							

LAMPIRAN MATERI RPP

BAB 1

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Macam-macam Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali terdengar baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik.

Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintakkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Begitu pula di masyarakat, ketika ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, maka setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan?

Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273), kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang

- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273)

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pendapat yang dikemukakan oleh **Montesquieu** merupakan penyempurnaan dari pendapat **John Locke**. Kekuasaan federatif oleh **Montesquieu** dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori **Montesquieu** ini dinamakan dengan *Trias Politica*.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara* (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan

kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PASAL?). Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara,

yaitu:

- 1) **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*
- 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*
- 3) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- 4) **Kekuasaan yudikatif** atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
- 5) **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan*

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- 6) **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.*

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

b. **Pembagian kekuasaan secara vertikal**

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.* Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota

terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*

B. Kedudukan Dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia Dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lemabaga Non Kementrian

1. Tugas Kementrian Negara Republik Inonesia

Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Presiden Republik	Kewenangan Presiden Republik
------------------------------	------------------------------

Indonesia sebagai Kepala Negara	Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
<p>a. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).</p> <p>b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).</p> <p>c. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2).</p> <p>d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).</p> <p>e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).</p> <p>f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).</p> <p>g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).</p> <p>h. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).</p> <p>i. Memberi gelar, tanda jasa, dan</p>	<p>a. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).</p> <p>b. Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).</p> <p>c. Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2).</p> <p>d. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).</p> <p>e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2).</p> <p>f. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).</p> <p>g. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1).</p> <p>h. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).</p> <p>i. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).</p> <p>j. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi</p>

lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).	Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3). k. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3). l. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) *Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan,

pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

- a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum,

keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian Negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan di bawah ini.

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri
 - 2) Kementerian Luar Negeri

- 3) Kementerian Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 2) Kementerian Keuangan
 - 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 4) Kementerian Perindustrian
 - 5) Kementerian Perdagangan
 - 6) Kementerian Pertanian
 - 7) Kementerian Kehutanan
 - 8) Kementerian Perhubungan
 - 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 11) Kementerian Pekerjaan Umum
 - 12) Kementerian Kesehatan
 - 13) Kementerian Pendidikan dan
 - 14) Kebudayaan
 - 15) Kementerian Sosial
 - 16) Kementerian Agama
 - 17) Kementerian Pariwisata dan
 - 18) Ekonomi Kreatif
 - 19) Kementerian Komunikasi dan
 - 20) Informatika
- c. Kementrian yang menanganai urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronasi program pemerintah, terdiri atas:
- 1) Kementerian Sekretariat
 - 2) Negara
 - 3) Kementerian Riset dan
 - 4) Teknologi
 - 5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - 6) Kementerian Lingkungan Hidup
 - 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 8) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 9) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- 10) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- 11) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 12) Kementerian Perumahan Rakyat
- 13) Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 3) Badan Intelijen Negara (BIN);
- 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- 5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
- 9) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- 12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- 13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;
- 14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
- 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- 19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
- 20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 21) Badan SAR Nasional (Basarnas);
- 22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;

- 24) Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
- 28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- 29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
- 31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

2. Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa perjuangan Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan (fairness) yang nondiskriminatif; demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan

dalam membuat keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- 3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

- 4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
- 5) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
- 6) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

b. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- 1) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.
- 2) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
- 3) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Nilai Sila Persatuan Indonesia

- 1) Nasionalisme
- 2) Cinta bangsa dan tanah air
- 3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
- 5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

d. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- 1) Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- 2) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat.

- 3) Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
 - 4) Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.
- e. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 1) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
 - 2) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
 - 3) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

LAMPIRAN MATERI RPP

BAB 2

KETENTUAN UUD NKRI 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta.

A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta.

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian

ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/ PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Berdasarkan dari Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = *United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.

Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km², termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km², yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km². Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, rumput laut, kerang, udang, dan sebagainya) ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam.

a. Zona Laut Teritorial

Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis

masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

b. Zona Landas Kontinen

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing- masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980.

Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri.

Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan.

Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh

wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya.

Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

a. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

b. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

c. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur,

yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

d. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan

Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban- kewajiban sebagai berikut.

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

1. Status Warga Negara Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
- f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda.

- a. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- b. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.
- c. Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.
 - 1) Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - 2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.

Dari uraian di atas, timbul suatu pertanyaan apakah setiap penduduk adalah Warga Negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada Warga Negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia.

Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Selain itu, ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk

jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi, ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang paling banyak. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). Surat keterangan penduduk itu sangat penting, apabila kalian sudah dewasa kelak (sudah mencapai usia 17 tahun), kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting? Hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP-lah yang dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

- a. Asas *ius sanguinis* (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
- b. Asas *ius soli* (asas kedaerahan/tempat kelahiran), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk.

- a. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
- b. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut.

- a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa).

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut.

- a. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- b. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut.

- a. Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- b. Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

a. Naturalisasi Biasa

Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, sebagai berikut.

- 1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih.
- 6) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- 8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

b. Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
- d. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
- e. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
- f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
- g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.

- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman dan tertib. Hal itu semua, dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Coba kalian amati gambar 2.8.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentu saja kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu?

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam

agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.

Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2). Di samping itu, dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan-ketentuan di atas, semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
- b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
- c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
- d. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing- masing.

2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah kalian, mungkin saja warga sekolahnya (siswa dan guru) menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Atau mungkin saja, kalian mempunyai tetangga yang tidak seagama dengan kalian. Hal itu semua, merupakan sesuatu yang wajar. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama.

Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita mengenal konsep **Tri Kerukunan Umat Beragama**, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari tiga konsep kerukunan itu? Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut.

Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukkan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kemerdekaan yang diproklamlirkan oleh Bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para

pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan NKRI.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun negara Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, kelak model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan,

dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang (diapit oleh dua benua dan dua samudera) disatu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Apa sebenarnya kesadaran bela negara itu?

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Penyelesaian pertikaian atau konflik antarbangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha-usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini.

- a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling).

- b. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
- c. Belajar dengan tekun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn.
- d. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka.
- e. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- f. Pengabdian sebagai anggota TNI.
- g. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian

**LEMBAR PENILAIAN PENYAJIAN DAN HASIL DISKUSI
(PRESENTASI)**

No	Nama Kelompok	Aspek Penilaian					Skor	Kategori
		Menanya/ Menjawab	Argumentasi	Isi Laporan	Penggunaan Bahasa	Estetika		

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
(KTSP)

Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Kelas/Semester : XII/Ganjil
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Materi Pokok : Perilaku yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 jam pertemuan)

I. STANDAR KOMPETENSI

1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

II. KOMPETENSI DASAR

- 1.3. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 1.1. Menunjukkan sikap positif terhadap nilai Pancasila
- 1.2. Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pokok pembelajaran adalah agar siswa mampu :

1. Menunjukkan sikap positif terhadap nilai Pancasila
2. Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka

V. MATERI AJAR

1. Sikap positif terhadap nilai Pancasila

VI. METODE PEMBELAJARAN

Ceramah bervariasi dengan tanya jawab.

VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No.	Kegiatan Belajar	Waktu (Menit)	Aspek <i>lifeskill</i> yang dikembangkan
1.	Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa	15'	- Disiplin - Kerja sama - Keterampilan
2.	<p>▪ Kegiatan Inti</p> <p>📖 Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menunjukkan sikap positif terhadap nilai Pancasila ➤ Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka <p>📖 Elaborasi Dalam kegiatan elaborasi,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berdiskusi mengenai makna sikap positif terhadap nilai Pancasila ➤ Diskusi Kelompok tentang sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka . ➤ Guru menugaskan siswa untuk menjelaskan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka <p>📖 Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui ➤ Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 	55'	- Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

3.	Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan	20'	- Pengendalian diri
----	---------------------------------------------------	-----	---------------------

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

➤ MEDIA BELAJAR

1. Power Point.
2. Video.

➤ SUMBER BELAJAR

1. Buku Paket PKn Kelas XII dan Lembar Kerja Siswa.
2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen.
3. Buku lain yang relevan.

VIII. PENILAIAN HASIL BELAJAR

1. Penilaian Kognitif
 - a. Tes Tertulis Pilihan Objektif
 - b. Tes Tertulis Uraian
2. Penilaian Afektif

Yogyakarta, 2016

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa

Aspiyah, S.Pd

NIP. 19710813 200502 2 003

Ririn Wulandari

NIM 13401241051

Lampiran

MATERI AJAR

Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

1. Nilai Positif sebagai Ideologi Terbuka

Nilai-nilai Pancasila termasuk kedalam nilai ke rohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengikuti pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang (harmonis). Hal ini dapat dibuktikan dengan susunan sila-sila dari Pancasila yang tersusun secara sistematis-hierarkis. Pancasila jika dikaji dari sudut pandang metafisika, berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenai alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni. Dengan demikian, tinjauan metafisika terhadap Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif dan terbuka.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pada masa Reformasi

Dengan Pancasila sebagai paradigma reformasi, gerakan reformasi harus diletakkan dalam kerangka perspektif sebagai landasan sekaligus sebagai cita-cita. Sebab tanpa suatu dasar dan tujuan yang jelas, reformasi akan mengarah pada suatu gerakan anarki, kerusuhan, disintegrasi, dan akhirnya mengarah pada kehancuran bangsa. Reformasi dengan paradigma Pancasila adalah sebagai berikut.

- Refomasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
- Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab
- Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan
- Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan
- Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
(KTSP)

Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Kelas/Semester : XII/Ganjil
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Materi Pokok : Sistem Pemerintahan
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 jam pertemuan)

II. STANDAR KOMPETENSI

2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

II. KOMPETENSI DASAR

2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara

III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

2.1.1. Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter di berbagai Negara

2.1.2. Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter

2.1.3. Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pokok pembelajaran adalah agar siswa mampu :

1. Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter di berbagai Negara
2. Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter
3. Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter

V. MATERI AJAR

2. Pengertian Sistem Pemerintahan

3. Bentuk Pemerintahan
4. Macam-macam Sistem Pemerintahan

VI. METODE PEMBELAJARAN

Ceramah bervariasi dengan tanya jawab.

VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No.	Kegiatan Belajar	Waktu (Menit)	Aspek <i>lifeskill</i> yang dikembangkan
1.	Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa	15'	- Disiplin - Kerja sama - Keterampilan
2.	<p>▪ Kegiatan Inti</p> <p>📖 Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi : ➤ Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter di berbagai Negara ➤ Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter ➤ Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter</p> <p>📖 Elaborasi Dalam kegiatan elaborasi, ➤ Berdiskusi mengenai makna sistem pemerintahan di berbagai negara ➤ Diskusi Kelompok tentang sistem pemerintahan di berbagai negara. ➤ Guru menugaskan siswa untuk menjelaskan sistem pemerintahan di berbagai negara</p> <p>📖 Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: ➤ Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum</p>	55'	- Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

	<p>diketahui</p> <p>➤ Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.</p>		
3.	<p>Penutup</p> <p>- Evaluasi/Tanya jawab</p> <p>- Penenangan</p>	20'	- Pengendalian diri

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

➤ MEDIA BELAJAR

3. Power Point.
4. Video.

➤ SUMBER BELAJAR

4. Buku Paket PKn Kelas XII dan Lembar Kerja Siswa.
5. UUD 1945 yang Telah Diamandemen.
6. Buku lain yang relevan.

VIII. PENILAIAN HASIL BELAJAR

3. Penilaian Kognitif
 - a. Tes Tertulis Pilihan Objektif
 - b. Tes Tertulis Uraian
4. Penilaian Afektif

Yogyakarta, 2016

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa

Aspiyah, S.Pd

NIP. 19710813 200502 2 003

Ririn Wulandari

NIM 13401241051

Lampiran

MATERI AJAR

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem Pemerintahan Berbagai Negara

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu kebergantungan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan Presidensial bertitik tolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan oleh trias politica. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pemegang kekuasaan legislatif. Ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut.

~ Kedudukan kepala negara (presiden) adalah sebagai kepala negara

Dan sebagai kepala eksekutif (pemerintahan)

~ Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

Umum sehingga akan terjadi presiden berasal dari partai politik

Yang berbeda dengan partai politik di parlemen

~ Presiden dan DPR tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan)

~ Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR dalam masa jabatannya

Tetapi jika presiden melakukan suatu perbuatan yang melanggar

Hukum, presiden dapat dikenai impeachment (pengadilan DPR)

~ Dalam rangka menyusun kabinet (menteri), presiden wajib meminta

Persetujuan DPR.

~ Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan

Bertanggungjawab kepada presiden

AMERIKA SERIKAT

Badan eksekutif terdiri atas presiden beserta menteri-menteri yang merupakan pembantunya. Presiden dinamakan "Chief Executive". Secara formal dan sesuai dengan asas Trias Politica klasik, presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi serta penyelenggaraan pekerjaan dari Congress. Selama masa jabatannya 4 tahun atau 8 tahun, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Congress, tetapi diapun tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan Congress. Presiden dapat mempengaruhi Congress melalui Pidato Kenegaraan (State of the Union Message) yang diucapkannya tiap tahun pada pembukaan sidang. Setiap rancangan undang-undang disiapkan oleh pemerintah dan diajukan pada Congress.

PAKISTAN

Pakistan memulai masa kemerdekaannya dengan suatu sistem parlementer yang mirip dengan sistem di Inggris. Namun, ketika dipimpin oleh Jenderal Ayub Khan, dimulailah suatu sistem pemerintahan presidensial dengan badan eksekutif yang kuat. Menurut Undang-undang dasar Pakistanyang berlaku, badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama islam beserta menteri-menteri. Perdana menteri merupakan pembantunya dan tidak boleh merangkap menjadi badan anggota legislatif. Presiden mempunyai wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh badan legislatif. Veto ini oleh badan legislatif dapat dibatalkan kalau rancangan undang-undang itu diterima lagi olehnya dengan mayoritas 2/3 suara. Sebaliknya, presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang yang diissue-kan itu kepada suatu referendum. Selain itu, presiden mempunyai wewenang untuk membubarkan legislatif.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat erat. Hal ini disebabkan para menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dari parlemen. Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Adabeberapa ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.

~ Terdapat hubungan yang erat antar eksekutif dan legislatif, bahkan

Antara keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

~ Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh

Parlemen dari partai politik peserta pemilu yang meduduki kursi

Mayoritas di parlemen

~ Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sbg

Kepala eksekutif atau pemerintahan

~ Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada

Perlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau

Menjatuhkan “mosi tidak percaya” kepada kabinet jika pertanggung

Jawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri

Baik secara perseorangan maupun kolektif tidak dapat diterima

Oleh parlemen

~ Raja/Ratu atau Presiden adalah sebagai kepala negara

~ Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif

~ Dalam sisten dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet

Dan perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan

Pemilihan umum

~ Jika terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, kepala

Negara akan membubarkan parlemen

INGGRIS

Badan eksekutif terdiri atas raja saja sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat. Kekuasaan raja bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan sebenarnya ditangan perdana menteri. Inggris terkenal sebagai tempat asal asas tanggung jawab menteri, tetapi di Inggris sendiri masih berbentuk konvensi. Prinsipnya ialah bahwa menteri atau seluruh kabinet yang tidak lagi memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatan. Jadi, masa hidup suatu kabinet bergantung kepada dukungannya kepada badan legislatif. Berbeda dengan kebanyakan negara lain yang memaksa sistem parlementer.

INDIA

Sistem ketatanegaraan India agak mirip dengan Inggris dan sistem pemerintahannya pun adalah Cabinet Government. Badan eksekutif terdiri atas seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif, baik dipusat maupun di negara-negara bagian. Sistem parlementer gaya Cabinet government dapat berjalan dengan baik ketika Perdana menteri Nehru dan selama Partai Kongres dapat menguasai kehidupan politik. Pada Juni 1975 merasa terpaksa untuk menyatakan "keadaan darurat" dan sejak saat itu pemerintah India mengadakan bermacam-macam pembatasan atas kegiatan para pelaku politik dan kegiatan media massa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.

3. Sistem Kabinet Presidensial dan Parlementer

Badan eksekutif, sebagai salah satu organ pemerintah, biasanya disebut dewan menteri atau kabinet. Dewan menteri biasanya terdiri dari beberapa kementerian atau departemen. Kabinet dapat dibagi ke dalam beberapa jenis dengan dasar :

Tanggung jawab Kabinet

~ Kabinet Ministerial, yaitu kabinet yang tugas eksekutifnya

Dipertanggungjawabkan oleh para menteri.

~ Kabinet Presidensial, yaitu suatu kabinet yang tugas eksekutifnya

Dipertanggungjawabkan oleh Presiden.

Pembentukan Kabinet

~ Kabinet Parlementer, yaitu kabinet yang pembentukannya dicampuri

Parlemen, terutama oleh fraksi yang mempunyai suara.

~ Kabinet Ekstraparlemen, yaitu suatu kabinet yang pembentukannya

Diluar campur tangan DPR.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
(KTSP)

Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Kelas/Semester : XII/Ganjil
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Materi Pokok : Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 jam pertemuan)

III. STANDAR KOMPETENSI

2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

II. KOMPETENSI DASAR

2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia

III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

2.1.4. Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Negara Indonesia menurut UUD 1945.

2.1.5. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pokok pembelajaran adalah agar siswa mampu :

1. Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Negara Indonesia menurut UUD 1945
2. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945

V. MATERI AJAR

5. Sistem Pemerintahan Di Indonesia
6. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah dan Sebelum Amandemen UUD 1945

VI. METODE PEMBELAJARAN

Ceramah bervariasi dengan tanya jawab.

VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No.	Kegiatan Belajar	Waktu (Menit)	Aspek <i>lifeskill</i> yang dikembangkan
1.	Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa	15'	- Disiplin - Kerja sama - Keterampilan
2.	<p>▪ Kegiatan Inti</p> <p>📖 Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Negara Indonesia menurut UUD 1945➤ Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan <p>📖 Elaborasi Dalam kegiatan elaborasi,</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Berdiskusi mengenai makna sistem pemerintahan Negara Indonesia➤ Diskusi Kelompok tentang sistem pemerintahan Negara Indonesia.➤ Guru menugaskan siswa untuk menjelaskan sistem pemerintahan Negara Indonesia <p>📖 Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui➤ Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.	55'	- Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

3.	Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan	20'	- Pengendalian diri
----	---------------------------------------------------	-----	---------------------

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

➤ MEDIA BELAJAR

5. Power Point.
6. Video.

➤ SUMBER BELAJAR

7. Buku Paket PKn Kelas XII dan Lembar Kerja Siswa.
8. UUD 1945 yang Telah Diamandemen.
9. Buku lain yang relevan.

VIII. PENILAIAN HASIL BELAJAR

5. Penilaian Kognitif
 - a. Tes Tertulis Pilihan Objektif
 - b. Tes Tertulis Uraian
6. Penilaian Afektif

Yogyakarta, 2016

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa

Aspiyah, S.Pd

NIP. 19710813 200502 2 003

Ririn Wulandari

NIM 13401241051

Lampiran

MATERI AJAR

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku Di Indonesia

Perkembangan Ketatanegaraan dapat dibagi menjadi beberapa periode, sejak masa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Walaupun sebenarnya tonggak ketatanegaraan Indonesia telah ada jauh sebelum proklamasi. Secara formal periode perkembangan ketatanegaraan itu dapat dirinci sebagai berikut :

periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

periode berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

periode berlakunya kembali UUD 1945 (5 Juli 1959- sekarang). Pada periode ini pun terbagi menjadi beberapa periode :

periode Orde lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)

periode Orde baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998)

Periode Reformasi (21 Mei 1998-sekarang)

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : X MIPA
Hari/ Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

1. Soal terdiri dari dua kode A dan kode B dengan bentuk soal yakni uraian
2. Jawaban soal boleh tidak urut sesuai nomor.
3. Teliti kembali jawaban anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
4. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
5. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri!

Kode Soal A:

1. Apa pengertian dari kekuasaan negara menurut pendapat Anda?
2. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke !
3. Kekuasaan negara oleh John Locke mendapat kritik dan disempurnakan oleh Montesquieu dengan gagasannya yang dikenal dengan *trias politica*. Jelaskan perbedaan konsep kekuasaan negara menurut John Locke dengan Montesquieu yang Anda ketahui !
4. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan secara **horizontal** di Indonesia beserta lembaga pemegang kekuasaannya !
5. Kementrian adalah salah satu contoh lembaga dari kekuasaan vertikal yang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Sebutkan fungsi dari kementrian !
6. Jelaskan hubungan antara kementrian dengan Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian (LPNK) !
7. Berikan contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Setiap sila minimal 3 contoh.

Baca kasus di bawah ini dengan seksama !

JAKARTA,(PR).- Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) pada empat kementerian/lembaga. Presiden RI Joko Widodo membacakan empat kementerian/lembaga itu agar diingat sebagai catatan perbaikan pada tahun berikutnya. Empat kementerian/lembaga tersebut yakni pertama, Kemensos, kedua, Kemenpora, ketiga Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan keempat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam LHP-LKPP ini, sebanyak 56 Kementerian/Lembaga memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 26 Kementerian/Lembaga memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) serta 4 Kementerian/Lembaga berpredikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan tahun lalu ada 7 kementerian/lembaga yang berpredikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yakni Ombudsman RI, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik RRI, dan TVRI. Dalam menyikapi LHP-LKPP ini, kata Jokowi, bukan pada predikat yang diraih, tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan dan pembenahan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara di tahun berikutnya.

8. Pada kasus diatas adakah lembaga yang masuk dalam klasifikasi pembagian kekuasaan negara secara horizontal? Sebutkan dan jelaskan !
9. Sebutkan Kementerian Negara yang dapat Anda temukan pada kasus di atas !
10. Berdasarkan pada kasus tersebut, menurut Anda, apakah 4 Kementerian/Lembaga yang berpredikat TMP tahun 2016 sudah mencerminkan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara? Jelaskan !

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X
Hari/ Tanggal : Senin , 22 Agustus 2016
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

1. Soal terdiri dari dua kode A dan kode B dengan bentuk soal yakni uraian
2. Jawaban soal boleh tidak urut sesuai nomor.
3. Teliti kembali jawaban Anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
4. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
5. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri!

Kode Soal B :

1. Apa pengertian dari kekuasaan negara menurut pendapat Anda?
2. Jelaskan teori *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu !
3. Apakah Indonesia menganut teori yang dikemukakan oleh Montesquie secara murni ? Jelaskan argumentasi Anda !
4. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan secara **vertikal** di Indonesia beserta lembaga pemegang kekuasaannya !
5. Kementrian adalah salah satu contoh lembaga penting dalam pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Sebutkan tugas dari kementrian !
6. Jelaskan hubungan antara kementrian dengan Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian (LPNK) !
7. Berikan contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Setiap sila minimal 3 contoh.

Baca kasus di bawah ini dengan seksama !

JAKARTA,(PR).- Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) pada empat kementerian/lembaga. Presiden RI Joko Widodo membacakan empat kementerian/lembaga itu agar diingat sebagai catatan perbaikan pada tahun berikutnya. Empat kementerian/lembaga tersebut yakni pertama, Kemensos, kedua, Kemenpora, ketiga Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan keempat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam LHP-LKPP ini, sebanyak 56 Kementerian/Lembaga memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 26 Kementerian/Lembaga memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) serta 4 Kementerian/Lembaga berpredikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan tahun lalu ada 7 kementerian/lembaga yang berpredikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yakni Ombudsman RI, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik RRI, dan TVRI. Dalam menyikapi LHP-LKPP ini, kata Jokowi, bukan pada predikat yang diraih, tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan dan pembenahan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara di tahun berikutnya.

8. Pada kasus diatas adakah lembaga yang masuk dalam klasifikasi pembagian kekuasaan negara secara horizontal? Sebutkan dan jelaskan !
9. Sebutkan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang dapat Anda temukan pada kasus di atas !
10. Berdasarkan pada kasus tersebut, menurut Anda, apakah 4 Kementerian/Lembaga yang berpredikat TMP tahun 2016 sudah mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara? Jelaskan !

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : X
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2016
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

6. Soal terdiri dari dua kode A dan kode B dengan bentuk soal yakni uraian
7. Jawaban soal boleh tidak urut sesuai nomor.
8. Teliti kembali jawaban anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
9. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
10. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri!

Kode Soal B:

11. Apa pengertian dari kekuasaan negara menurut pendapat Anda?
12. Kekuasaan negara oleh John Locke mendapat kritik dan disempurnakan oleh Montesquieu dengan gagasannya yang dikenal dengan *trias politica*. Jelaskan perbedaan konsep kekuasaan negara menurut John Locke dengan Montesquieu yang Anda ketahui !
13. Bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia apakah sama dengan teori pembagian kekuasaan oleh John Locke dan Montesquieu ? jelaskan!
14. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan secara **horizontal** di Indonesia beserta lembaga pemegang kekuasaannya !
15. Kementrian adalah salah satu contoh lembaga dari kekuasaan vertikal yang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Sebutkan tugas dari kementrian !
16. Jelaskan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Republik Indonesia serta berikan minimal 5 contoh dari LPNK!
17. Jelaskan pengertian dari nilai yang anda ketahui!
18. Berikan contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Setiap sila minimal 3 contoh.

Baca kasus di bawah ini dengan seksama !

JAKARTA,(PR).- Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) pada empat kementerian/lembaga. Presiden RI Joko Widodo membacakan empat kementerian/lembaga itu agar diingat sebagai catatan perbaikan pada tahun berikutnya. Empat kementerian/lembaga tersebut yakni pertama, Kemensos, kedua, Kemenpora, ketiga Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan keempat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam LHP-LKPP ini, sebanyak 56 Kementerian/Lembaga memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 26 Kementerian/Lembaga memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) serta 4 Kementerian/Lembaga berpredikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan tahun lalu ada 7 kementerian/lembaga yang berpredikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yakni Ombudsman RI, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik RRI, dan TVRI. Dalam menyikapi LHP-LKPP ini, kata Jokowi, bukan pada predikat yang diraih, tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan dan pembenahan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara di tahun berikutnya.

19. Pada kasus diatas adakah lembaga yang masuk dalam klasifikasi pembagian kekuasaan negara secara horizontal? Sebutkan dan jelaskan !
20. Berdasarkan pada kasus tersebut, menurut Anda, apakah 4 Kementerian/Lembaga yang berpredikat TMP tahun 2016 sudah mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara? Jelaskan !

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X
Hari/ Tanggal : Rabu , 24 Agustus 2016
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

6. Soal terdiri dari dua kode A dan kode B dengan bentuk soal yakni uraian
7. Jawaban soal boleh tidak urut sesuai nomor.
8. Teliti kembali jawaban Anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
9. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
10. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri!

Kode Soal A :

1. Apa pengertian dari kekuasaan negara menurut pendapat Anda?
2. Jelaskan teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke !
3. Apakah Indonesia menganut teori yang dikemukakan oleh Montesquie secara murni ? Jelaskan argumentasi Anda !
4. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan secara **vertikal** di Indonesia beserta lembaga pemegang kekuasaannya !
5. Kementrian adalah salah satu contoh lembaga penting dalam pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Sebutkan fungsi dari kementrian !
6. Sebutkan klasifikasi kementrian menurut perpres No.7 tahun 2015 beserta contoh kementrian yang ada di dalamnya! (minimal 3 kementrian)
7. Jelaskan hubungan antara kementrian dengan Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian (LPNK) !
8. Berikan contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Setiap sila minimal 3 contoh.

Baca kasus di bawah ini dengan seksama !

JAKARTA,(PR).- Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) pada empat kementerian/lembaga. Presiden RI Joko Widodo membacakan empat kementerian/lembaga itu agar diingat sebagai catatan perbaikan pada tahun berikutnya. Empat kementerian/lembaga tersebut yakni pertama, Kemensos, kedua, Kemenpora, ketiga Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan keempat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam LHP-LKPP ini, sebanyak 56 Kementerian/Lembaga memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 26 Kementerian/Lembaga memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) serta 4 Kementerian/Lembaga berpredikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan tahun lalu ada 7 kementerian/lembaga yang berpredikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yakni Ombudsman RI, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik RRI, dan TVRI. Dalam menyikapi LHP-LKPP ini, kata Jokowi, bukan pada predikat yang diraih, tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan dan pembenahan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara di tahun berikutnya.

9. Pada kasus diatas adakah lembaga yang masuk dalam klasifikasi pembagian kekuasaan negara secara horizontal? Sebutkan dan jelaskan !
10. Berdasarkan pada kasus tersebut, menurut Anda, apakah 4 Kementerian/Lembaga yang berpredikat TMP tahun 2016 sudah mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara? Jelaskan !

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : X
Hari/ Tanggal : Jum'at, 26 Agustus 2016
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

1. Soal terdiri dari dua kode A dan kode B dengan bentuk soal yakni uraian
2. Jawaban soal boleh tidak urut sesuai nomor.
3. Teliti kembali jawaban anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
4. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
5. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri!

Kode Soal A:

1. Apa pengertian dari kekuasaan menurut pendapat Anda?
2. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke !
3. Kekuasaan negara oleh John Locke mendapat kritik dan disempurnakan oleh Montesquieu dengan gagasannya yang dikenal dengan *trias politica*. Jelaskan perbedaan konsep kekuasaan negara menurut John Locke dengan Montesquieu yang Anda ketahui !
4. Bagaimana pembagain kekuasaan di Indonesia apakah sama dengan teori pembagain kekuasaan oleh Montesquieu secara murni? jelaskan!
5. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan secara **horizontal** di Indonesia beserta lembaga pemegang kekuasaannya !
6. Kementrian adalah salah satu contoh lembaga dari kekuasaan vertikal yang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Sebutkan tugas dari kementrian !
7. Jelaskan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Republik Indonesia serta berikan minimal 5 contoh dari LPNK!
8. Jelaskan kedudukan kementrian di Indoneisia?
9. Jelaskan pengertian dari sistem nilai yang anda ketahui!
10. Berikan contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Setiap sila minimal 3 contoh.

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X
Hari/ Tanggal : Jum'at, 26 Agustus 2016
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

1. Soal terdiri dari dua kode A dan kode B dengan bentuk soal yakni uraian
2. Jawaban soal boleh tidak urut sesuai nomor.
3. Teliti kembali jawaban Anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
4. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
5. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri!

Kode Soal A :

1. Apa pengertian dari kekuasaan negara menurut pendapat Anda?
2. Jelaskan pengertian sistem nilai menurut kalian!
3. Sebutkan dan Jelaskan teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu!
4. Apakah Indonesia menganut teori yang dikemukakan oleh Montesquie secara murni ? Jelaskan argumentasi Anda !
5. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan secara **vertikal** di Indonesia beserta lembaga pemegang kekuasaannya !
6. Kementrian adalah salah satu contoh lembaga penting dalam pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Sebutkan fungsi dari kementrian !
7. Sebutkan klasifikasi kementrian menurut perpres No.7 tahun 2015 beserta contoh kementrian yang ada di dalamnya! (minimal 2 kementrian)
8. Jelaskan hubungan antara kementrian dengan Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian (LPNK) !
9. Sebutkan 3 dimensi tata nilai utama pancasila!
10. Berikan contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Setiap sila minimal 3 contoh.

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : X
Hari/ Tanggal :
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

1. Jawaban soal boleh tidak urut sesuai nomor.
2. Teliti kembali jawaban anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
3. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
4. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri!

Kode Soal B:

1. Apa pengertian kekuasaan menurut pendapat Anda?
2. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu!
3. Apakah Indonesia menganut teori yang dikemukakan oleh Montesquie secara murni ?
Jelaskan!
4. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan secara **horizontal** di Indonesia beserta lembaga pemegang kekuasaannya !
5. Kementrian adalah salah satu contoh lembaga dari kekuasaan vertikal yang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Sebutkan fungsi dari kementrian !
6. Jelaskan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Republik Indonesia serta berikan minimal 4 contoh dari LPNK!
7. Sebutkan klasifikasi kementrian menurut perpres No.7 tahun 2015 beserta kementrian yang didalamnya minimal 1 kementrian!
8. Jelaskan hubungan antara kementrian dengan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) !
9. Jelaskan pengertian dari sistem nilai yang anda ketahui!
10. Berikan contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Setiap sila minimal 3 contoh.

**NASKAH SOAL REMIDIAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

1. Apa pengertian kekuasaan menurut pendapat Anda?
2. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu!
3. Melihat sistem pembagian kekuasaan di Indonesia apakah Indonesia menganut teori yang dikemukakan oleh Montesquieu secara murni atau tidak? Jelaskan!
4. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan secara **horizontal dan Vertikal** tersebut di Indonesia beserta lembaga pemegang kekuasaannya!
5. jelaskan Fungsi dan tugas dari kementerian!
6. Sebutkan pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kementerian serta jelaskan kedudukan kementerian di Indonesia.
7. Jelaskan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Republik Indonesia serta berikan minimal 10 contoh dari LPNK!
8. Sebutkan klasifikasi kementerian menurut perpres No.7 tahun 2015 beserta kementerian yang didalamnya minimal 3 kementerian!
9. Berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Setiap sila minimal 3 contoh.
10. Jelaskan perbedaan tingkatan pada lembaga tinggi negara di Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen UUD NKRI 1945!

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : XII
Hari/ Tanggal : Sabtu, 10 September 2016
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

11. Jawaban soal **boleh** tidak urut sesuai nomor.
12. Teliti kembali jawaban anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
13. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
14. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri! 😊 😊 😊

😊😊SOAL😊😊!!!

1. Jelaskan pengertian sistem pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit!
2. Jelaskan Bentuk pemerintahan menurut teori Polybios!
3. Sebutkan dan jelaskan bentuk pemerintahan menurut teori moderen !
4. Sebutkan kelemahan dan kelebihan dari sistem pemerintahan **presidensil** !
5. Sebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan **parlementer** !
6. Jelaskan jenis parlementer dibawah ini beserta contoh negara yang menggunakannya.
 - a. Unikameral
 - b. Bikameral
7. Sebutkan dan jelaskan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan dari negara dibawah ini:
 - a. Inggris
 - b. Amerika Serikat
 - c. Indonesia
8. Sebutkan dua faktor bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan yg dianut oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikan Contohnya !

**NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN I
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : XII
Hari/ Tanggal :
Waktu : 2 x 45 menit

Petunjuk Umum:

15. Jawaban soal **boleh** tidak urut sesuai nomor.
16. Teliti kembali jawaban anda secara cermat sebelum dikumpulkan.
17. Setelah mengerjakan, soal dikembalikan kepada guru.
18. Berdoa dan selamat mengerjakan dengan percaya pada kemampuan diri sendiri! 😊 😊 😊

😊😊SOAL😊😊!!!

9. Jelaskan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit!
10. Sebutkan dan jelaskan bentuk pemerintahan menurut Aristoteles !
11. Sebutkan dan jelaskan bentuk pemerintahan menurut teori moderen !
12. Sebutkan cirri-ciri dari sistem pemerintahan **presidensil** !
13. Sebutkan kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan **parlementer** !
14. Jelaskan jenis parlemen dibawah ini beserta contoh negara yang menggunakannya.
 - c. Unikameral
 - d. Bikameral
15. Sebutkan dan jelaskan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan dari negara dibawah ini:
 - d. Inggris
 - e. Amerika Serikat
 - f. Indonesia
16. Sebutkan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang pernah dianut di Indonesia beserta terjadi pada masa apa!

Kisi-Kisi Ujian Tengah Semester

Materi Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas : XMIPA/IPS

Alokasi Waktu : 90 menit

Jumlah Soal : 40 Butir (pilihan ganda) dan 6 butir (Essay)

No	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator	Bentuk Soal	No Urut Soal
1	<p>KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</p> <p>KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan</p>	<p>3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p>	<p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p> <p>c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>3.1.1. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia</p> <p>3.1.2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen</p> <p>3.1.3. Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p>	Pilihan Ganda	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dan essay no.1</p> <p>8, 9, 10,11,12, 13,14 Dan essay no.2</p> <p>15, 16, 17, 18, 19</p>

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

--

--

--

--

--

	<p>KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.</p>					
2	<p>KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</p> <p>KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,</p>	<p>3.1 Menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p>	<p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia</p>	<p>3.2.1. Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.2.2. Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk</p>	Pilihan Ganda	<p>20, 21, 22,23,24, 25 Dan essay no.3</p> <p>26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Dan essay no.4</p>

<p>kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p> <p>KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,</p>		<p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia</p>	<p>Indonesia</p> <p>3.2.3. Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia</p> <p>3.2.4. Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia</p>		<p>33,34,35 Dan essay no.5</p> <p>36,37, 38, 39, 40 Dan essay no.6</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------

<p>kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p> <p>KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !

- Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara juga dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan ...
 - kekuasaan legislatif
 - kekuasaan eksekutif
 - kekuasaan yudikatif
 - kekuasaan federatif
 - kekuasaan koordinatif
- Teori kekuasaan negara yang dikemukakan oleh John Locke disempurnakan oleh Montesquieu, di mana perbedaan dari teori yang dikemukakan oleh keduanya terletak pada kekuasaan ...
 - Kekuasaan Eksekutif
 - Kekuasaan Yudikatif
 - Kekuasaan Federatif
 - Kekuasaan Eksaminatif
 - Kekuasaan Legislatif
- Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan ...
 - Yudikatif
 - Eksekutif
 - Legislatif
 - Eksaminatif
 - Konstitutif
- Pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatnya atau terbagi beberapa tingkatan dalam suatu pemerintahan merupakan pembagian kekuasaan secara ...
 - Diagonal
 - Horizontal
 - Lurus
 - Vertikal
 - Sejajar
- Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara berada pada kekuasaan ...
 - Kekuasaan Federatif
 - Kekuasaan Konstitutif
 - Kekuasaan Yudikatif
 - Kekuasaan Eksaminatif
 - Kekuasaan Eksekutif
- Kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah ...
 - Membentuk kabinet menteri
 - Membahas rancangan undang-undang APBN
 - Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan APBN
 - Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
 - Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- Kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah ...
 - Membentuk kabinet menteri
 - Membahas rancangan undang-undang APBN
 - Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan APBN
 - Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
 - Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- Berikut ini merupakan fungsi dari kementerian, kecuali ...
 - Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
 - Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
 - Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan
 - Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
 - Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
- Kedudukan Kementrian adalah sebagai berikut...
 - Berada di bawah presiden bertanggung jawab pada DPR
 - berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap presiden.
 - berada di bawah presiden dan bertanggung jawab terhadap parlemen.
 - berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap kabinet.

- e. berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap pre
10. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
- Pasal 12
 - Pasal 17
 - Pasal 21
 - Pasal 23
 - Pasal 27
11. Kedudukan dan fungsi kementerian diatur dalam undang-undang...
- UU No. 17 Tahun 2015
 - UU No. 47 Tahun 2013
 - UU No. 7 Tahun 2015
 - UU No. 17 Tahun 2009
 - UU No. 105 Tahun 2009
12. Berikut ini merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian (LNPK), kecuali ...
- BNI
 - ANRI
 - BKKBN
 - BUMN
 - LIPI
13. Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi adalah jenis kementerian yang masuk dalam klasifikasi kementerian...
- Kelompok I
 - Kelompok II
 - Kelompok III
 - Kemertrian koordinator
 - Kementerian nomenklatur
14. Kementran yang berada dalam klasifikasi kelompok III adalah...
- Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Kementerian Pertahanan
 - kementerian agama
 - kementerian hukum dan hak asasi manusia
 - kementerian Koordinator bidang perekonomian
15. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berikut ini merupakan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, kecuali ...
- Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
 - Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
 - Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
 - Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
 - Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
16. Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama yaitu...
- Dimensi Spiritual , Dimensi kultural, Dimensi institusional
 - Dimensi Spiritual , Dimensi Parktis, Dimensi institusional
 - Dimensi Spiritual , Dimensi parktis, Dimensi konstitusi
 - Dimensi Spiritual , Dimensi kultural, Dimensi konstitusi
 - Dimensi konstitusi , Dimensi kultural, Dimensi parktis
17. Perhatikan data di bawah ini :
- (1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan
 - (2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
 - (3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
 - (4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
- Berdasarkan data diatas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ...
- 2 dan 4
 - 1 dan 3
 - 1 dan 4

- d. 1 dan 2
e. 3 dan 4
18. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ...
- Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
 - Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
 - Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap peri kehidupan.
 - Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
19. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, kecuali ...
- Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
 - Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
 - Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
 - Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolut
 - Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan
20. Batas suatu negara dapat berupa batas Alami yaitu seperti di bawah ini kecuali ...
- Palung, sungai, hutan,patok
 - Tembok, selat, sungai, pohon
 - Pohon, raffia, fikiran, hidup
 - Sungai, hutan, gunung, pager berduri
 - Sungai, gunung, hutan, pohon
21. Masyarakat internasional sejak tahun 1982 telah menggunakan UNCLOS sebagai landasan hukum laut. Apa kepanjangan dari Unclos....
- Under Nation Conventioan in Law On the Sea*
 - United Nations Convention on the Law of the Sea*
 - United Nations Convention the Law on the Sea*
 - Under Nations Convention in the Law Ocean and the Sea*
 - United Nations Convention in the Law Ocean and the Sea*
22. Garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas, disebut zona ...
- Zona Ekonomi Eksklusif
 - Zona Laut Teritorial
 - Zona Landas Kontinen
 - Zona Laut Lepas
 - Zona Kelautan
23. Garis yang ditarik dari bibir pantai pulau terluar sejauh 200 mil laut, di mana kekayaan yang berada di dalam perairannya meupakan kekayaan Indonesia, disebut ...
- Zona Ekonomi Eksklusif
 - Zona Laut Teritorial
 - Zona Landas Kontinen
 - Zona Laut Lepas
 - Zona Kelautan
24. Wilayah darat Indonesia di sebelah Timur berbatasan langsung dengan negara...
- Timur Leste
 - Papua Nuginie
 - Malaysia
 - Brunei Darussalam
 - Singapura
25. Wilayah darat Indonesia di sebelah Utara berbatasan langsung dengan wilayah darat negara...
- Timur Leste
 - Papua Nuginie
 - Malaysia
 - Thailand
 - Jepang
26. Orang yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan ...
- Penduduk
 - Orang asing
 - Warga negara
 - Bukan penduduk
 - Bukan warga negara

27. Stelsel yang menyatakan bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila mengajukan permohonan dan melakukan tindakan hukum tertentu adalah ...
- Ius soli
 - Stelsel aktif
 - Stelsel pasif
 - Naturalisasi
 - Ius Sanguinis
28. Hak yang dimiliki warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif) dinamakan ...
- Ius soli
 - Hak opsi
 - Hak repudiasi
 - Naturalisasi
 - Ius sanguinis
29. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, adalah asas ...
- Hak opsi
 - Ius soli
 - Hak repudiasi
 - Naturalisasi
 - Ius sanguinis
30. Seorang bernama B berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis, kemudian melahirkan anak di negara yang menganut asas ius soli. Dengan demikian, status kewarganegaraan anak tersebut adalah ...
- Ius soli
 - Apatride
 - Bipatride
 - Ius sanguinis
 - Naturalisasi
31. Menurut UU Nomor 12 tahun 2006, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah, kecuali ...
- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
 - Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
 - Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
 - Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
 - Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah.
32. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan ...
- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
 - Tidak menolak kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
 - Secara sukarela menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
 - Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
 - Mempunyai paspor atau surat tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain
33. Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimana hal tersebut ditegaskan dalam pasal ...
- Pasal 25
 - Pasal 26
 - Pasal 27
 - Pasal 28
 - Pasal 29
34. Dalam membangun kerukunan umat beragama, di Indonesia mengenal konsep ...
- Tri kerukunan umat beragama
 - Tri kemakmuran umat beragama

- c. Tri kehidupan umat beragama
 - d. Tri keserasian umat beragama
 - e. Tri keselarasan umat beragama
35. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut, kecuali...
- a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
 - b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
 - c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
 - d. Adanya sikap pemerintah yang mengarahkan pada agama tertentu, dalam mencapai persamaan agama.
 - e. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya
36. Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga ...
- a. Stabilitas ekonomi
 - b. Stabilitas politik
 - c. Stabilitas nasional
 - d. Stabilitas budaya
 - e. Stabilitas sosial
37. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ...
- a. Kekuatan utama sistem keamanan
 - b. Kekuatan utama sistem pertahanan
 - c. Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
 - d. Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
 - e. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan
38. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, *illegal fishing* merupakan salah satu ancaman terhadap...
- a. Patriotisme
 - b. Kedaulatan negara
 - c. Ketenteraman negara
 - d. Keamanan Indonesia
 - e. Pertahanan Indonesia
39. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ...
- a. Menjadi prajurit TNI/Polri
 - b. Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - c. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - d. Mengikuti olimpiade fisika, matematika, dan kimia di luar negeri
 - e. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
40. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian ...
- a. Bela negara
 - b. Sistem bela negara
 - c. Pertahanan negara
 - d. Sistem keamanan nasional
 - e. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

Soal Essay

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia dibawah ini beserta lembaga yang memegang kekuasaan tersebut
 - a. pembagian kekuasaan secara **Vertikal**
 - b. pembagian kekuasaan secara **horizontal**
2. Jelaskan serta berikan contoh lembaga dibawah ini:
 - a. Fungsi dan kedudukan kementerian
(5 contoh kementerian)
 - b. Pengertian dari lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) beserta minimal 5 LPNK yang anda ketahui
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial beserta minimal 2 contoh wilayah ekstrateritorial!
4. Jelaskan mengenai 2 macam naturalisasi di Indonesia sebagai berikut:
 - a. Naturalisasi Biasa
 - b. Naturalisasi Istimewa
5. Sebutkan trikerukunan umat beragama di Indonesia!
6. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Sebutkan ciri-ciri dari sifat semesta ini!

KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA PPKn

1	B	11	C	21	B	31	E
2	C	12	D	22	B	32	E
3	B	13	B	23	A	33	E
4	D	14	A	24	B	34	A
5	D	15	E	25	C	35	D
6	A	16	A	26	C	36	C
7	A	17	A	27	B	37	D
8	C	18	E	28	B	38	B
9	B	19	D	29	E	39	C
10	B	20	E	30	C	40	A

Soal Essay

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan dan jelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia dibawah ini beserta lembaga yang memegang kekuasaan tersebut
 - a. pembagian kekuasaan secara **Vertikal**
 - b. pembagian kekuasaan secara **horizontal**
2. Jelaskan serta berikan contoh lembaga dibawah ini:
 - a. Fungsi dan kedudukan kementerian
(5 contoh kementerian)
 - b. Pengertian dari lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) beserta minimal 5 LPNK yang anda ketahui
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial beserta minimal 2 contoh wilayah ekstrateritorial!
4. Jelaskan mengenai 2 macam naturalisasi di Indonesia sebagai berikut:
 - a. Naturalisasi Biasa
 - b. Naturalisasi Istimewa
5. Sebutkan trikerukunan umat beragama di Indonesia!
6. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Sebutkan ciri-ciri dari sifat semesta ini!

KUNCI JAWABAN

1.

- a. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Contoh dalam kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) dari presiden sebagai tikantang yang tinggi kemudian ke bawah ada gubernur dibawahnya ada bupati/walikota kemudian yang terakhir di tingkat Desa.
- b. Pembagian kekuasaan secara horizontal Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga lembaga negara yang sederajat. klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

- 1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undangundang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden.
 - 3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undangundang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - 4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
 - 5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BK)
 - 6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia.
2. fungsi dan kedudukan kementerian.

Fungsi kementerian fungsiperumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Kedudukan kementerian adalah berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap presiden.

Contoh:

- 1) Kementerian koordinator bidang politik , hukum dan keamanan
- 2) Kementerian koordinator bidang perekonomian
- 3) Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- 4) Kementerian koordinator bidang kemaritiman
- 5) Kementerian dalam negeri

- 6) Kementerian luar negeri
 - 7) Kementerian Pertahanan
 - 8) kementerian agama, hukum dan hak asasi manusia, keuangan, pendidikan dan kebudayaan, kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi, kementerian kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, perindustrian, dst.
3. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain, kapal perang Indonesia, dll.
 4.
 - a. naturalisasi biasa atau Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara.
 - b. Naturalisasi istimewa atau Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 5. Di negara kita mengenal konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
 6. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.
 - a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
 - b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
 - c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

DAFTAR NILAI SISWA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
 Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/Program : X/MIPA 3
 Semester : Gasal
 Tahun : 2016/2017

No	NAMA PESERTA	L/P	Tugas Terstruktur				UH 1	
			1	2	3	4	Mula-mula	Remedial
1	Abdu Rasyid hakim	L	C	A-			85.5	
2	Alifa Sri Fadilah	P	A	A-			88	
3	Alliyssa Azahra	P	C	A-			84	
4	Alma Wildya Arista	P	C+	A-			91.5	
5	Astri Nur Indahsari	P	B-	A-			98	
6	Bagas Gilang Ananta	L	B-	A-			95	
7	Cheria Annisa Sholikhati	P	B-	A-			79	
8	Destara Kusuma	P	A	A-			81	
9	Dian Famela	P	A	A-			87	
10	Dimas Binatang D	L	A	A-			60	59
11	Dimas jati W	L	C+	A-			93	
12	Dinda aurora	P	B-	A-			82.5	
13	dwi Sakti B	L	A	A-			85.5	
14	Dyo Risky Almariby	L	C	A-			76	
15	Faishal irfan	L	A	A-			75	
16	Faris taufiq A	L	B-	A-			75.5	
17	Fauzan Dary Muhammad	L	A	A-			75	
18	Gendihis Mahesti H	P	B-	A-			94	
19	Indana Zahrotul Aini	P	C	A-			86	
20	Kesdik Kusuma Artisfa Bakti	L	A	A-			85	
21	Mahardika Rasendriya	L	A	A-			64.5	86
22	Muhammad Dimas Bathaqi	L	B-	A-			80	
23	Muhammad Iqbal Bima Sakti	L	B-	A-			82.5	

24	Muhammad Naufal Fairas	L	A	A-			81.5	
25	Naftali Rafel Lucas	P	B-	A-			86.5	
26	Nastiti Safa Radya R	P	C+	A-			92	
27	Nurul Laila K P	L	C+	A-			90.5	
28	Owena Zaneta Yogaswari	P	C	A-			86	
29	Rahma Elfriasari	P	C	A-			82.5	
30	rayhan Arroyan S	L	B-	A-			90	
31	Rifki Hanan M	L	C+	A-			73	61
32	Risti Rahmatul Husna	P	A	A-			98.5	
33	Rynissa Zahrani	P	A	A-			85.5	
34	Salsabila Widya Kirana	P	B-	A-			83	
35	Sangkala Thesda kenanga	P	C+	A-			75	
36	Shabrina myra vania	P	B-	A-			83.5	
Jumlah Peserta Tes		36				Jumlah Nilai	3,011	
Jumlah Yang Tuntas		33				Nilai Tertinggi	98.5	
Jumlah Yang Belum Tuntas		3				Nilai Terendah	60	
Presentase Peserta Tuntas		92%				Nilai Rata-Rata	84	
Presentase Peserta Belum Tuntas		8%						

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 13 September 2016
Mahasiswa

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIM 13401241041

DAFTAR NILAI SISWA

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Semester
Tahun

: SMA Negeri 10 Yogyakarta
: PPKn
: X/MIPA 4
: Gasal
: 2016/2017

No	NAMA PESERTA	L/P	Tugas Terstruktur					UH 1	
			1	2	3	4	Mula-mula	Remedial	
1	Affan Haris Ramadhan	L	A	A-	A	A	70	77.5	
2	Alfiya Azahrani	P	A	A	B+	A	68	90	
3	Anisa Bala	P	A	A	A-	A	91.5		
4	Annisa Amalia Putri Pratama	P	B	A	A	A	63.5	81	
5	A. Rafelito Marsadio	L		A-	A		57.5		
6	Don Rui Tornado	L	B	A-			68.5	85	
7	Fadhien Ramadhan H	L	A	B+	A		57.5	88.5	
8	Fannijara Enggar Larasati	P	B	A		A	82		
9	Fariz Jordan	L	A	A-	A-		79		
10	Filda Fikri Faizal M	L	A	A-	B+	A	71	78.5	
11	Gunawan Chandra Pradita	L	B	A-	A		57.5	83.5	
12	Ikhسان Aditya Nuur Q	L	B	A		A	79.5		
13	Irma anindya Budiarti	P	A	A-	A		77		
14	Kafi Madana Sahadewa	L	A		A		53	75	
15	Khairunnisa Afdayani	P	A	A	A		92		
16	Marcella Citra Amaranngana	P	A	A	A		90.5		
17	Mehza Refliyang	L	A	A	B+	A	75		
18	Muhammad Ari Dhamawan	L	A	B+	A-		72.5	77.5	
19	Muhammad Fauzan Acyuto	L					71	78	
20	Muhammad Rafli Raharjo	L	A	A			72		
21	Muhammad Rendy Razak S.P	L	A	B+	B+		70	78	
22	Nurina Salsabila	P	A	A-	A		46	88	

23	RM. Muhammad Fadhilah Dafifa F	L	A	A-	A		63	
24	Rika Ardania	P	B	A	A	A	87.5	
25	Rizka Putri Dwicahyani	P	A	A			66.5	91
26	Salsabila Oktaviani Hutomo Putri	P	A	A	A		73	91
27	Saniara Azka Wahyu Santoso	P	A				81	
28	Sekar Ayu Mayangsari	P	A	A	A-	A	50	73
29	Shata Putri Shintania	P	A	A	A		79.5	
30	Sheilla Sara Yasmine	P	A	A-	B+		85	
31	Shendy Wijaya	L	A	A			79.5	
32	Tissa Farikha	P	A	A	A-		76.5	
33	Weka NariSwari J H D	P	A	A			88.5	
34	Zahra Seruni Ramadhani	P	A	A	A	A	60	87
35	Zukhrufā Puspita Wisaksana	P	A	A	A		76.5	
	Jumlah Peserta Tes					Jumlah Nilai	2,531	
	Jumlah Yang Tuntas					Nilai Tertinggi	92	
	Jumlah Yang Belum Tuntas					Nilai Terendah	46	
	Presentase Peserta Tuntas					Nilai Rata-Rata	72	
	Presentase Peserta Belum Tuntas							
							54%	

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 13 September 2016
Mahasiswa

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIM 13401241051

DAFTAR NILAI SISWA

Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 10 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: PPKn

Kelas/Program

: X/IPS 1

Semester

: Gasal

Tahun

: 2016/2017

No	NAMA PESERTA	L/P	Tugas Terstruktur				UH 1	
			1	2	3	4	Mula-mula	Remedial
1	Agung nugrahatama	L	A				68	65
2	Anaziah Saputri	P	A				67	83
3	Arbasinta Adhiningtyas	P	A			A-	80	
4	Arum Putri Pratiwi	P	B			A-	87	
5	Aura Mutiara Khansa	P	B			A-	81	
6	Azel Halim Pratama	L	A-				56	80
7	Daniel Kalis Jati Murti	L	A-				76	
8	Desti Nurrahmawati	P	A				77	
9	Devika Tiara Putri P	P	A				90.5	
10	Dimas Novyade	L	B				78.5	
11	Elisabeth P M	P	A-				75	
12	Fadhila Luthfi Salsabila C	P	A				90	
13	Fahmie Dienurasyid Al-Fordausy	P	A				68	
14	Farah Ayu I	P	A				80	
15	Fuji Moritasshari	P	A				75	
16	Gusti Made Ngunrah Y D	L	A				72.5	83
17	Julisa Tiyastuti Ekasari	P	A			A-	86	
18	Lutfan Qasnal A	L	A				59	65
19	Maria Lintang Ning Ratri	P	A-				71	91.5
20	M Kevinza N A A	L	B				62.5	
21	M. Rafi Ardian S	L	A				76.5	
22	Mutiara Kusuma Putri D	P	A-				90.5	
23	Nur hanifah	P	A				88	

24	Primitiva Dyah Ayu C S L	P	A			75	
25	Tasya Nabila Putri	P	A			76	
	Jumlah Peserta Tes	25				1,906	
	Jumlah Yang Tuntas	17				90.5	
	Jumlah Yang Belum Tuntas	8				56	
	Presentase Peserta Tuntas	68%				76	
	Presentase Peserta Belum Tuntas	32%					

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 13 September 2016
Mahasiswa

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIM 13401241051

DAFTAR NILAI SISWA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
 Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/Program : XII/MIPA 3
 Semester : Gasal
 Tahun : 2016/2017

No	NAMA PESERTA	L/P	Tugas Terstruktur		Mula-mula	UH 1		Keaktifan
			1	2		Remedial		
1	AFSA FAUZATIN NABILLAH		A	A	86			
2	DEWI RAHMAMATI SUCI RAMADHANI		B+		89			
3	MUHAMMAD IQBAL HADIWIBOWO		A	A-	87			
4	NIARNA LUSI			B+	79			
5	PUTU ALIT SUMANDHIKA			A-	96			
6	RAMSES CANIAGO		A-	B+	88			
7	ANASTASIA VALYA MIROKU BONE		A	A-	97.5			
8	ANTONIUS VIDARTA MALL		A	B+	88.5			
9	AUFA ROFINO DESVYANTAKA		A	B+	76			
10	BLASIA TYAS UNADIKA		A	A	87			
11	CHAULA CHOLILI SOFIA		A	A-	83			
12	FIRDAUS ARAFAT		A-	A	86.5			
13	KHOIROSI ALI JANADIAN		B+	B+	68			
14	MYRNA CRISTANTO		A	A-	82.5			
15	NURFAIZI		A	A	88			
16	TITI NUR RACHMAH		A	A	87			
17	TITTO ARROIS DARIANSYAH		A	B+	86			
18	AMALIA IZZAH ROJABI		A	A	82			
19	ANNISA DEWI HENDRIANY		B+		89			
20	KHOIRUNISA NUR ALFIANA		A	A	92.5			
21	ZAHRAH NANDYA PURWINITA		B+	A	77			
22	ALIFA AMMATULLAH MADANIAH		A	B+	90			

23	ANNA JULIE CHANDRA PRIHARYANTO	A	A-	90	
24	ARYO DAMAR WASESO	B+	B+	87	
25	BAHARRUDIN PURBAHANGGITA	A-	B+	84	
26	CLARISSA HELGA AURELYA	A	A-	91	
27	CLARISSA INTAN MAYLANI PUTRI		A-	76	
28	SKOLASTIKA SARAH DEVINA D	A-	B+	82	
29	ANASTASIA DEA PUSPITA	B	A	77	
30	DHAMAR ADJI KINTOKO	A	B+	82	

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 15 September 2016
Mahasiswa

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIM 13401241051

DAFTAR NILAI SISWA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Program : XII/MIPA 3
Semester : Gasal
Tahun : 2016/2017

No	NAMA PESERTA	L/P	Tugas Terstruktur		UH 1	Keaktifan
			1	2		
1	CINTYA HAPSARI MAHADHIKA		A	A-	91	
2	DEWI SARAH		B+		79	
3	DIAN PUSPITA SARI		A	A	91	
4	DIANA ROFI HAMIDAH			A-	85	
5	HENRICH FERGAN LIZARAZU			B+	88	
6	INITAN NUR PRAVESTRI		A-	A	83	
7	MUHAMMAD RIVANA BACHARIA PUTRA		A	A	91	
8	NADIA KUSUMA VALENTINA		A	A	96.5	
9	THIAS DWI UTAMI		A	A	92	
10	VICKY OCTAVIANINGTYAS SUGHARTO		A		82	
11	WILDAN HHSAN F		A	A	82	
12	AHMAD NUR MUJAHIDIN		A-	A	86	
13	ALIF RIZKYANSYAH		B+	A	86	
14	AVIOLA NURUL MAMORA		A	A-	87	
15	DESYNTHA RISMANINGTYAS		A	A	90	
16	DIMAS SAMODRA BIMAPUTRA		A	B+	85	
17	KURNIA CAHYA SAFITRI		A	A	90	
18	TRIADI WIGAKSANA		A	B+	83.5	
19	GUSTIAN BIMA ARGA		B+	A-	73	
20	RIZKI DANDY IRAWAN		A	B+	77	
21	RYVELLA YURIKO ZHAREFANI		B+	A-	86	
22	ADILAH RAHMI NASHUHA		A	A-		

23	CLARISSA HAYU KARUNIACAHYA	A		85	
24	ERLIN RENSJANAWATI	B+		89	
25	GIEDA MYRILLA CHARITY	A-	A-	89	
26	IZZA QORINA	A	A	91	
27	NAUFAL FARREL DISAMORA ARYA P		A	79	
28	NAUFAL HELMY PRADIPTA	A-	A	91	
29	RIZKY FAUZI	B		83	
30	TAUFAN SEPTIANTO	A	A	83	

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 15 September 2016
Mahasiswa

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIM 13401241051

DAFTAR NILAI SISWA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
 Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/Program : XII/IPS
 Semester : Gasal
 Tahun : 2016/2017

No	NAMA PESERTA	L/P	Tugas Terstruktur		Mula-mula	UH 1		Keaktifan
			1	2		Remedial		
1	HARYU DARMAETI			A-				
2	MUHAMMAD KHALIFAH SUNNATULLAH			B+				
3	JUAN MARIO RUMKOREM			B+				
4	SISILIA POETRI			B+				
5	CAHYO EKO AJI PRAMONO			A-				
6	DEWI MURTI WIJAYANTI			B+				
7	KARISMA NURUL HIDAYAH			B+				
8	MELVANY WULANDARI			B+				
9	ADI SETIAWAN			A-				
10	ANANYA LAOCTADUFA ANNETI			A-				
11	ANNIDA VIVY KHANIFA			B+				
12	ANNISA SALSABILA RAMADHANI							
13	AVIN RAMA SETYAWAN							
14	CLAUDIA AURORA			B+				
15	DENISA ANANDA HERKUMARA			A-				
16	DINO SATRIA SIAMBODO ARDRYONO			A-				
17	FAISAL HERMANSYAH			B+				
18	HENNY PAMUNGKAS			A-				
19	INTAN AMALIA SINTA DEWI			A-				
20	KIRANA ENDIANI RUKMANTARSA			B+				
21	LINTANG NURALITA			A-				
22	MAHIDIYATUN NASIKHAH			B+				

23	MEINETRI			B+	86	
24	MICHELA THEA WIJAYA				92	
25	MITA RACHMA RISWANTIKA			B+	75	
26	MUHAMMAD FARHAN AKMAL			B+	92	
27	MUHAMMAD RIZKY APRILIANTO			B+	77.5	
28	NUR AZIZAH RAMADHANI			B+	92	
29	NURHAIDA KUSUMAWATI				85	
30	PRIBADI TIAS FITRI			A-		
31	RAMADHANI AINAYYA GIHAR			A-	93	
32	ROBI ANDRIANSYAH HARAHAP			A-		
33	SALMA NUHA LATHIFAH				94.5	
34	SHANIA ANDRIANA			A-	99	
35	THERESIA CARMELITANA LOYWEA			B+	97	
36	VANIA DARANGGAR			A-	87	
37	VERANDA WAHYU MEGAWATI KUSUMANUNGRUM			A-	87.5	

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 15 September 2016
Mahasiswa

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIM 13401241051

ANBUSO

**(KELAS X MIPA 3, X
MIPA 4, X IPS 2,
ULANGAN SUSULAN)**

AnBuso 4.41

© 2011-2012 by Ali Muhson

IDENTITAS

(Hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus tetapi **tidak boleh memindah isi data atau menggunak**

Data Umum	Kolom Pengisian
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 10 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program	X/MIPA 4
Nama Tes	Ulangan Harian
SK/KD	Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan
Nama Guru	Ririn Wulandari
NIP	13401241051
Semester	Gasal
Tahun Pelajaran	2016/2017
Tanggal Tes	24 Agustus 2016
Tanggal Diperiksa	27 Agustus 2016
Nama Kepala Sekolah	Drs. Basuki
NIP Kepala Sekolah	1991012 198903 1 006
Tempat Laporan	Yogyakarta
Tanggal Laporan	30 Agustus 2016
Skala Penilaian (10 atau 100)	100
Nilai KKM	75

Data Soal Pilihan Ganda

Jumlah Alternatif Jawaban (Max 5)	
Skor Benar tiap Butir Soal	
Skor Salah tiap butir soal	
Kunci Jawaban (Max 50 soal)	
Skor Maksimal Pilihan Ganda	
Kemampuan yang Diukur untuk Soal Pilihan Ganda	
Soal Nomor 1	
Soal Nomor 2	
Soal Nomor 3	
Soal Nomor 4	
Soal Nomor 5	
Soal Nomor 6	
Soal Nomor 7	
Soal Nomor 8	
Soal Nomor 9	
Soal Nomor 10	

Soal Nomor 11	
Soal Nomor 12	
Soal Nomor 13	
Soal Nomor 14	
Soal Nomor 15	
Soal Nomor 16	
Soal Nomor 17	
Soal Nomor 18	
Soal Nomor 19	
Soal Nomor 20	
Soal Nomor 21	
Soal Nomor 22	
Soal Nomor 23	
Soal Nomor 24	
Soal Nomor 25	
Soal Nomor 26	
Soal Nomor 27	
Soal Nomor 28	
Soal Nomor 29	
Soal Nomor 30	
Soal Nomor 31	
Soal Nomor 32	
Soal Nomor 33	
Soal Nomor 34	
Soal Nomor 35	
Soal Nomor 36	
Soal Nomor 37	
Soal Nomor 38	
Soal Nomor 39	
Soal Nomor 40	
Soal Nomor 41	
Soal Nomor 42	
Soal Nomor 43	
Soal Nomor 44	
Soal Nomor 45	
Soal Nomor 46	
Soal Nomor 47	
Soal Nomor 48	
Soal Nomor 49	
Soal Nomor 50	

Data Soal Essay

Jumlah Soal (maksimal 10)	10
Skor Maksimal Soal Nomor 1	10
Skor Maksimal Soal Nomor 2	10
Skor Maksimal Soal Nomor 3	10

Skor Maksimal Soal Nomor 4	10
Skor Maksimal Soal Nomor 5	10
Skor Maksimal Soal Nomor 6	10
Skor Maksimal Soal Nomor 7	10
Skor Maksimal Soal Nomor 8	10
Skor Maksimal Soal Nomor 9	10
Skor Maksimal Soal Nomor 10	10
Skor Maksimal Soal Essay	
Skor Maksimal Gabungan	
Kemampuan yang Diukur untuk Soal Essay	
Soal Nomor 1	Pengertian Kekuasaan
Soal Nomor 2	Teori Pembagian kekuasaan
Soal Nomor 3	Teori Pembagian kekuasaan
Soal Nomor 4	Pembagian kekuasaan di Indonesia
Soal Nomor 5	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)
Soal Nomor 6	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)
Soal Nomor 7	Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan
Soal Nomor 8	Identifikasi macam pembagian kekuasaan Indonesia
Soal Nomor 9	Pembagian kekuasaan di Indonesia
Soal Nomor 10	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)

Identitas dan Jawaban Siswa:

(Hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus text)

No	Nama	Jenis Kelamin	Skor Jawaban Siswa Soal Essay											
			Skor Maksimal											
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Abdu Rasyid hakim	L	10.0	10.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	9.5	8.0	8.0
2	Alififa Sri Fadhilah	P	10.0	9.0	10.0	9.0	10.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	8.0	
3	Alliyssa Azahra	P	10.0	10.0	3.0	8.0	10.0	9.5	6.0	9.0	9.5	9.0	9.0	
4	Alma Wildya Arista	P	10.0	10.0	10.0	7.5	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	8.0	
5	Astri Nur Indahsari	P	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	
6	Bagas Gilang Ananta	L	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	9.0	
7	Cheria Annisa Sholikhati	P	10.0	10.0	5.0	10.0	8.0	9.0	6.0	10.0	3.0	8.0		
8	Destiara Kusuma	P	10.0	7.0	3.0	10.0	10.0	10.0	7.0	6.0	10.0	8.0		
9	Dian Famela	P	10.0	10.0	3.0	8.0	10.0	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0		
10	Dimas Binatang D	L	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	9.0	3.0	10.0	0.0	0.0		
11	Dimas jati W	L	10.0	5.0	5.0	10.0	10.0	9.0	7.0	9.0	9.0	8.0		
12	Dinda aurora	P	8.0	10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	9.5	6.0	6.0	8.0		
13	dwi Sakti B	L	10.0	10.0	3.0	9.5	10.0	10.0	3.0	10.0	10.0	8.0		
14	Dyo Risky Almariby	L	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	8.0	3.0	10.0	10.0	8.0		
15	Faishal irfan	L	10.0	10.0	3.0	10.0	10.0	4.0	3.0	9.0	8.0	8.0		
16	Faris taufiq A	L	10.0	10.0	9.5	8.0	3.0	4.0	10.0	3.0	10.0	8.0		
17	Fauzan Dary Muhammad	L	10.0	10.0	3.0	10.0	9.0	7.0	3.0	9.0	6.0	8.0		
18	Gendhis Mahesti H	P												
19	Indana Zahrotul Aini	P	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	4.0	6.0	10.0	10.0	8.0		
20	Kesdik Kusuma Arisfa Bakti	L	10.0	10.0	6.0	9.5	10.0	8.5	10.0	6.0	7.0	8.0		
21	Mahardika Rasendriya	L	10.0	10.0	3.0	10.0	10.0	8.5	0.0	8.0	5.0	0.0		
22	Muhammad Dimas Baihaqi	L	10.0	8.0	9.5	10.0	8.0	7.0	6.0	9.0	5.0	8.0		
23	Muhammad Iqbal Bima Sakti	L	10.0	10.0	5.0	9.0	10.0	10.0	5.0	9.5	6.0	8.0		
24	Muhammad Naufal Fairas	L	10.0	10.0	4.0	7.0	10.0	10.0	8.5	9.0	5.0	8.0		

DAFTAR NILAI SISWA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Nama Tes : Ulangan Harian
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X/MIPA 4
Tanggal Tes : 24 Agustus 2016
SK/KD : Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan

KKM
75

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANGAN
			BENAR	SALAH	SKOR			
1	Abdu Rasyid hakim	L	0	1	0	85.5	85.5	Tuntas
2	Alifia Sri Fadhilah	P				88.0	88.0	Tuntas
3	Alliyssa Azahra	P				84.0	84.0	Tuntas
4	Alma Wildya Arista	P				92.5	92.5	Tuntas
5	Astri Nur Indahsari	P				98.0	98.0	Tuntas
6	Bagas Gilang Ananta	L				95.0	95.0	Tuntas
7	Cheria Annisa Sholikhati	P				79.0	79.0	Tuntas
8	Destiara Kusuma	P				81.0	81.0	Tuntas
9	Dian Famela	P				87.0	87.0	Tuntas
10	Dimas Binatang D	L				62.0	62.0	Belum tuntas
11	Dimas jati W	L				82.0	82.0	Tuntas
12	Dinda aurora	P				82.5	82.5	Tuntas
13	dwi Sakti B	L				83.5	83.5	Tuntas
14	Dyo Risky Almariby	L				86.0	86.0	Tuntas
15	Faishal irfan	L				75.0	75.0	Tuntas
16	Faris taufiq A	L				75.5	75.5	Tuntas
17	Fauzan Dary Muhammad	L				75.0	75.0	Tuntas
18	Gendihs Mahesti H	P						
19	Indana Zahrotul Aini	P				86.0	86.0	Tuntas
20	Kesdik Kusuma Arisfa Bakti	L				85.0	85.0	Tuntas
21	Mahardika Rasendriya	L				64.5	64.5	Belum tuntas
22	Muhammad Dimas Baihaqi	L				80.5	80.5	Tuntas
23	Muhammad Iqbal Bima Sakti	L				82.5	82.5	Tuntas
24	Muhammad Naufal Fairas	L				81.5	81.5	Tuntas
25	Naftali Rafel lucas	P				86.0	86.0	Tuntas
26	Nastiti Saffa Radya R	P				92.0	92.0	Tuntas
27	Nurul Laila K P	L				90.5	90.5	Tuntas
28	Owena Zaneta Yogaswari	P				86.0	86.0	Tuntas
29	Rahma Elfritasari	P				82.5	82.5	Tuntas
30	rayhan Arroyan S	L				90.0	90.0	Tuntas
31	Rifki Hanan M	L				73.0	73.0	Belum tuntas
32	Risti Rahmatul Husna	P				98.5	98.5	Tuntas
33	Rysnissa Zhahrani	P				85.5	85.5	Tuntas
34	Salsabila Widya Kirana	P				83.0	83.0	Tuntas

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANGAN	
			BENAR	SALAH	SKOR				
35	Sangkala Thesda kenanga	P				75.0	75.0	Tuntas	
36	Shabrina myra vania	P				83.5	83.5	Tuntas	
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
		- Jumlah peserta test =	35	Jumlah Nilai =		0	2917	2917	
		- Jumlah yang tuntas =	32	Nilai Terendah =		0.00	62.00	62.00	
		- Jumlah yang belum tuntas =	3	Nilai Tertinggi =		0.00	98.50	98.50	
		- Persentase peserta tuntas =	91.4	Rata-rata =		0.00	83.34	83.34	
		- Persentase peserta belum tuntas =	8.6	Standar Deviasi =		#DIV/0!	7.93	7.93	

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIP 13401241051

HASIL ANALISIS SOAL ESSAY

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Nama Tes : Ulangan Harian
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X/MIPA 4
Tanggal Tes : 24 Agustus 2016
SK/KD : Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
1	0.015	Tidak Baik	0.991	Mudah	Tidak Baik
2	0.100	Tidak Baik	0.950	Mudah	Tidak Baik
3	0.668	Baik	0.594	Sedang	Baik
4	-0.017	Tidak Baik	0.907	Mudah	Tidak Baik
5	0.242	Cukup Baik	0.949	Mudah	Cukup Baik
6	0.177	Tidak Baik	0.819	Mudah	Tidak Baik
7	0.575	Baik	0.637	Sedang	Baik
8	0.250	Cukup Baik	0.879	Mudah	Cukup Baik
9	0.684	Baik	0.813	Mudah	Cukup Baik
10	0.656	Baik	0.796	Mudah	Cukup Baik

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIP 13401241051

MATERI REMIDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Nama Tes : Ulangan Harian
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X/MIPA 4
Tanggal Tes : 24 Agustus 2016
SK/KD : Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan

No	NAMA PESERTA	L/P	MATERI REMIDIAL
1	Abdu Rasyid hakim	L	Tidak Ada
2	Alifia Sri Fadhilah	P	Tidak Ada
3	Alliyssa Azahra	P	Tidak Ada
4	Alma Wildya Arista	P	Tidak Ada
5	Astri Nur Indahsari	P	Tidak Ada
6	Bagas Gilang Ananta	L	Tidak Ada
7	Cheria Annisa Sholikhati	P	Tidak Ada
8	Destiara Kusuma	P	Tidak Ada
9	Dian Famela	P	Tidak Ada
10	Dimas Binatang D	L	Teori Pembagian kekuasaan; Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan; Pembagian kekuasaan di Indonesia; kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementerian (LPNK);
11	Dimas jati W	L	Tidak Ada
12	Dinda aurora	P	Tidak Ada
13	dwi Sakti B	L	Tidak Ada
14	Dyo Risky Almariby	L	Tidak Ada
15	Faishal irfan	L	Tidak Ada
16	Faris taufiq A	L	Tidak Ada
17	Fauzan Dary Muhammad	L	Tidak Ada
18	Gendihs Mahesti H	P	
19	Indana Zahrotul Aini	P	Tidak Ada
20	Kesdik Kusuma Arisfa Bakti	L	Tidak Ada
21	Mahardika Rasendriya	L	Teori Pembagian kekuasaan; Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan; Pembagian kekuasaan di Indonesia; kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementerian (LPNK);
22	Muhammad Dimas Baihaqi	L	Tidak Ada
23	Muhammad Iqbal Bima Sakti	L	Tidak Ada
24	Muhammad Naufal Fairas	L	Tidak Ada
25	Naftali Rafel lucas	P	Tidak Ada
26	Nastiti Saffa Radya R	P	Tidak Ada
27	Nurul Laila K P	L	Tidak Ada
28	Owena Zaneta Yogaswari	P	Tidak Ada
29	Rahma Elfritasari	P	Tidak Ada
30	rayhan Arroyan S	L	Tidak Ada
31	Rifki Hanan M	L	Teori Pembagian kekuasaan; kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementerian (LPNK); Pembagian kekuasaan di Indonesia;

No	NAMA PESERTA	L/P	MATERI REMIDIAL
32	Risti Rahmatul Husna	P	Tidak Ada
33	Rysnissa Zhahrani	P	Tidak Ada
34	Salsabila Widya Kirana	P	Tidak Ada
35	Sangkala Thesda kenanga	P	Tidak Ada
36	Shabrina myra vania	P	Tidak Ada
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
	Klasikal		Tidak Ada

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIP 13401241051

PENGELompokan Peserta Remedial

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Nama Tes : Ulangan Harian
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X/MIPA 4
Tanggal Tes : 24 Agustus 2016
SK/KD : Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan

No	Kompetensi Dasar	Peserta Remedial	Hari	Tgl	Jam	Tempat
1	Soal Objektif					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

No	Kompetensi Dasar	Peserta Remedial	Hari	Tgl	Jam	Tempat
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
	Soal Essey					
1	Pengertian Kekuasaan					
2	Teori Pembagian kekuasaan	Dimas jati W;				

No	Kompetensi Dasar	Peserta Remedial	Hari	Tgl	Jam	Tempat
3	Teori Pembagian kekuasaan	Alliyssa Azahra; Cheria Annisa Sholikhati; Destiara Kusuma; Dian Famela; Dimas Binatang D; Dimas jati W; Dinda aurora; dwi Sakti B; Faishal Irfan; Fauzan Dary Muhammad; Mahardika Rasendriya; Muhammad Iqbal Bima Sakti; Muhammad Naufal Fairas; Owena Zaneta Yogaswari; Rahma Elfitasari; Rifki Hanan M; Salsabila Widya Kirana; Sangkala Thesda kenanga; Shabrina myra vania;				
4	Pembagian kekuasaan di Indonesia					
5	kemertihan dan Lembaga Pemerintahan Non-kemertihan (LPNK)	Faris taufiq A;				
6	kemertihan dan Lembaga Pemerintahan Non-kemertihan (LPNK)	Faishal Irfan; Faris taufiq A; Indana Zahrotul Aini; Nasitiff Safifa Radya R; Owena Zaneta Yogaswari; Rifki Hanan M;				
7	Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan	Dimas Binatang D; dwi Sakti B; Dyo Risky Almarib; Faishal Irfan; Fauzan Dary Muhammad; Mahardika Rasendriya; Muhammad Iqbal Bima Sakti; Rahma Elfitasari; Rynissa Zahtrani; Sangkala Thesda kenanga;				
8	Identifikasi macam pembagian kekuasaan Indonesia	Faris taufiq A;				
9	Pembagian kekuasaan di Indonesia	Cheria Annisa Sholikhati; Dimas Binatang D; Mahardika Rasendriya; Muhammad Dimas Baihaqi; Muhammad Naufal Fairas; Rifki Hanan M;				
10	kemertihan dan Lembaga Pemerintahan Non-kemertihan (LPNK)	Dimas Binatang D; Mahardika Rasendriya;				

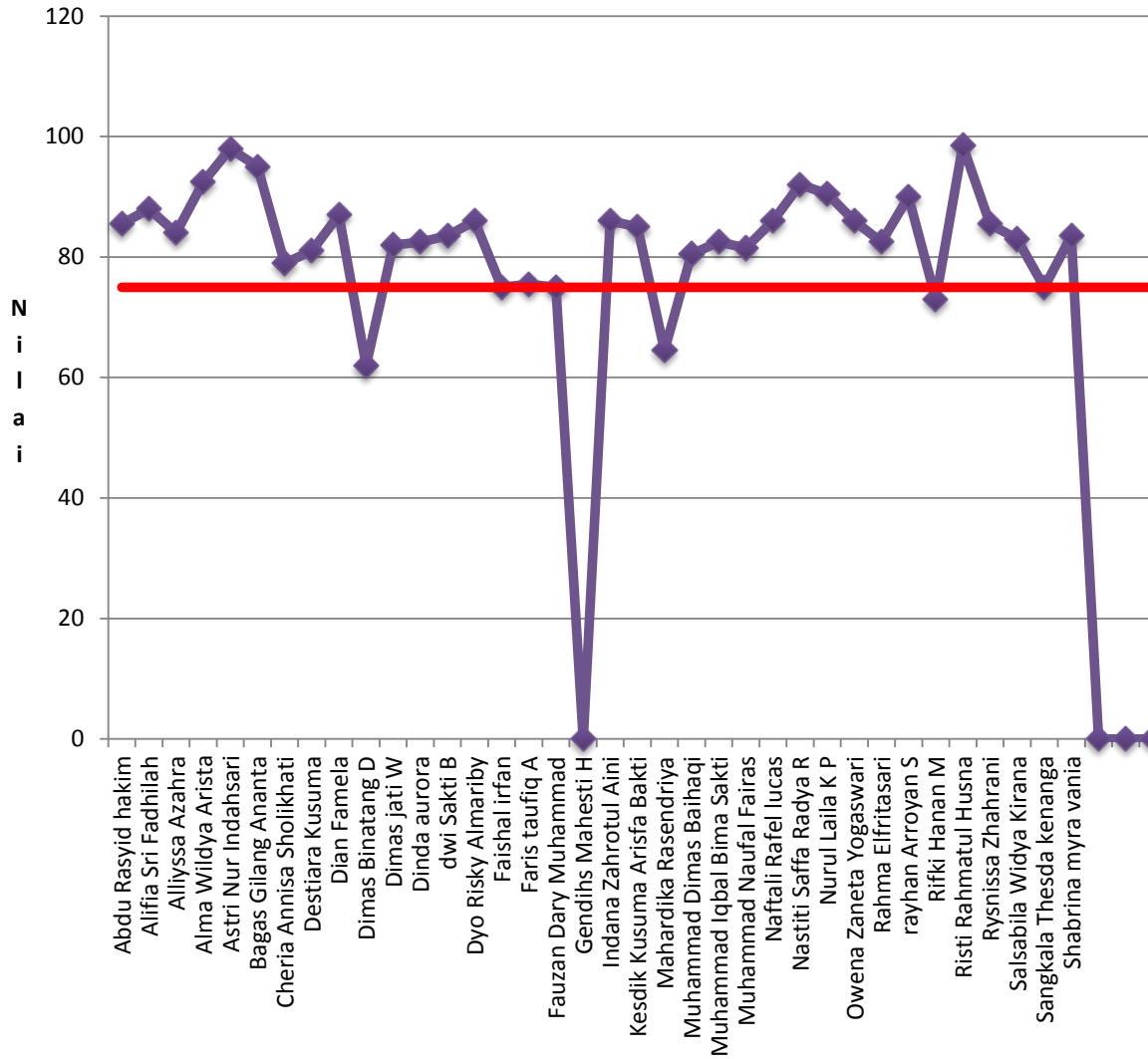
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIP 13401241051

Distribusi Nilai dan Ketuntasan Belajar



ir

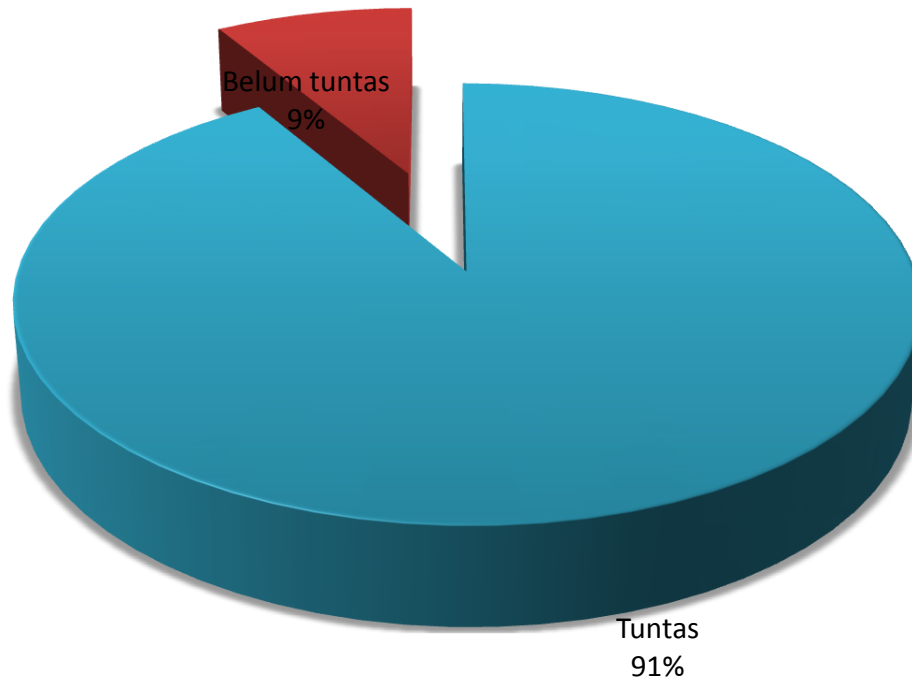


◆ Nilai

— KKM



Proporsi Ketuntasan Belajar





AnBuso 4.41

© 2011-2012 by Ali Muhson

IDENTITAS

(Hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus tetapi **tidak boleh memindah isi data atau menggunak**

Data Umum	Kolom Pengisian
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 10 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program	X/MIPA 4
Nama Tes	Ulangan Harian
SK/KD	Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan
Nama Guru	Ririn Wulandari
NIP	13401241051
Semester	Gasal
Tahun Pelajaran	2016/2017
Tanggal Tes	22 Agustus 2016
Tanggal Diperiksa	27 Agustus 2016
Nama Kepala Sekolah	Drs. Basuki
NIP Kepala Sekolah	1991012 198903 1 006
Tempat Laporan	Yogyakarta
Tanggal Laporan	30 Agustus 2016
Skala Penilaian (10 atau 100)	100
Nilai KKM	75

Data Soal Pilihan Ganda

Jumlah Alternatif Jawaban (Max 5)	
Skor Benar tiap Butir Soal	
Skor Salah tiap butir soal	
Kunci Jawaban (Max 50 soal)	
Skor Maksimal Pilihan Ganda	

Kemampuan yang Diukur untuk Soal Pilihan Ganda

Soal Nomor 1	
Soal Nomor 2	
Soal Nomor 3	
Soal Nomor 4	
Soal Nomor 5	
Soal Nomor 6	
Soal Nomor 7	
Soal Nomor 8	
Soal Nomor 9	
Soal Nomor 10	

Soal Nomor 11	
Soal Nomor 12	
Soal Nomor 13	
Soal Nomor 14	
Soal Nomor 15	
Soal Nomor 16	
Soal Nomor 17	
Soal Nomor 18	
Soal Nomor 19	
Soal Nomor 20	
Soal Nomor 21	
Soal Nomor 22	
Soal Nomor 23	
Soal Nomor 24	
Soal Nomor 25	
Soal Nomor 26	
Soal Nomor 27	
Soal Nomor 28	
Soal Nomor 29	
Soal Nomor 30	
Soal Nomor 31	
Soal Nomor 32	
Soal Nomor 33	
Soal Nomor 34	
Soal Nomor 35	
Soal Nomor 36	
Soal Nomor 37	
Soal Nomor 38	
Soal Nomor 39	
Soal Nomor 40	
Soal Nomor 41	
Soal Nomor 42	
Soal Nomor 43	
Soal Nomor 44	
Soal Nomor 45	
Soal Nomor 46	
Soal Nomor 47	
Soal Nomor 48	
Soal Nomor 49	
Soal Nomor 50	

Data Soal Essay

Jumlah Soal (maksimal 10)	10
Skor Maksimal Soal Nomor 1	10
Skor Maksimal Soal Nomor 2	10
Skor Maksimal Soal Nomor 3	10

Skor Maksimal Soal Nomor 4	10
Skor Maksimal Soal Nomor 5	10
Skor Maksimal Soal Nomor 6	10
Skor Maksimal Soal Nomor 7	10
Skor Maksimal Soal Nomor 8	10
Skor Maksimal Soal Nomor 9	10
Skor Maksimal Soal Nomor 10	10
Skor Maksimal Soal Essay	
Skor Maksimal Gabungan	
Kemampuan yang Diukur untuk Soal Essay	
Soal Nomor 1	Pengertian Kekuasaan
Soal Nomor 2	Teori Pembagian kekuasaan
Soal Nomor 3	Teori Pembagian kekuasaan
Soal Nomor 4	Pembagian kekuasaan di Indonesia
Soal Nomor 5	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)
Soal Nomor 6	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)
Soal Nomor 7	Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan
Soal Nomor 8	Identifikasi macam pembagian kekuasaan Indonesia
Soal Nomor 9	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)
Soal Nomor 10	Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan

Identitas dan Jawaban Siswa

(Hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus tetapi **tidak boleh memindah isi data atau menggunakan fasilitas Cut Paste**)

No	Nama	Jenis Kelamin	Jawaban Siswa S																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Affan Haris Ramadhan	L	A	A	A	A	C	B	C	C	E	A	C	D	D	A	C	D	D	D	A	C	E	B	C	D	D	
2	Alfiya Azahrani	P	B	D	E	A	A	C	C	C	B	A	E	B	E	B	D	D	D	E	D	C	E	D	D	A	D	
3	Anisa Bala	P	B	B	A	A	A	A	C	C	C	B	A	E	B	E	C	D	E	C	C	E	D	D	A	C		
4	Annisa Amalia Putri Pratama	P	D	E	C	A	A	C	D	C	B	A	D	B	E	B	D	A	D	E	D	C	E	D	C	A	D	
5	A. Rafelito Marsadio	L	A	D	D	A	A	C	E	C	B	A	B	B	E	B	D	D	D	E	D	C	E	D	C	A	D	
6	Don Rui Tornado	L	B	D	A	A	A	C	C	C	E	B	E	B	A	A	D	D	D	E	A	C	E	B	C	A	C	
7	Fadhien Ramadhan H	L	D	D	A	C	A	C	C	C	B	A	B	C	C	B	A	E	D	B	D	C	E	B	A	D	A	
8	Fannijara Enggar Larasati	P	B	D	D	A	A	A	C	C	C	B	A	C	A	E	B	E	C	D	E	D	C	E	D	C	A	D
9	Fariz Jordan	L	C	D	D	A	A	C	E	C	B	A	D	C	E	B	E	C	B	E	D	C	E	B	C	D	C	D
10	Filda Fikri Faizal M	L	D	D	D	A	A	C	C	C	C	B	B	D	B	E	B	D	D	E	D	C	E	D	C	A	D	
11	Gunawan Chandra Pradita	L	D	D	D	A	A	C	E	C	B	A	B	C	E	B	D	E	D	E	D	C	E	C	C	A	D	
12	Ikhسان Aditya Nuur Q	L	C	A	D	E	A	A	E	C	B	A	D	C	E	B	E	E	B	E	D	C	E	D	C	A	D	
13	Irma anindya Budiarti	P	E	A	D	D	A	C	B	C	B	A	B	B	E	B	D	D	D	E	E	C	E	D	D	A	D	
14	Kafi Madana Sahadewa	L	D	A	D	A	A	C	B	C	B	A	D	B	E	B	D	D	D	E	D	C	E	D	C	A	E	
15	Khairunnisa Afidayani	P	D	D	D	A	A	C	E	C	B	A	D	B	E	B	D	E	D	E	D	D	E	D	C	A	D	
16	Marcella Citra Amaranggana	P	D	D	E	A	D	C	B	C	B	A	D	B	E	B	E	C	D	E	D	C	E	D	C	A	D	
17	Mehza Reflyand	L	A	C	D	A	A	C	B	A	B	A	D	B	E	B	D	C	D	B	D	E	D	D	D	D	D	
18	Muhammad Ari Dharmawan	L	E	E	D	A	A	C	B	C	B	A	D	C	E	B	D	E	D	E	A	D	E	D	D	A	D	
19	Muhammad Fauzan Acyuto	L	D	C	D	A	D	C	C	E	B	A	C	B	E	B	E	C	D	E	D	C	E	D	C	A	D	
20	Muhammad Rafi Raharjo	L	A	D	D	A	A	C	C	C	B	A	D	B	E	B	D	C	D	E	D	C	E	D	C	A	D	
21	Muhammad Rendy Razak S.P	L	A	D	D	A	A	C	C	C	B	A	D	B	E	B	D	E	D	E	D	C	E	D	C	A	D	
22	Nurina Salsabila	P	B	D	D	A	A	C	C	C	B	A	B	B	E	B	C	D	D	E	D	D	E	D	C	A	D	
23	RM.Muhammad Fadhilah Dafifa F	L	D	D	D	A	D	C	B	C	B	A	A	B	E	B	E	C	D	D	E	D	D	C	E	A	D	
24	Rika Ardania	P	D	D	D	A	A	C	C	C	B	A	D	B	E	B	E	C	D	D	B	D	D	E	C	A	D	

Identitas dan Jawaban Siswa:

(Hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus text)

No	Nama	Jenis Kelamin	Skor Jawaban Siswa Soal Essay									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Affan Haris Ramadhan	L	7.0	10.0	8.0	7.0	6.0	6.0	8.0	5.0	10.0	3.0
2	Alfiya Azahrani	P	10.0	10.0	0.0	6.0	10.0	5.0	5.0	10.0	9.0	3.0
3	Anisa Bala	P	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	9.0	10.0	9.5	6.0
4	Annisa Amalia Putri Pratama	P	9.0	7.0	8.0	5.0	7.0	3.0	7.0	5.0	9.5	3.0
5	A. Rafelito Marsadio	L	3.0	10.0	3.0	3.0	10.0	5.0	7.0	3.0	9.5	3.0
6	Don Rui Tornado	L	8.0	10.0	3.0	6.0	9.0	6.0	8.0	5.0	9.5	3.0
7	Fadhien Ramadhan H	L	10.0	5.0	3.0	5.0	8.0	6.0	6.5	4.0	7.0	3.0
8	Fannijara Enggar Larasati	P	10.0	10.0	5.0	10.0	8.0	6.0	10.0	9.0	6.0	8.0
9	Fariz Jordan	L	10.0	10.0	9.0	5.0	6.0	7.0	9.0	5.0	10.0	8.0
10	Filda Fikri Faizal M	L	5.0	10.0	3.0	5.0	9.0	5.0	5.0	10.0	9.0	10.0
11	Gunawan Chandra Pradita	L	8.0	6.0	10.0	6.0	5.0	5.0	7.0	3.0	9.5	8.0
12	Ikhسان Aditya Nuur Q	L	9.5	8.0	10.0	5.0	10.0	5.0	8.0	5.0	9.5	8.0
13	Irma anindya Budiarti	P	3.0	8.0	3.0	10.0	10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	8.0
14	Kafi Madana Sahadewa	L	5.0	4.0	5.0	3.0	10.0	5.0	7.0	3.0	10.0	3.0
15	Khairunnisa Afidayani	P	10.0	10.0	9.0	7.0	7.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0
16	Marcella Citra Amaranggana	P	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	5.0	10.0	10.0	9.5	10.0
17	Mehza Reflyand	L	8.0	8.0	8.0	6.0	10.0	6.0	6.0	5.0	10.0	8.0
18	Muhammad Ari Dharmawan	L										
19	Muhammad Fauzan Acyuto	L	10.0	10.0	7.0	6.0	7.0	5.0	8.0	5.0	10.0	3.0
20	Muhammad Rafi Raharjo	L	8.0	10.0	8.0	8.0	6.0	5.0	9.0	5.0	10.0	3.0
21	Muhammad Rendy Razak S.P	L	10.0	7.0	5.0	8.0	8.0	6.0	10.0	5.0	8.0	3.0
22	Nurina Salsabila	P	0.0	7.0	3.0	5.0	8.0	5.0	8.0	0.0	3.0	7.0
23	RM.Muhammad Fadhilah Dafifa F	L	8.0	10.0	5.0	7.0	10.0	5.0	8.0	7.0	3.0	0.0
24	Rika Ardania	P	10.0	10.0	8.0	9.0	10.0	3.0	9.0	10.0	9.5	10.0

DAFTAR NILAI SISWA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Nama Tes : Ulangan Harian
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X/MIPA 4
Tanggal Tes : 22 Agustus 2016
SK/KD : Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan

KKM
75

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANGAN
			BENAR	SALAH	SKOR			
1	Affan Haris Ramadhan	L	0	1	0	70.0	70.0	Belum tuntas
2	Alfiya Azahrani	P	0	1	0	68.0	68.0	Belum tuntas
3	Anisa Bala	P	0	1	0	91.5	91.5	Tuntas
4	Annisa Amalia Putri Pratama	P	0	1	0	63.5	63.5	Belum tuntas
5	A. Rafelito Marsadio	L	0	1	0	56.5	56.5	Belum tuntas
6	Don Rui Tornado	L	0	1	0	67.5	67.5	Belum tuntas
7	Fadhien Ramadahan H	L	0	1	0	57.5	57.5	Belum tuntas
8	Fannijara Enggar Larasati	P	0	1	0	82.0	82.0	Tuntas
9	Fariz Jordan	L	0	1	0	79.0	79.0	Tuntas
10	Filda Fikri Faizal M	L	0	1	0	71.0	71.0	Belum tuntas
11	Gunawan Chandra Pradita	L	0	1	0	67.5	67.5	Belum tuntas
12	Ikhsan Aditya Nuur Q	L	0	1	0	78.0	78.0	Tuntas
13	Irma anindya Budiarti	P	0	1	0	77.0	77.0	Tuntas
14	Kafi Madana Sahadewa	L	0	1	0	55.0	55.0	Belum tuntas
15	Khairunnisa Afiidayani	P	0	1	0	92.0	92.0	Tuntas
16	Marcella Citra Amarangana	P	0	1	0	90.5	90.5	Tuntas
17	Mehza Refliyand	L	0	1	0	75.0	75.0	Tuntas
18	Muhammad Ari Dharmawan	L	0	1	0			
19	Muhammad Fauzan Acyuto	L	0	1	0	71.0	71.0	Belum tuntas
20	Muhammad Rafli Raharjo	L	0	1	0	72.0	72.0	Belum tuntas
21	Muhammad Rendy Razak S.P	L	0	1	0	70.0	70.0	Belum tuntas
22	Nurina Salsabila	P	0	1	0	46.0	46.0	Belum tuntas
23	RM.Muhammad Fadhilah Daffa F	L	0	1	0	63.0	63.0	Belum tuntas
24	Rika Ardania	P	0	1	0	88.5	88.5	Tuntas
25	Rizka Putri Dwicahyani	P	0	1	0	66.5	66.5	Belum tuntas
26	Salsabila Oktaviani Hutomo Putri	P	0	1	0	73.0	73.0	Belum tuntas
27	Saniara Azka Wahyu Santoso	P	0	1	0	83.0	83.0	Tuntas
28	Sekar Ayu Mayangsari	P	0	1	0	50.0	50.0	Belum tuntas
29	Shafa Putri Shintania	P	0	1	0	79.5	79.5	Tuntas
30	Sheilla Sara Yasmine	P	0	1	0	85.0	85.0	Tuntas
31	Shendy Wijaya	L	0	1	0	79.5	79.5	Tuntas
32	Tissa Farikha	P	0	1	0	77.0	77.0	Tuntas
33	Weka Nariswari J H D	P				88.5	88.5	Tuntas
34	Zahra Seruni Ramadhani	P				60.0	60.0	Belum tuntas

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANGAN
			BENAR	SALAH	SKOR			
35	Zukhrufa Puspita Wisaksana	P				75.0	75.0	Tuntas
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
- Jumlah peserta test =		34	Jumlah Nilai =		0	2469	2469	
- Jumlah yang tuntas =		16	Nilai Terendah =		0.00	46.00	46.00	
- Jumlah yang belum tuntas =		18	Nilai Tertinggi =		0.00	92.00	92.00	
- Persentase peserta tuntas =		47.1	Rata-rata =		0.00	72.62	72.62	
- Persentase peserta belum tuntas =		52.9	Standar Deviasi =		0.00	11.81	11.81	

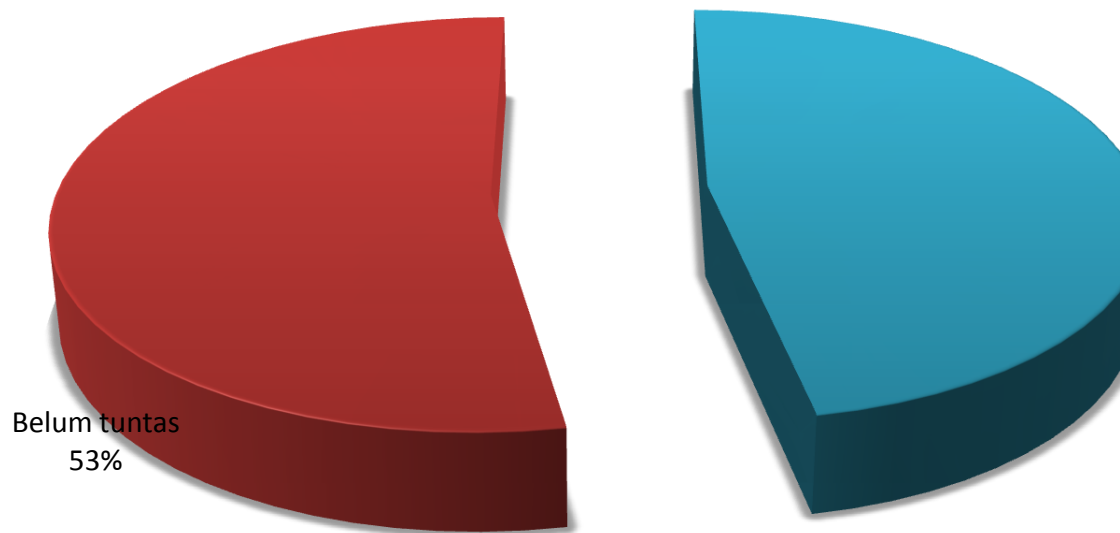
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

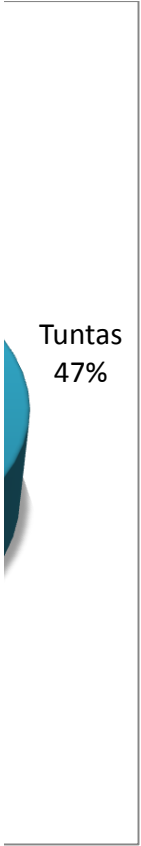
Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIP 13401241051

Proporsi Ketuntasan Belajar





AnBuso 4.41

© 2011-2012 by Ali Muhson

IDENTITAS

(Hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus tetapi **tidak boleh memindah isi data atau menggunak**

Data Umum	Kolom Pengisian
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 10 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program	X/IPS 2
Nama Tes	Ulangan Harian
SK/KD	Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan
Nama Guru	Ririn Wulandari
NIP	13401241051
Semester	Gasal
Tahun Pelajaran	2016/2017
Tanggal Tes	27 Agustus 2016
Tanggal Diperiksa	28 Agustus 2016
Nama Kepala Sekolah	Drs. Basuki
NIP Kepala Sekolah	1991012 198903 1 006
Tempat Laporan	Yogyakarta
Tanggal Laporan	30 Agustus 2016
Skala Penilaian (10 atau 100)	100
Nilai KKM	75

Data Soal Pilihan Ganda

Jumlah Alternatif Jawaban (Max 5)	
Skor Benar tiap Butir Soal	
Skor Salah tiap butir soal	
Kunci Jawaban (Max 50 soal)	
Skor Maksimal Pilihan Ganda	

Kemampuan yang Diukur untuk Soal Pilihan Ganda

Soal Nomor 1	
Soal Nomor 2	
Soal Nomor 3	
Soal Nomor 4	
Soal Nomor 5	
Soal Nomor 6	
Soal Nomor 7	
Soal Nomor 8	
Soal Nomor 9	
Soal Nomor 10	

Soal Nomor 11	
Soal Nomor 12	
Soal Nomor 13	
Soal Nomor 14	
Soal Nomor 15	
Soal Nomor 16	
Soal Nomor 17	
Soal Nomor 18	
Soal Nomor 19	
Soal Nomor 20	
Soal Nomor 21	
Soal Nomor 22	
Soal Nomor 23	
Soal Nomor 24	
Soal Nomor 25	
Soal Nomor 26	
Soal Nomor 27	
Soal Nomor 28	
Soal Nomor 29	
Soal Nomor 30	
Soal Nomor 31	
Soal Nomor 32	
Soal Nomor 33	
Soal Nomor 34	
Soal Nomor 35	
Soal Nomor 36	
Soal Nomor 37	
Soal Nomor 38	
Soal Nomor 39	
Soal Nomor 40	
Soal Nomor 41	
Soal Nomor 42	
Soal Nomor 43	
Soal Nomor 44	
Soal Nomor 45	
Soal Nomor 46	
Soal Nomor 47	
Soal Nomor 48	
Soal Nomor 49	
Soal Nomor 50	

Data Soal Essay

Jumlah Soal (maksimal 10)	10
Skor Maksimal Soal Nomor 1	10
Skor Maksimal Soal Nomor 2	10
Skor Maksimal Soal Nomor 3	10

Skor Maksimal Soal Nomor 4	10
Skor Maksimal Soal Nomor 5	10
Skor Maksimal Soal Nomor 6	10
Skor Maksimal Soal Nomor 7	10
Skor Maksimal Soal Nomor 8	10
Skor Maksimal Soal Nomor 9	10
Skor Maksimal Soal Nomor 10	10
Skor Maksimal Soal Essay	
Skor Maksimal Gabungan	
Kemampuan yang Diukur untuk Soal Essay	
Soal Nomor 1	Pengertian Kekuasaan
Soal Nomor 2	Teori Pembagian kekuasaan
Soal Nomor 3	Teori Pembagian kekuasaan
Soal Nomor 4	Pembagian kekuasaan di Indonesia
Soal Nomor 5	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)
Soal Nomor 6	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)
Soal Nomor 7	Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan
Soal Nomor 8	Identifikasi macam pembagian kekuasaan Indonesia
Soal Nomor 9	Pembagian kekuasaan di Indonesia
Soal Nomor 10	kementrian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementrian (LPNK)

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANGAN
			BENAR	SALAH	SKOR			
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
- Jumlah peserta test =		21	Jumlah Nilai =		0	1611	1611	
- Jumlah yang tuntas =		14	Nilai Terendah =		0.00	56.00	56.00	
- Jumlah yang belum tuntas =		7	Nilai Tertinggi =		0.00	91.00	91.00	
- Persentase peserta tuntas =		66.7	Rata-rata =		0.00	76.69	76.69	
- Persentase peserta belum tuntas =		33.3	Standar Deviasi =		#DIV/0!	10.25	10.25	

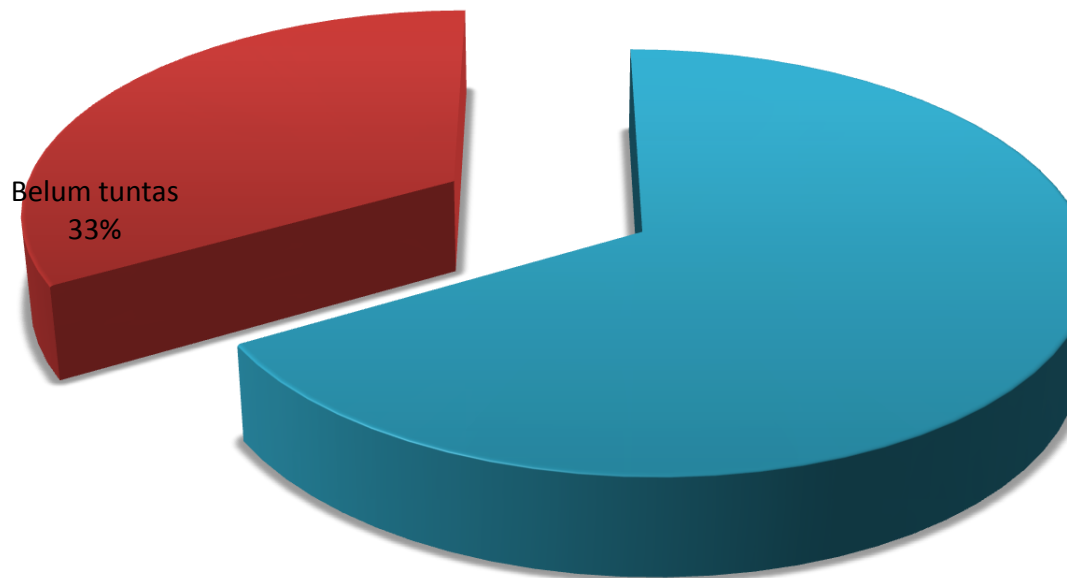
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIP 13401241051

Proporsi Ketuntasan Belajar





Tuntas
67%

AnBuso 4.41

© 2011-2012 by Ali Muhson

IDENTITAS

(Hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus tetapi **tidak boleh memindah isi data atau menggunak**

Data Umum	Kolom Pengisian
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 10 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program	X
Nama Tes	Ulangan Harian Susulan
SK/KD	Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan
Nama Guru	Ririn Wulandari
NIP	13401241051
Semester	Gasal
Tahun Pelajaran	2016/2017
Tanggal Tes	2 September 2016
Tanggal Diperiksa	4 September 2016
Nama Kepala Sekolah	Drs. Basuki
NIP Kepala Sekolah	1991012 198903 1 006
Tempat Laporan	Yogyakarta
Tanggal Laporan	6 September 2016
Skala Penilaian (10 atau 100)	100
Nilai KKM	75

Data Soal Pilihan Ganda

Jumlah Alternatif Jawaban (Max 5)	
Skor Benar tiap Butir Soal	
Skor Salah tiap butir soal	
Kunci Jawaban (Max 50 soal)	
Skor Maksimal Pilihan Ganda	

Kemampuan yang Diukur untuk Soal Pilihan Ganda

Soal Nomor 1	
Soal Nomor 2	
Soal Nomor 3	
Soal Nomor 4	
Soal Nomor 5	
Soal Nomor 6	
Soal Nomor 7	
Soal Nomor 8	
Soal Nomor 9	
Soal Nomor 10	

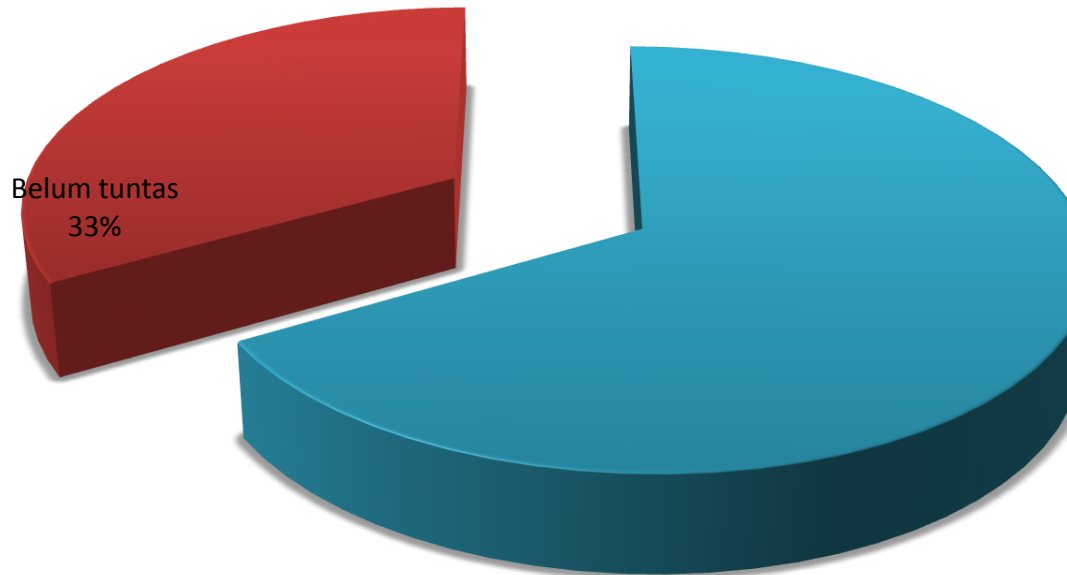
Soal Nomor 11	
Soal Nomor 12	
Soal Nomor 13	
Soal Nomor 14	
Soal Nomor 15	
Soal Nomor 16	
Soal Nomor 17	
Soal Nomor 18	
Soal Nomor 19	
Soal Nomor 20	
Soal Nomor 21	
Soal Nomor 22	
Soal Nomor 23	
Soal Nomor 24	
Soal Nomor 25	
Soal Nomor 26	
Soal Nomor 27	
Soal Nomor 28	
Soal Nomor 29	
Soal Nomor 30	
Soal Nomor 31	
Soal Nomor 32	
Soal Nomor 33	
Soal Nomor 34	
Soal Nomor 35	
Soal Nomor 36	
Soal Nomor 37	
Soal Nomor 38	
Soal Nomor 39	
Soal Nomor 40	
Soal Nomor 41	
Soal Nomor 42	
Soal Nomor 43	
Soal Nomor 44	
Soal Nomor 45	
Soal Nomor 46	
Soal Nomor 47	
Soal Nomor 48	
Soal Nomor 49	
Soal Nomor 50	

Data Soal Essay

Jumlah Soal (maksimal 10)	10
Skor Maksimal Soal Nomor 1	10
Skor Maksimal Soal Nomor 2	10
Skor Maksimal Soal Nomor 3	10

Skor Maksimal Soal Nomor 4	10
Skor Maksimal Soal Nomor 5	10
Skor Maksimal Soal Nomor 6	10
Skor Maksimal Soal Nomor 7	10
Skor Maksimal Soal Nomor 8	10
Skor Maksimal Soal Nomor 9	10
Skor Maksimal Soal Nomor 10	10
Skor Maksimal Soal Essay	
Skor Maksimal Gabungan	
Kemampuan yang Diukur untuk Soal Essay	
Soal Nomor 1	Pengertian Kekuasaan
Soal Nomor 2	Teori Pembagian kekuasaan
Soal Nomor 3	Teori Pembagian kekuasaan
Soal Nomor 4	Pembagian kekuasaan di Indonesia
Soal Nomor 5	kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementerian (LPNK)
Soal Nomor 6	kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementerian (LPNK)
Soal Nomor 7	kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementerian (LPNK)
Soal Nomor 8	kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-kementerian (LPNK)
Soal Nomor 9	Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan
Soal Nomor 10	Penerapan nilai-nilai Pancasila di penyelenggaraan Pemerintahan

Proporsi Ketuntasan Belajar





Tuntas
67%

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANGAN
			BENAR	SALAH	SKOR			
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
- Jumlah peserta test =		6	Jumlah Nilai =		0	462	462	
- Jumlah yang tuntas =		4	Nilai Terendah =		0.00	67.00	67.00	
- Jumlah yang belum tuntas =		2	Nilai Tertinggi =		0.00	94.00	94.00	
- Persentase peserta tuntas =		66.7	Rata-rata =		#DIV/0!	77.00	77.00	
- Persentase peserta belum tuntas =		33.3	Standar Deviasi =		#DIV/0!	9.09	9.09	

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 6 September 2016
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIP 13401241051

HASIL ANALISIS SOAL ESSAY

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 10 Yogyakarta
Nama Tes : Ulangan Harian Susulan
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X
Tanggal Tes : 2 September 2016
SK/KD : Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
1	0.242	Cukup Baik	0.883	Mudah	Cukup Baik
2	0.502	Baik	0.900	Mudah	Cukup Baik
3	0.342	Baik	0.650	Sedang	Baik
4	0.296	Cukup Baik	0.733	Mudah	Cukup Baik
5	0.314	Baik	0.833	Mudah	Cukup Baik
6	0.742	Baik	0.875	Mudah	Cukup Baik
7	0.624	Baik	0.725	Mudah	Cukup Baik
8	0.791	Baik	0.733	Mudah	Cukup Baik
9	0.729	Baik	0.583	Sedang	Baik
10	0.371	Baik	0.783	Mudah	Cukup Baik

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta

Yogyakarta, 6 September 2016
Guru Mata Pelajaran

Drs. Basuki
NIP 1991012 198903 1 006

Ririn Wulandari
NIP 13401241051

DOKUMENTASI

PROSES PEMBELAJARAN



X MIPA 3



X MIPA 4



X IPS 2



XII IPA 1



XII IPX 2



XII IPA 4



XII IPS

HUT SMA N 10 YOGYAKARTA KE 64



KEGIATAN JALAN SEHAT



BAKTI SOSIAL (PEMBAGIAN SEMBAKO)



PENSI ANTAR KELAS

